

# **ANALISIS AKTOR LOKAL DOMINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**HANIFAH FIRDA FAUZIA GUNADI**



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

*@Hak cipta milik IPB University*

**IPB University**





@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University  
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “**Analisis Aktor Lokal Dominan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa**” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2021

*Hanifah Firda Fauzia Gunadi*  
**NIM. I353180181**



## RINGKASAN

HANIFAH FIRDA FAUZIA GUNADI. Analisis Aktor Lokal Dominan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dibimbing oleh SOFYAN SJAF dan LALA M. KOLOPAKING.

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu proses penting yang menentukan tercapainya tujuan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa menghadapi berbagai kendala. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya masyarakat (SDM) di desa, melainkan juga kendala yang bersifat struktural berupa intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peranannya dalam mengatur pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan ruang partisipasi bagi masyarakat semakin sempit.

Penelitian ini dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan yang merupakan desa tipe 'desa' dan Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga yang merupakan desa tipe 'desa-kota'. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengukur dan menganalisis indeks pengaruh aktor dan tindakan para aktor lokal dalam pengelolaan keuangan desa, (2) menganalisis makna partisipasi menurut masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, (3) menganalisis makna efektivitas menurut masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan desa, dan (4) menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, diskusi terfokus dan wawancara mendalam terhadap informan untuk mengidentifikasi para aktor yang terlibat secara dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Daftar nama aktor yang dihasilkan akan menjadi informan untuk dianalisis tipe tindakan sosial dan peran aktor dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, identifikasi variabel partisipasi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa menurut pandangan masyarakat dilakukan dengan teknik diskusi terarah dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa. Variabel yang telah dihimpun akan didefinisikan secara operasional akan menjadi instrumen untuk mengukur tingkat partisipasi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan teknik wawancara terstruktur terhadap responden. Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk mengukur indeks pengaruh para aktor lokal dominan.

Berdasarkan identifikasi aktor dan pengukuran pengaruh aktor yang telah dilakukan di kedua desa, terdapat enam aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Pada kasus di Desa Purwabakti, aktor lokal dominan tersebut yaitu sekretaris desa (WY), bendahara desa (AS) dan TPK lapang kegiatan pembangunan (MF). Pada kasus di Desa Sukadamai, aktor lokal dominan tersebut yaitu sekretaris desa (DK), bendahara desa (SJ) dan ketua LPM (MS). Rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Purwabakti dimiliki oleh MF sebagai TPK lapang bidang pembangunan dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal ekonomi. Sedangkan rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Sukadamai adalah DK sebagai sekretaris desa dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal moral. Seluruh aktor tersebut memiliki tindakan yang berbeda ketika mengatasi persoalan dalam pengelolaan

@Hak Cipta IPB University

IPB University

keuangan desa meskipun memiliki sifat tindakan yang sama yaitu tindakan rasional instrumental. Perbedaan tindakan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang aktor. Aktor lokal dominan yang berada di Desa Sukadamai dengan tipe 'desa-kota', memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan memiliki pengalaman berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Hal ini mendorong para aktor tersebut untuk bertindak dengan mengutamakan prinsip transparansi dan partisipatif agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan, aktor lokal dominan yang berada di Desa Purwabakti dengan tipe 'desa', memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan pengalaman bekerja sama dengan berbagai pihak luar desa yang lebih sedikit. Hal tersebut menyebabkan para aktor tersebut sangat ketat mengikuti peraturan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kendala berupa kekurangan dana untuk pembangunan desa dilakukan secara normatif dan birokratis.

Masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai memaknai partisipasi sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut berada pada kategori rendah karena ruang partisipasi masyarakat hanya berada di dalam musyawarah. Sedangkan, TPK dan tim khusus hanya terdiri dari beberapa perwakilan masyarakat saja. Adapun hasil musyawarah maupun laporan keuangan tahunan hanya dapat disadari dan dipahami oleh sebagian masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap keuangan dan program pembanguann di desa.

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dimaknai oleh masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang dinilai dari ketersediaan program pembangunan dan kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Purwabakti cenderung rendah pada keempat bidang. Sedangkan, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Sukadamai cenderung tinggi terutama pada bidang pembinaan masyarakat dan penganggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan besar alokasi anggaran yang direncanakan dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan hasil tindakan dari para aktor lokal dominan desa.

Pada kasus di Desa Purwabakti, hubungan antara tingkat partisipasi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa memiliki koefisien korelasi sebesar -0,304. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa memiliki hubungan yang lemah dan tidak searah. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat secara langsung hanya dibatasi pada beberapa ruang partisipasi saja. Sedangkan, koefisien korelasi antara tingkat partisipasi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Sukdamai sebesar 0,596. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukadamai cukup memiliki hubungan yang searah dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat terjadi karena para aktor lokal dominan di Desa Sukadamai membuka ruang partisipasi yang lebih banyak dibandingkan ruang partisipasi di Desa Purwabakti. Salah satunya adalah ruang partisipasi berupa sosialisasi pra-kegiatan di setiap wilayah yang akan dilaksanakan pembangunan.

Kata kunci : aktor lokal, dominasi, keuangan desa.



**@Hak cipta milik IPB University**

**IPB University**



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## SUMMARY

HANIFAH FIRDA FAUZIA GUNADI. Analysis of the Dominant Local Actors and Community Participation in the Village Financial Management. Supervised by SOFYAN SJAF and LALA M. KOLOPAKING.

Village financial management is an important process that determines the achievement of the village development goals. However, in its implementation, financial management in a village faces various obstacles. Based on sociological perspective, the constraints in village financial management were not only about administrative aspects which were caused by the capacity of community resources in the village, but also structural constraints in the form of governmental intervention through their policies and regulations on their which further reduced local community participation in village financial management.

This research was conducted in two villages in Bogor Regency, i.e. Purwabakti Village, Pamijahan District with the characteristics of a rural village and Sukadamai Village, Dramaga District with semi-urban village characteristics. The objectives of this study were (1) to measure and analyze the influence index of local actors and actions of local actors in village financial management, (2) to analyze the meaning of participation and the level of community participation in village financial management, (3) to analyze the meaning of effectiveness and effectiveness level of village financial management in achieving the successful of the village development program, and (4) analyze the relationship between the level of community participation and the level of effectiveness of village financial management.

Data collection in this study was carried out through observation techniques, focused discussions and in-depth interviews with informants to identify the actors who were predominantly involved in village financial management. The actor names listed from the interviews were then selected as informants to analyze the types of social actions and the roles of the actors in village financial management. Furthermore, the identification of participation variables and the effectiveness of village financial management according to the community opinion was carried out by focused discussion techniques and in-depth interviews with community leaders and village government officials. The collected variables were then defined operationally to be used as material for a questionnaire to measure the level of participation and effectiveness of village financial management using structured interview to the respondents.

Based on the identification of actors and the measurement of actor influence in both those two villages, there were six dominant local actors in village financial management. In the case of Purwabakti Village, the dominant local actors were the village secretary (WY), the village treasurer (AS) and the field TPK development activities (MF). In the case of Sukadamai Village, the dominant local actors were the village secretary (DK), the village treasurer (SJ) and the head of the Institute of Community Empowerment (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LPM) (MS). The highest average index of influence in Purwabakti Village is owned by MF as the Field TPK of development activities with the highest contribution came from economic capital. Meanwhile, the highest average influence index in Sukadamai Village was DK as the Village Secretary with the highest contribution came from



moral capital. All of these actors had different actions when dealing with problems in village financial management even though they have the same nature of action, namely rational instrumental action. This difference in action was influenced by the actor's habitus in the form of the actor's experience and background. The dominant local actor in Sukadamai Village, with semi-urban characteristics, had a fairly high educational background and experience of interacting and collaborating with various parties including universities. This background encouraged these actors to act by prioritizing the principles of transparency and participation that met the people's needs. Meanwhile, the dominant local actors in Purwabakti Village, with the characteristics of a rural village, had a lower educational background and experience working together. This background caused these actors to strictly follow the village financial management regulations which were set by the central government. Furthermore, the obstacles in the form of lack of funds for village development were solved normatively and bureaucratically.

The communities in Purwabakti and Sukadamai Villages interpreted participation as a form of direct community involvement in village financial management. The level of community participation in the two villages were in the low category because the space for community participation was only in deliberations. Meanwhile, the TPK and the special team only consisted of a few community representatives. The results of deliberations and annual financial reports could only be realized and understood by some people who had a high level of awareness and understanding of finance and development programs in the village.

The level of effectiveness of village financial management was interpreted by the community in Purwabakti and Sukadamai villages as a measure of the success of village financial management as assessed by the availability of development programs and the usefulness of these programs for the community. The level of effectiveness of financial management in Purwabakti Village tended to be low in all four areas. Meanwhile, the level of effectiveness of financial management in Sukadamai Village tended to be high, especially in the field of community development and disaster management. This was in line with the amount of budget allocation which had been planned in the village financial management during the planning stage as the result of the actions of the dominant local village actors.

In the case of Purwabakti Village, the relationship between the level of participation and the level of effectiveness of village financial management had a correlation coefficient of -0,304. This coefficient meant that the level of community participation and the level of effectiveness of village financial management had a weak and unidirectional relationship. This relationship occurred because direct community participation in village financial management was limited to only few participation spaces. Meanwhile, the correlation coefficient between the level of participation and the level of effectiveness of financial management in Sukdamai Village was 0,596. This coefficient meant that the level of community participation in Sukadamai Village had a direct relationship with the level of effectiveness of village financial management. This condition could happen because the dominant local actors in Sukadamai Village had opened more participation spaces than in Purwabakti Village. One of them was a space for participation in the form of pre-activity socialization in each area where the development would be carried out.

Keywords: domination, local actor, village financial management





© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2021  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



**@Hak cipta milik IPB University**

**IPB University**



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



# **ANALISIS AKTOR LOKAL DOMINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**HANIFAH FIRDA FAUZIA GUNADI**

Tesis  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains pada  
Program Studi Sosiologi Pedesaan

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



**@Hak cipta milik IPB University**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis :

1. Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS



Judul Tesis

: Analisis Aktor Lokal Dominan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Nama

: Hanifah Firda Fauzia Gunadi

NIM

: 1353180181

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si.

Pembimbing 2:

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS.

NIP. 19580827 198303 1 001

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M. Eng.

NIP. 19600419 198503 1 002

Tanggal Ujian :  
18 Desember 2020

Tanggal Lulus : 19 JAN 2021



@Hak cipta milik *IPB University*

IPB University



IPB University  
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Aktor Lokal Dominan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa” ini dengan baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si dan Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan dan penyelesaian tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Titik Sumarti MC, MS dan Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, M.A selaku dosen penguji dalam ujian tesis penulis yang telah memberikan masukan demi memperkaya tesis penulis. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek-BRIN) yang telah mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Tesis Magister (PTM) tahun anggaran 2020.

Penulis juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, terutama suami dan putri tercinta, kedua orang tua dan mertua serta adik-adik yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa tulusnya. Selain itu, bantuan dan saran dari kakak dan adik tingkat serta teman-teman di Program Studi Sosiologi Pedesaan dan di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat juga begitu sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengetahui bahwa tesis ini belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Bogor, Januari 2021

Hanifah Firda Fauzia Gunadi  
NIM. I353180181

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
II PENDEKATAN TEORITIS	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Kerangka Pemikiran	19
2.3 Hipotesis Penelitian	21
III PENDEKATAN LAPANGAN	22
3.1 Paradigma dan Metode Penelitian	22
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	26
3.6 Definisi Operasional	26
IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN RESPONDEN	35
4.1 Kondisi Geografis	35
4.2 Kondisi Ekonomi	35
4.3 Kondisi Sosial	35
4.4 Gambaran Umum Responden	36
V PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PURWABAKTI DAN DESA SUKADAMAI	39
5.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	39
5.2 Struktur Keuangan Desa	42
5.3 Peran CSR Perusahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa	44
VI AKTOR LOKAL DOMINAN, INDEKS PENGARUH, KEPEMILIKAN MODAL DAN TINDAKAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	46
6.1 Aktor Lokal Dominan dan Indeks Pengaruh Aktor dalam Pengelolaan Keuangan Desa	46
6.2 Modal Aktor di Desa Purwabakti	49
6.3 Modal Aktor di Desa Sukadamai	53
6.4 Tindakan Sosial Aktor dalam Pengelolaan Keuangan Desa	56
6.5 Kaitan Kepemilikan Modal dan Latar Belakang Aktor dengan Tindakan Sosial Para Aktor Lokal	60
6.6 Ikhtisar	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



<b>VII PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MAKNA PARTISIPASI DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>64</b>
7.1 Makna Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Pandangan Masyarakat	64
7.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa	65
7.3 Ikhtisar	69
<b>VIII PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MAKNA EFEKTIVITAS DAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>70</b>
8.1 Makna Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Masyarakat	70
8.2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa	71
8.3 Ikhtisar	74
<b>IX HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>75</b>
9.1 Ikhtisar	76
<b>X SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>84</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	<b>90</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tahapan dan rincian kegiatan pengelolaan keuangan desa di desa	8
Tabel 2	Tujuan tahapan aktivitas konsep, metode dan teknik pengumpulan data penelitian	22
Tabel 3	Definisi operasional tipe tindakan sosial aktor	27
Tabel 4	Definisi operasional tingkat partisipasi masyarakat	28
Tabel 5	Definisi operasional efektivitas pengelolaan keuangan desa	30
Tabel 6	Definisi operasional indeks pengaruh aktor (Casey 2008) <i>dimodifikasi</i>	34
Tabel 7	Tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti tahun 2020	37
Tabel 8	Tingkat pendidikan responden di Desa Sukadamai tahun 2020	38
Tabel 9	Ilustrasi tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai	39
Tabel 10	Persentase anggaran belanja Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sesuai bidang tahun 2020	42
Tabel 11	Jumlah penyebutan aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020	47
Tabel 12	Rata-rata indeks pengaruh aktor di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020	48
Tabel 13	Skor modal aktor di Desa Purwabakti tahun 2020	49
Tabel 14	Skor modal aktor di Desa Sukadamai tahun 2020	53
Tabel 15	Skor tindakan sosial aktor di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020	57
Tabel 16	Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020	64
Tabel 17	Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020	66
Tabel 18	Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sesuai bidang kegiatan pada tahun 2020	71
Tabel 19	Hasil uji korelasi <i>rank spearman</i> tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti tahun 2020	75
Tabel 20	Hasil uji korelasi <i>rank spearman</i> tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sukadamai tahun 2020	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka pemikiran penelitian	20
Gambar 2	Alur dan teknik pengumpulan data penelitian	25
Gambar 3	Persentase responden berdasarkan mata pencaharian di Desa	36
Gambar 4	Persentase responden berdasarkan mata pencaharian di Desa	37
Gambar 5	Persentase sumber pembiayaan kegiatan Desa Purwabakti tahun 2020	43
Gambar 6	Persentase sumber pembiayaan kegiatan Desa Sukadamai tahun 2020	43

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang–Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam penguatan status desa untuk melakukan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melanjutkan upaya tersebut, sesuai dengan salah satu agenda Nawa Cita Presiden Republik Indonesia (RI) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, pemerintah kemudian menggulirkan Dana Desa berdasarkan landasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian mendapat perubahan hingga dua kali menjadi PP Nomor 8 tahun 2016. Dalam mengatur mengenai keuangan desa ini, Menteri Dalam Negeri ikut mengambil peran dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai aturan dan pedoman bagi desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Selama pelaksanaan penyaluran Dana Desa, *output* Dana Desa sebagian besar merupakan pembangunan infrastruktur. Sedangkan *outcome* yang dihasilkan diantaranya aspek gini rasio desa dan jumlah penduduk miskin yang hanya mengalami sedikit penurunan sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, yaitu gini rasio desa tahun 2014 sebesar 0,34 menjadi sebesar 0,32 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk miskin di tahun 2014 sebanyak 17.700.000 jiwa menurun menjadi 17.100.000 jiwa di tahun 2017<sup>1</sup>. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memaparkan nilai indeks gini di desa, kota dan desa-kota bahwa perubahan indeks gini sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, yang terjadi khususnya di pedesaan hanya sebesar 0,013 poin (BPS 2019). Nilai indeks gini yang tidak berubah secara signifikan selama tujuh tahun ke belakang menandakan ketimpangan yang terjadi di desa masih tinggi padahal program–program pemerintah yang masuk ke desa salah satunya Dana Desa ditujukan untuk mengatasi ketimpangan di desa, kota dan desa – kota dengan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Artinya, program–program tersebut dinilai masih belum efektif. Ketimpangan yang tinggi juga menunjukkan kekayaan di desa hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat desa. *Smeru Research Institute* memaparkan hasil kajiannya terhadap data kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dengan menyimpulkan bahwa kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan namun ketimpangan meningkat mendekati ketimpangan nasional. Hal ini juga ditunjukkan oleh tingkat konsumsi dari 5 persen penduduk terkaya hampir mendekati dua kali lipat 40 persen penduduk termiskin di Indonesia<sup>2</sup>.

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu proses penting yang menentukan tercapainya tujuan pembangunan desa. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa masih belum

<sup>1</sup> Sumber : Buku Pintar Dana Desa 2017

<sup>2</sup> Dipaparkan oleh Nila Warda pada tanggal 31 Juli 2019 dalam kegiatan FGD Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia

efektif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat kendala penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam “Buku Pintar Dana Desa” diantaranya: (1) penggunaan di luar bidang prioritas, (2) pengeluaran tidak didukung bukti, (3) pekerjaan oleh pihak ketiga, (4) pajak tidak sesuai ketentuan, (5) desa belum mengenal mekanisme uang persediaan dan (6) belanja di luar anggaran. Kendala-kendala tersebut terjadi disebabkan oleh sebagian besar sumber daya manusia dalam hal ini yaitu perangkat desa yang mengelola dana belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut (Meutia dan Liliana 2017). Sama halnya dengan studi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Thomas (2013) memberikan hasil bahwa kapasitas aparat desa dan rendahnya intensitas koordinasi mengenai pengelolaan ADD antara pemerintah desa dan pemerintah pusat merupakan hambatan dalam proses pengelolaan ADD di desa lokasi penelitiannya yaitu Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM di desa, selain dengan melakukan bimbingan teknis, pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa sebagai dasar penugasan kepada seseorang yang ditunjuk dan memenuhi kriteria untuk mendampingi desa. Namun, pada pelaksanaannya di beberapa desa di Jawa Timur, tenaga pendamping desa justru menjadi beban bagi desa karena tidak memiliki kemampuan dan keahlian terkait pengelolaan Dana Desa (Triani dan Handayani 2018).

Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya bersifat administratif yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya masyarakat (SDM) di desa, melainkan juga kendala yang bersifat struktural berupa intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peranannya dalam mengatur pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan ruang partisipasi bagi masyarakat semakin sempit. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya peraturan pemerintah yang telah memberikan arahan mengenai pembentukan tim khusus dalam pengelolaan keuangan desa sejak dari tahap perencanaan berupa kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Proses ini didominasi oleh aparatur pemerintah desa dan elit lokal saja sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah. Sjaf (2019a) juga menyampaikan bahwa berkas administrasi yang harus segera disiapkan untuk penyaluran dana menyebabkan RPJM Desa dan RKP Desa disusun oleh segelintir orang saja, tidak partisipatif bahkan menggunakan jasa konsultan yang tidak mengetahui harapan dan kebutuhan warga desa sebenarnya. Selain itu, pergeseran pola penyaluran dana dari pemerintah pusat ke desa yang tadinya bertahap melalui pemerintah daerah berubah menjadi langsung ditransfer ke pemerintah desa menyebabkan hanya aktor-aktor berkepentingan saja yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan desa. Padahal, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang lebih berarti bagi masyarakat dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan desa.

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat bahwa pada tahun 2016-2017 terdapat sekitar 110 kasus penyelewengan anggaran desa yang melibatkan 107 kepala desa, 30 aparatur pemerintah desa dan 2 istri kepala desa. Hal ini salah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

satunya disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap perencanaan dan pengawasan dana desa serta akses masyarakat terhadap informasi yang dibatasi.<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kajiannya terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengawasan yang rendah dan saluran pengaduan masyarakat yang tidak optimal.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil studinya, Tumbel (2017) juga menyatakan bahwa penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang sedikit melibatkan masyarakat berdampak pada kecilnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa. Pelibatan sedikit masyarakat memungkinkan pengelolaan keuangan desa hanya didominasi pihak-pihak tertentu saja. Hal ini juga diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan ketimpangan yang masih tinggi khususnya di pedesaan sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Pihak-pihak tertentu yang selanjutnya disebut aktor tentu memiliki berperan dalam pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya mempengaruhi ruang partisipasi masyarakat dan tingkat kebermanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat.

Bourdieu menyatakan bahwa aktor menempati suatu lingkungan yang akan mempersiapkan strategi yang dapat digunakan untuk kedudukan tertentu bagi aktor tersebut. Lingkungan atau arena ini dianggap oleh Bourdieu dan Wacquant (1992) sebagai arena pertarungan. Lingkungan atau arena menjadi tempat dimana aktor bertindak berdasarkan dialektika struktur yang objektif dan keagenan serta fenomena subjektif (Ritzer dan Goodman 2007). Fenomena subjektif yang dimaksud dapat berupa pengetahuan, pengalaman, latar belakang yang kemudian membentuk tindakan aktor. Oleh karena itu, aktor dengan latar belakang, pengalaman dan motivasi diri yang berbeda akan memiliki tindakan yang berbeda juga. Berdasarkan hasil studinya terhadap masyarakat multietnik, Bumulo et al. (2018) menyebutkan bahwa setiap etnik memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai lahan pertanian. Perbedaan pemaknaan ini menentukan kepentingan lahan bagi setiap etnik yang akan mendorong untuk menguasai lahan pertanian tersebut. Sjaif (2017) dalam tulisannya mengenai politik etnik di Makassar juga menyebutkan bahwa relasi antar etnis ditentukan oleh sejarah etnisitas, struktur demografi etnik dan dinamika politik etnik lokal berbasis etnik. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada struktur politik dan ekonomi dalam kerangka politik etnik. Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di dua desa dengan karakteristik yang berbeda. Desa Purwabakti memiliki ciri-ciri yang mendekati karakteristik tipe desa 'desa' (masyarakat tertutup) karena lokasinya yang jauh dari pusat kota sehingga lebih sedikit berinteraksi dengan pihak luar desa. Sedangkan, Desa Sukadamai memiliki ciri-ciri yang mendekati karakteristik tipe desa 'desa-kota' (masyarakat terbuka) karena lokasinya yang mendekati wilayah kota dan perguruan tinggi sehingga masyarakatnya lebih sering berinteraksi dengan pihak luar desa yang cenderung heterogen. Perbedaan ini tentu akan memengaruhi pengalaman aktor-aktor yang berada di kedua desa dan pada akhirnya berdampak pada tindakan sosial yang dilakukan aktor.

<sup>3</sup> Siaran pers hasil kajian ICW. Sumber: <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

<sup>4</sup> Laporan kajian pengelolaan ADD dan DD. Sumber: [https://acch.kpk.go.id > component > bdthemes\\_shortcode](https://acch.kpk.go.id/component/bdthemes_shortcode)

Dalam tulisan ini, pengelolaan keuangan desa merupakan arena dimaksud yang menjadi arena pertarungan antar aktor di desa. Anheir, Gerhards dan Romo (1995) menyatakan bahwa kedudukan berbagai agen atau aktor dalam lingkungan ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif dari modal yang mereka miliki (Ritzer dan Goodman 2007). Casey (2008) menjadi orang pertama yang melakukan kuantifikasi teori Bourdieu untuk menghitung indeks pengaruh aktor berdasarkan modal yang dimiliki setiap aktor. Arena pengelolaan keuangan desa di desa dengan karakteristik berbeda kemudian menjadi ruang untuk para aktor berkontestasi dan menggunakan modal yang dimiliki untuk memperoleh manfaat yang maksimal dan mempertahankan atau melanjutkan kedudukan yang saat ini sudah dimiliki. Selain Bourdieu, Weber juga membahas mengenai aktor dalam teori tindakan sosialnya bahwa tindakan sosial individu (aktor) dapat diarahkan pada berbagai sifat berupa tindakan rasional sebagai alat pencapaian tujuan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, tindakan rasional berlandaskan nilai, tindakan sosial karena kebiasaan dan tindakan sosial yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Keempat jenis tindakan ini memiliki makna dan penyebab adanya tindakan tersebut (Maliki 2012). Begitu juga para aktor dalam pengelolaan keuangan desa pasti memiliki alasan dan makna di balik tindakan sosial yang mereka pilih. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah untuk mengatasi persoalan pengelolaan keuangan desa, tahap awal yang perlu dilakukan adalah menganalisis aktor dan tindakan sosial aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk **menganalisis aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat serta hubungannya dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di desa tipe desa dan desa tipe desa-kota.**

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada tulisan Sjaf (2014) yang membuat tipologi aktor dari berbagai sumber, maka dalam penelitian ini, aktor yang dimaksud termasuk ke dalam kelompok tipologi aktor-individu yang berarti bahwa politik identitas dipenuhi oleh tindakan individu yang terkait dengan perannya dan senantiasa mengkonstruksi identitasnya sesuai dengan peran yang dimainkan. Berdasarkan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa, maka dalam penelitian ini aktor-individu yang diidentifikasi akan dibatasi hanya pada aktor lokal desa yang memiliki pengaruh terkuat (mendominasi) dalam pengelolaan keuangan desa yaitu aktor yang berhasil mengakumulasi modal yang dimilikinya. Setelah para aktor baik secara formal maupun informal yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa teridentifikasi, hal selanjutnya yang menjadi penting untuk dilakukan adalah menganalisis **bagaimana indeks pengaruh para aktor lokal dominan serta kaitannya dengan tindakan aktor dalam pengelolaan keuangan desa? Mengapa para aktor lokal melakukan tindakan sosial tersebut?**

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang berujung pada keberhasilan program pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan para aktor lokal saja melainkan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, perlu dianalisis **bagaimana masyarakat memaknai partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa? Bagaimana tingkat**

## partisipasi menurut pandangan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut?

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang hanya didominasi aktor tertentu penting untuk diukur demi tercapainya tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, perlu dianalisis **bagaimana masyarakat memaknai efektivitas pengelolaan keuangan desa? Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa tersebut menurut pandangan masyarakat?**

Setelah tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa diketahui dan diukur, maka perlu dianalisis juga **bagaimana hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengukur dan menganalisis indeks pengaruh aktor dan tindakan para aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa
2. Menganalisis makna partisipasi menurut masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa
3. Menganalisis makna efektivitas menurut masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan desa
4. Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

#### a. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan evaluasi dan refleksi pengelolaan keuangan desa terutama mengenai tindakan dan pengaruh para aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat serta dampaknya pada efektivitas pengelolaan keuangan desa yang dirasakan oleh masyarakat dalam membangun desa dan mengentaskan kemiskinan di desa.

#### b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian mengenai analisis para aktor lokal dominan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan acuan bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai tindakan aktor lokal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

### c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan keuangan desa yang adil dan setara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



## II PENDEKATAN TEORITIS

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pendekatan teoritis yang terdiri dari uraian konsep dan penjelasan terkait mengenai pengelolaan keuangan desa, teori-teori struktur dan aktor serta teori-teori partisipasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2.1.1 Tahapan dan Prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Desa sebagai unit terkecil pemerintahan dilegitimasi keberadaannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut Pasal 1 menyebutkan bahwa.

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aspek keuangan desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dimana pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang merupakan rencana keuangan tahunan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapat asli desa (PAD), transfer dan pendapatan lain. Pendapatan desa tersebut kemudian dikeluarkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang disebut sebagai belanja desa. Belanja desa terdiri dari lima bidang, yaitu: (1) penyelenggaraan pemerintah desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa dan (5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Selain belanja desa, unsur lainnya dalam APB Desa yaitu pembiayaan desa yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Para aktor dalam pengelolaan keuangan desa di desa terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang merupakan kepala desa atau nama lain yang diberi kewenangan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa (Sekdes), kepala urusan (Kaur) dan kepala seksi (Kasi). Kaur yang dimaksud adalah Kaur tata usaha dan umum serta



Kaur perencanaan. Sedangkan Kasi yang dimaksud adalah Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan. Adapun Kaur keuangan yang dimaksud adalah kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan. Selanjutnya, PPKD ini juga disebut dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara<sup>5</sup>. Pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan berdasarkan empat asas, yaitu: (1) asas transparan, (2) asas akuntabel, (3) asas partisipatif dan (4) asas tertib dan disiplin anggaran.

Pada tahap perencanaan, sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes APB Desa) untuk kemudian hasilnya disampaikan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD). Pada tahap perencanaan ini, ruang partisipasi bagi masyarakat terdapat pada saat musyawarah desa dimana kepala desa menyampaikan Raperdes APB Desa. Unsur masyarakat dan BPD berhak memberi saran atau menolak usulan yang disampaikan oleh kepala desa. Raperdes APB Desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa, kemudian oleh Camat disampaikan kepada Bupati/ Walikota. Bupati/ Walikota kemudian mengevaluasi Raperdes APB Desa tersebut dan menyatakan perlu perbaikan atau disetujui. Raperdes APB Desa akhir yang telah disetujui kemudian akan disahkan menjadi Perdes. Ini artinya, tahap perencanaan keuangan desa telah berhasil dilalui.

Selain tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, secara administratif terdapat tahap pengajuan pelaksanaan pembayaran, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh PPKD/PTPKD. Jika merujuk pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang asas dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran, maka pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa harus memiliki mekanisme atau ruang yang memberikan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Gambaran tahapan pengelolaan keuangan desa dan pihak yang terlibat dalam dalam setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Tahapan dan rincian kegiatan pengelolaan keuangan desa di desa

No	Tahapan Kegiatan	Rincian Kegiatan	Pihak Terlibat
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Raperdes tentang APBDesa</li> <li>• Pembahasan Raperdes hingga menghasilkan kesepakatan</li> <li>• Penyampaian APBDesa kepada Bupati/ Walikota</li> <li>• Evaluasi dan revisi (jika ada) APBDesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris desa (Sekdes)</li> <li>• Kepala Desa (Kades), BPD, unsur masyarakat</li> <li>• Camat<sup>a</sup></li> <li>• Bupati/ Walikota dan Kades<sup>a</sup></li> </ul>
2	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan pelaksanaan pembayaran</li> <li>• Transfer ke Kas Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kades</li> <li>• Sekdes</li> <li>• Pelaksana kegiatan</li> </ul>

<sup>5</sup> Tertuang dalam Buku Pintar Dana Desa yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 1 Tahapan dan rincian kegiatan pengelolaan keuangan desa di desa  
(lanjutan)

No	Tahapan Kegiatan	Rincian Kegiatan	Pihak Terlibat
3	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan penerimaan dan pengeluaran</li> <li>• Pelaporan kepada Kades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendahara desa</li> <li>• Kades</li> </ul>
4	Pelaporan dan pertanggungjawab-an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian laporan pelaksanaan APBDes oleh Kades kepada Bupati/Walikota melalui Camat sesuai format laporan yang telah ditentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kades</li> <li>• Camat<sup>a</sup></li> </ul>

Sumber : Permendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (disarikan)

<sup>a</sup> : aktor yang berperan dalam pengelolaan keuangan yang bukan dalam level desa

Selain itu, pemerintah juga menetapkan “Enam Prinsip Penggunaan Dana Desa”, yaitu: (1) *Keadilan* artinya pemerintah desa mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa secara adil, (2) *Kebutuhan Prioritas* artinya penggunaan Dana Desa didahulukan untuk kebutuhan yang sifatnya penting dan mendesak serta menyangkut kepentingan mayoritas masyarakat desa, (3) *Kewenangan Desa* artinya mengutamakan kewenangan lokal berskala desa, (4) *Partisipatif* artinya melibatkan karya dan kreativitas masyarakat desa, (5) *Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa* artinya penggunaan Dana Desa dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat desa dan berbasis kearifan lokal dan (6) *Tipologi Desa* artinya menjadikan seluruh aspek geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi khas desa serta berbagai perubahannya sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa<sup>6</sup>. Berdasarkan asas dan prinsip tersebut, dapat dilihat aspek partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Kemenkeu RI dalam “Buku Pintar Dana Desa” yang disusunnya menyatakan bahwa, evaluasi pengelolaan keuangan desa dilakukan di tingkat pusat yang dimandatkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Evaluasi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dikatakan berhasil atau efektif apabila pada setiap tahapannya sesuai dengan acuan atau kerangka yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta tujuan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berhasil tercapai.

Berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat banyak terjadi pada tahap perencanaan maka tahapan perencanaan yang dianalisis berupa musyawarah

<sup>6</sup> Tertuang dalam Buku Pintar Dana Desa yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

level dusun dan level desa termasuk di dalamnya musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Adapun pada tahap pengelolaan keuangan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan makna yang dimiliki masyarakat lokal mengenai partisipasi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

### 2.1.2 Tahap Perencanaan Keuangan Desa : Musyawarah Desa dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada APB Desa yang disusun berdasarkan RKP Desa, maka partisipasi masyarakat dapat dilihat dan diukur sejak tahap perencanaan dimana tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dalam kegiatan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005, rancangan APB Desa itu sendiri dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana RKP Desa telah disepakati juga dalam musyawarah tersebut.

Musyawarah desa (musdes) atau yang disebut juga dengan pra Musrenbangdes diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa dan hasil musdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP desa dan Daftar Usulan RKP Desa. Musdes dilakukan paling lambat Bulan Juni tahun berjalan untuk mencermati ulang dokumen RPJM desa, menyepakati hasil pencermatan tersebut dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim penyusunan RKP Desa dibentuk oleh kepala desa dengan mengutamakan prinsip partisipatif dan inklusif. Tim tersebut terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan anggota meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat. Dokumen rancangan RKP Desa yang telah disetujui kepala desa akan dibahas dalam Musrenbangdes (Soegiharto dan Ariyanto 2019).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setiap bulan Januari untuk menyepakati RKP Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbangdes tersebut bersifat partisipatif dan dialogis artinya kegiatan ini harus diakhiri dengan pengambilan keputusan yang disepakati bersama dari berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam rangka pembangunan desa. Terdapat enam prinsip yang berlaku dalam Musrenbangdes bagi semua pihak yang terlibat, yaitu : (1) *Prinsip Kesetaraan* artinya seluruh peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama, (2) *Prinsip Musyawarah* artinya kesepakatan dari seluruh peserta musyawarah dari berbagai kepentingan golongan dan karakteristik dapat disepakati bersama, (3) *Prinsip anti dominasi* artinya tidak boleh ada pihak yang mendominasi dalam pelaksanaan musyawarah, semua peserta memiliki kedudukan yang seimbang, (4) *Prinsip Keberpihakan* artinya ada upaya mendorong kelompok – kelompok yang pasif agar menyuarakan pendapatnya, (5) *Prinsip anti diskriminasi* artinya tidak boleh ada marginalisasi dalam musyawarah, semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara, dan (6) *Prinsip pembangunan desa secara holistik* artinya Musrenbangdes

harus memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh (Djohani 2008).

Dari berbagai prinsip yang terdapat dalam musyawarah desa, unsur partisipasi menjadi inti pelaksanaan musyawarah tersebut. Oleh karena itu, musyawarah desa dalam rangka penyusunan dan penetapan RKP Desa dan APB Desa sebagai bagian dari tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa menjadi titik penting yang akan mempengaruhi keberhasilan tahapan selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

### 2.1.3 Teori Partisipasi dalam Menganalisis Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2008), partisipasi merupakan turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat diartikan juga sebagai peran serta, ikut serta atau proses belajar bersama untuk saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sekelompok masyarakat. Dalam konteks pembangunan, partisipasi diartikan sebagai kontribusi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan (Mustanir dan Abadi 2017). Mardikanto *et al.* (2015) menyatakan bahwa partisipasi terdiri dari empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mustanir dan Abadi 2017).

Jika pendapat para ahli tersebut diaplikasikan dalam melihat pengelolaan keuangan desa di suatu desa, maka tahapan pertama yang harus ditelaah adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang secara konkret dilaksanakan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada saat Musrenbangdes sejogyanya pemerintah desa membuka peluang bagi masyarakat untuk menyumbangkan aspirasinya dalam bentuk rencana – rencana kegiatan atau program yang dibutuhkan desa untuk kemudian dianggarkan dan dialokasikan dalam keuangan. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi dalam proses penyaluran dan penggunaan keuangan desa. Pada tahap pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi dalam kegiatan pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban keuangan desa. Terakhir, pada tahap pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi dari ukuran manfaat yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat dari terlaksananya pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Partisipasi tidak hanya dinilai dari ada tidaknya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program. Arnstein merumuskan tingkatan partisipasi berdasarkan besaran kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat delapan level partisipasi yang dirumuskan oleh Arnstein yaitu sebagai berikut (Nasdian 2014).

1. *Manipulation* (manipulasi). Pada level ini, masyarakat dilibatkan dalam badan penasehat hanya sebatas “topeng” sebagai formalitas agar masyarakat memberikan dukungan kepada penyelenggara pemerintahan. Pada level ini, partisipasi masyarakat telah diselewengkan dan digunakan

sebagai media publikasi oleh penyelenggara pemerintahan (pemegang kekuasaan).

2. *Therapy* (Terapi). Pada level ini, pemilik kekuasaan diibaratkan sebagai ahli kesehatan jiwa yang menganggap ketidakberdayaan masyarakat sebagai penyakit mental. Melibatkan masyarakat dalam suatu perencanaan diibaratkan hanya sebagai ‘penyembuh dari penyakit mental’ tersebut. Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hanya untuk ‘menghilangkan penyakitnya’ dan bukannya untuk menemukan ‘penyebab penyakit’ tersebut.
3. *Informing* (Menginformasikan). Pada level ini, penguasa memberikan informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab dan pilihan mereka. Namun seringkali pemberian informasi tersebut seringkali bersifat searah sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan umpan balik dan dan melakukan negosiasi. Terutama jika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Biasanya, komunikasi satu arah ini menggunakan media pemberitahuan, pamflet dan poster.
4. *Consultation* (Konsultasi). Pada level ini, penguasa meminta pendapat masyarakat namun tidak ada jaminan bahwa pendapat masyarakat akan dipertimbangkan. Metode yang biasanya digunakan dalam tingkat ini adalah jajak pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah partisipasi semu atau palsu.
5. *Placation* (Menenangkan). Pada level *placation*, masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun tidak memiliki jaminan bahwa pengaruh masyarakat tersebut akan dipertimbangkan. Masyarakat memang diperkenankan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana akan tetapi pemilik kekuasaan yang berwenang untuk menentukan.
6. *Partnership* (Kemitraan). Pada level kemitraan ini, kekuasaan antara pemilik kekuasaan dan masyarakat disalurkan melalui negosiasi. Mereka bersepakat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bersama-sama. Aturan ditentukan melalui mekanisme *take and give* dengan harapan tidak ada perubahan secara sepihak. Kemitraan dapat berjalan efektif bila masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang tinggi berupa kekuasaan yang terorganisir, pemimpin bertanggung jawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya, serta adanya sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. Posisi masyarakat yang tinggi akan mampu memengaruhi kebijakan yang ada.
7. *Delegated Power* (kekuasaan didelegasikan). Negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dapat mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada level ini, masyarakat memiliki ruang dengan porsi yang lebih besar sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

menjamin akuntabilitas program tersebut. Pemegang kekuasaan melakukan proses tawar menawar untuk memperoleh kesepakatan.

8. *Citizen Control* (kontrol warga negara). Pada level ini, masyarakat sudah memiliki hubungan langsung dengan sumber dana dan informasi sehingga dapat memperoleh bantuan tanpa pihak ketiga. Hal ini diperoleh melalui harapan masyarakat agar tersedianya jaminan kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan, tanggung jawab penuh terhadap kebijakan serta kewenangan untuk mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga yang akan mengadakan perubahan.

Berdasarkan kedelapan level partisipasi tersebut, Arnstein mengelompokkan dalam tiga level yaitu, manipulasi dan terapi termasuk ke dalam level '*Non-Partisipasi*'; informasi, konsultasi, plaction termasuk ke dalam level '*Tokenisme*'; dan kemitraan, delegasi kewenangan dan kontrol warga negara termasuk ke dalam '*Citizen Power*' (Nasdian 2014). Fadli *et al.* (2013) menganalisis partisipasi dalam pemerintahan desa dengan menyebutkan bahwa level Non Partisipasi ditandai oleh tidak adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Level Tokenisme ditandai dengan masyarakat yang didengarkan dan diperkenankan untuk berpendapat namun tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh–sungguh oleh penentu kebijakan pemerintahan desa. Sedangkan level *Citizen Power* ditandai oleh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan. Tingkat partisipasi menurut Arnstein tersebut merupakan gambaran awal mengenai konsep partisipasi untuk peneliti melakukan identifikasi makna partisipasi menurut masyarakat sehingga partisipasi menurut Arnstein tersebut tidak digunakan sebagai alat analisis peneliti. Adapun indikator–indikator kualitatif dari partisipasi meliputi Ife dan Tesoriero (2008) :

1. Sebuah kapasitas masyarakat yang muncul untuk mengorganisasikan aksi
2. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang semakin kuat
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hal–hal terkait
4. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan
5. Peningkatan kemampuan masyarakat yang berpartisipasi untuk menindaklanjuti dari keputusan menjadi aksi
6. Meningkatnya jangkauan masyarakat yang berpartisipasi di luar persoalan proyek
7. Munculnya pemimpin baru dari kalangan masyarakat
8. Meningkatnya jaringan antara proyek, masyarakat dan organisasi lainnya
9. Masyarakat dapat mulai mempengaruhi kebijakan

#### 2.1.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2008), efektif artinya memiliki efek, pengaruh, dampak, membawa hasil dan berguna. Mahmudi dalam Kambey (2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara luaran dengan tujuan dimana semakin besar kontribusi luaran terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Mahmudin (2019) menyimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa merupakan keberhasilan

pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan sehingga program yang didanai oleh Dana Desa mampu memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah ukuran tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh unsur masyarakat desa.

Sama seperti konsep partisipasi, konsep dan definisi efektivitas menurut beberapa sumber tersebut merupakan gambaran awal mengenai konsep efektivitas untuk peneliti melakukan identifikasi makna efektivitas menurut masyarakat sehingga efektivitas menurut beberapa sumber tersebut tidak digunakan sebagai alat analisis peneliti.

### 2.1.5 Aktor menurut Bourdieu dan Indeks Pengaruh Aktor

Teori Bourdieu termasuk ke dalam aliran post-strukturalisme yang menghilangkan pembedaan antara konstruktivis dan strukturalis serta struktur dan individu. Teori Bourdieu muncul dengan tujuan untuk mengatasi pertentangan antara objektivisme dan subjektivisme (Bourdieu dalam Ritzer dan Goodman 2007). Bourdieu mengatasi dualisme antara individu dengan struktur dengan memperhatikan struktur sekaligus pengalaman pribadi dari aktor yang akan memengaruhi tindakan. Terdapat dinamika aktor dalam teori Bourdieu dimana aktor dapat melakukan improvisasi secara teratur meski dilakukan tanpa sengaja (Ritzer dan Goodman 2007). Dalam teorinya, Bourdieu mengenalkan konsep habitus, arena, modal dan strategi.

Pierre Bourdieu dengan teori praktik yang dipaparkannya juga membahas mengenai tindakan sosial aktor dengan empat konsep utama dalam teorinya yaitu (Sjaf 2014) : (1) **Habitus** merupakan kecenderungan– kecenderungan tetap yang ada pada diri seseorang (aktor : individu maupun kelompok) yang menyebabkan aktor tersebut melakukan praktik sosial dalam berbagai arena. Habitus yang terdiri dari pola – pola yang telah diinternalisasikan kemudian menjadi bekal dalam merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial (Calhoun 1993; Ritzer *et al.* 2008). Habitus dibentuk oleh pengalaman hidup aktor dan dapat berubah disebabkan oleh ranah atau arena dimana aktor tersebut melakukan berbagai proses sosial. Habitus ini dapat disebut sebagai *opus operatum* (hasil praktek) dan *modus operandi* (modus praktik). Pemahaman mengenai tindakan aktor ini dapat digali berdasarkan pemaknaan *opus operatum* dan *modus operandi* sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman aktor (Sjaf 2014). (2) **Arena** merupakan wilayah yang memiliki aturan masing – masing dan bersifat dinamis dimana aktor saling bertarung untuk memperoleh posisi atau kedudukan. Hubungan antar aktor dalam arena bersifat relasional. Modal dan strategi yang dimiliki aktor menentukan posisi aktor apakah menjadi kelompok dominan atau menjadi kelompok yang termarginalkan. (3) **Modal** menurut Bourdieu dibagi ke dalam empat jenis yaitu (1) modal ekonomi yang meliputi berbagai kekayaan materi serta faktor produksi, (2) modal sosial yang merupakan jaringan sosial dengan aktor–aktor lainnya, (3) modal budaya yang merupakan kepemilikan benda–benda materil yang memiliki nilai tinggi serta kualifikasi–kualifikasi intelektual hasil sistem pendidikan. atau diturunkan melalui konsep, (4) modal simbolik yang merupakan simbol – simbol kebudayaan yang menyebabkan penguatan kedudukan aktor



dibanding aktor lainnya dan (4) **Strategi** yang digunakan untuk mempertahankan modal yang dimiliki dalam pertarungan di sebuah area. Bourdieu menjelaskan lima jenis strategi yaitu (1) strategi investasi biologis yang bertujuan untuk menjamin generasi selanjutnya memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pelestarian keturunan dan pewarisan modal bagi generasi selanjutnya, (2) strategi suksesif yang merupakan pewarisan modal ekonomi dan modal budaya bagi generasi selanjutnya, (3) strategi edukatif yaitu upaya untuk menghasilkan aktor baru yang mahir ketika diwarisi modal yang ada, (4) strategi invasi ekonomi yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan modal ekonomi yang telah dimiliki, (5) strategi investasi simbolik yang bertujuan untuk melegitimasi kehidupan sosial individu dalam lingkungan sosialnya (Sjaf 2014).

Bourdieu (2013) menyatakan bahwa aktor memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan sosial dalam arena yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman aktor. Habitus itulah yang akan membentuk dan memberikan skema kepada aktor dalam melakukan sesuatu, merespon dan memahami situasi yang dihadapi. Habitus juga dapat diartikan sebagai struktur mental yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Setiap aktor dengan posisi yang berbeda dalam kehidupan sosial akan memiliki habitus yang berbeda juga. Habitus dapat berupa struktur yang menstruktur kehidupan sosial, dapat juga berupa struktur yang distrukturasi kehidupan sosial (Ritzer dan Goodman 2007).

Bumulo *et al.* (2017) dalam tulisannya menyampaikan bahwa aktor yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda terhadap lahan sehingga semakin bernilainya suatu lahan bagi aktor, maka akan semakin mendorong aktor tersebut untuk melakukan tindakan dalam rangka menguasai dan memperluas lahan. Iwansyah *et al.* (2016) dari hasil penelitiannya terhadap ‘jaro’ sebagai aktor kultural menunjukkan bahwa pergantian Jaro di lokasi penelitian didasarkan pada hubungan genealogis (kerabat) berupa sumber keturunan yang sama.

Lingkungan atau arena (*field*) Bourdieu artikan sebagai tempat perjuangan antar aktor untuk memperoleh posisi tertentu. Di lingkungan inilah para aktor menggunakan berbagai macam modal untuk memenangkan posisi yang diinginkan (Ritzer dan Goodman 2007). Seorang aktor yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi modal yang lebih banyak akan memiliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan aktor lainnya (Sjaf 2019b).

Casey (2008) melakukan kuantifikasi teori Bourdieu untuk mengukur pengaruh aktor. Casey (2008) menghitung indeks pengaruh aktor yang terdiri dari tujuh modal yaitu, modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal institusi, modal simbolik, modal budaya dan modal moral. Modal manusia adalah kombinasi antara kemampuan, keterampilan dan pendidikan sesuai bidang atau di luang bidang aktor. Modal institusi adalah dukungan, ideologi dan pengaruh institusi terhadap aktor. Modal sosial adalah grup kolektif, jaringan dan reputasi yang dimiliki aktor. Modal simbolik adalah kepemilikan simbol sosial seperti gelar dan keistimewaan aktor. Modal ekonomi adalah kepemilikan material dan finansial atau kekayaan aktor. Modal budaya adalah kepemilikan aktor atas benda, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan yang khas. Modal moral adalah pendapat publik terhadap aktor mengenai kejelasan tujuan dan kebermanfaatannya (Sjaf 2019b).



## 2.1.6 Teori Tindakan Sosial Weber dalam Menganalisis Tindakan Aktor Lokal Dominan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Teori Weber muncul dalam kelompok teori sosiologi klasik yang memusatkan perhatian pada gagasan dan pengaruhnya terdapat berbagai bidang kehidupan sosial, terutama ekonomi. Tidak seperti Marx yang menjadikan ekonomi sebagai determinan, Weber berpendapat bahwa stratifikasi sosial juga dapat didasarkan pada status dan kekuasaan. Oleh karena itu, teori yang sangat terkenal dari Weber adalah mengenai teori rasionalisasi yang berisi upaya-upaya menemukan cara yang rasional untuk dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien (Ritzer dan Goodman 2007). Birokrasi dianggap oleh Weber sebagai bentuk klasik dari rasionalisasi yang terdiri dari otoritas tradisional, karismatik dan otoritas legal rasional.

Hasil rasionalisasi yang dilakukan oleh individu akan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Max Weber sebagai salah satu pencetus teori besar tindakan sosial dan menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya mengungkapkan bahwa Sosiologi merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami dan memaknai setiap tindakan sosial serta menjelaskan sebab adanya tindakan sosial tersebut (Maliki 2012). Weber mengartikan tindakan sosial merupakan tindakan individu yang saling berhubungan dengan individu lain dan memiliki makna subyektif yang didorong bukan hanya oleh kepentingan material melainkan juga kepentingan ideal (Cosser 1977). Weber juga membedakan tindakan sosial berdasarkan sifatnya, yaitu: (1) tindakan sosial yang sifatnya rasional dalam pencapaian tujuan artinya banyak melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada akal pikiran, (2) tindakan sosial yang bersifat rasional dalam memaknai nilai, dimana seseorang melakukan tindakan dengan penuh keyakinan tanpa memikirkan sebab akibat atau dampaknya, (3) tindakan tradisional yaitu tindakan sosial yang muncul karena sudah menjadi kebiasaan dan (4) tindakan afektif yaitu tindakan sosial yang muncul berdasarkan perasaan atau emosi (Cosser 1977).

Pertama, tindakan sosial yang bersifat rasional kemudian disebut dengan rasionalitas instrumental dimana terdapat harapan terhadap objek di luar dirinya sebagai kondisi atau alat untuk mencapai tujuan rasional yang telah ditetapkan. Tindakan rasional instrumental ini selalu menggunakan pertimbangan dan kesadaran yang berhubungan dengan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaian terhadap alat yang akan dipilih meliputi pengumpulan informasi mengenai dukungan dan hambatan yang ada di lingkungan dalam pencapaian tujuannya. Selain itu, individu tersebut juga memperkirakan konsekuensi dari pilihan yang dipilih dan alternatif tindakan lainnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas (Maliki 2012).

Kedua, tindakan rasional yang didasarkan pada keyakinan nilai dari etika, estetika, agama dan bentuk-bentuk lainnya yang berasal dari nilai. Seperti keyakinan dan komitmen terhadap tatanan nilai, kebenaran, keindahan, keadilan dan keyakinan terhadap Tuhan. Tindakan ini tidak relevan dengan pertimbangan mengenai efisiensi karena memiliki nilai absolut yang diyakininya (Maliki 2012).

Secara garis besar, tindakan rasional individu dibedakan menjadi dua jenis rasionalitas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di luar itu, tindakan sosial individu dapat bersifat tradisional yang merupakan kebiasaan atau tindakan afektif yang didominasi oleh emosi atau perasaan (Maliki 2012). Jones mengoperasionalkan

keempat tipe tindakan sosial menurut Weber dengan ungkapan berikut: (1) Tindakan tradisional ditandai dengan keyakinan “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”, (2) Tindakan afektif ditandai dengan keyakinan “Apa boleh buat saya lakukan”, (3) Tindakan rasionalitas instrumental ditandai dengan keyakinan “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini” dan (4) tindakan rasionalitas nilai ditandai dengan keyakinan “yang saya tahu, hanya melakukan ini” (Muhlis dan Norkholis 2016).

Muhlis dan Norkholis (2016) dari hasil analisisnya terhadap tradisi pembacaan Kitab Mukhtashar Al Bukhari di Pondok Pesantren At- Taqwa Yogyakarta dapat dijelaskan dengan teori tindakan sosial Weber, yaitu : (1) sebagai tindakan tradisional karena pembacaan kitab tersebut bertujuan untuk melestarikan tradisi yang telah turun temurun dilakukan, (2) sebagai tindakan afektif dimana pembacaan kitab tersebut menunjukkan bahwa para pelaku memiliki ikatan emosional terhadap para tokoh (salafu ash-shalih) dan terhadap waktu pelaksanaannya yaitu Bulan Rajab, (3) sebagai tindakan rasionalitas instrumental karena pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan sumber daya untuk melaksanakan tradisi tersebut dan (4) sebagai tindakan rasionalitas nilai karena para pelaku ingin mendapatkan barokah dan manfaat dengan cara melanjutkan pelaksanaan tradisi para tokoh sebelumnya.

#### 2.1.7 Kekuasaan Para Aktor dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam sudut pandang sosiologis, kekuasaan tidak dipandang sebagai suatu hal yang baik atau buruk melainkan kekuasaan dianggap sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat yang baik buruknya ditentukan oleh pencapaian tujuan dan penilaian dari masyarakat (Soekanto 2003). Gerth dan Mills (1946) dalam bukunya menuliskan bahwa kekuasaan menurut Max Weber adalah kesempatan individu atau sekelompok individu untuk membuat orang lain sadar akan keinginannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan perlawanan dari kelompok tertentu (Soekanto 2003). Meskipun kekuasaan terdapat di berbagai tempat, Soekanto (2003) menyatakan bahwa pada umumnya kekuasaan tertinggi dimiliki oleh suatu organisasi yang dinamakan negara dimana di dalamnya terdapat segolongan kecil masyarakat yang menjalankan kedaulatan (*sovereign*). Golongan kecil yang disebut sebagai *the ruling class* ini tentu akan tetap berkuasa dengan adanya dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu, golongan yang berkuasa tersebut akan melakukan upaya-upaya agar masyarakat selalu memberikan dukungan terhadap kekuasaannya yang diwujudkan dengan nilai dan norma (Soekanto 2003). Berdasarkan definisi kekuasaan tersebut, kekuasaan dapat menghasilkan hubungan yang simetris maupun asimetris. Hubungan simetris dapat berupa hubungan persahabatan, hubungan informal sehari-hari, hubungan yang bersifat ambivalen dan pertentangan antar orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Sedangkan hubungan asimetris dapat berupa popularitas, peniruan, mengikuti perintah, tunduk pada pemimpin formal maupun informal, tunduk pada seorang ahli dan pertentangan antar orang yang tidak sejajar hubungannya (Soekanto 2003).

Soekanto (2003) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa cara dalam mempertahankan kekuasaan, yaitu:

1. Menghilangkan peraturan-peraturan lama terutama dalam bidang politik yang akan mengancam kedudukan penguasa untuk kemudian diganti dengan peraturan baru yang menguntungkan bagi penguasa.
2. Mengadakan sistem kepercayaan salah satunya agama dan ideologi yang dapat memperkuat kedudukan penguasa beserta kelompoknya.
3. Melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik.
4. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal

Weber menyatakan bahwa terdapat tiga tipe sumber legitimasi dalam kekuasaan yaitu sumber tradisi, kharisma dan sumber instrumen rasional. Pertama, kekuasaan yang bersumber dari tradisi atau disebut otoritas tradisional merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan keyakinan terhadap tradisi atau kebiasaan lama. Kedua, kekuasaan yang bersumber dari kharisma atau otoritas kharismatik merupakan kekuasaan yang terkait pada kesetiaan terhadap orang-orang yang memiliki sifat dan kepribadian yang luar biasa. Sedangkan kekuasaan yang bersumber dari instrumen rasional atau otoritas *legal rational* adalah kekuasaan yang terkait dengan kewibawaan yang diperoleh dari aturan yang dibuat untuk kemudian diberikan kepada pemangku jabatan (Maliki 2012).

#### 2.1.8 Sinergi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai program yang berasal dari perusahaan dipandang berbeda dari berbagai pihak. Dari sudut pandang pemerintah, CSR sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam membiayai pembangunan daerah. Dari sudut pandang politik, CSR merupakan upaya perusahaan untuk mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat atas kehadiran perusahaan. Dari sudut pandang masyarakat, CSR merupakan hak warga sekitar untuk memperoleh manfaat dari kehadiran perusahaan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, program CSR merupakan proses internalisasi faktor-faktor eksternal yang merujuk pada *triple bottom line* (3P) yaitu *people*, *planet* dan *profit* (Nasdian 2014).

Orientasi pembangunan yang harus dimiliki saat ini adalah orientasi pembangunan berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaan CSR harus memiliki beberapa kondisi sebagai berikut : (1) perusahaan harus sehat dan tumbuh serta pendanaan berbasis *cost of production*, (2) kebijakan yang dibuat merupakan komitmen bersama dari berbagai unsur yang ada sehingga harus terbuka dialog antar *stakeholders*, (3) *outcomes dan result* CSR yang harus terukur, (4) perusahaan harus memiliki sistem manajemen untuk dapat mencapai tujuan dan (5) memasukkan program CSR dalam bisnis inti dan proses organisasi (Nasdian 2014). Dari kelima kondisi tersebut, poin kedua menjadi landasan diperlukannya dialog antar pihak salah satunya unsur masyarakat agar pembangunan yang dilakukan oleh CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian Kolopaking *et al.* (2019) menunjukkan bahwa program CSR dapat menjadi solusi Dana Desa yang kurang dalam pembangunan desa sehingga pemerintah daerah dan desa memperoleh bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan. Sinergi yang dilakukan antara desa dan perusahaan dilakukan melalui perumusan acuan program bersama yang akan menjadi acuan Rencana Kegiatan tahunan CSR dan RKP Desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengelolaan keuangan desa yang bersinergi dengan CSR untuk kemudian dibandingkan antara desa binaan CSR dengan tipe ‘desa-kota’ dan desa binaan CSR dengan desa tipe ‘desa’.

### 2.1.9 Desa Tipe ‘Desa’ dan Desa Tipe ‘Desa-Kota’

Pengelompokan desa dengan karakteristik tipe ‘desa’ dan tipe ‘desa-kota’ dapat dilakukan dengan banyak cara dan merujuk pada berbagai pendapat para ahli. Lanjouw *et al.* (2001) berpendapat bahwa desa dengan karakteristik desa *semi-urban* atau tipe ‘desa-kota’ adalah desa yang letaknya berjarak kurang dari 20 km dari batas kota. Sedangkan, desa *rural* atau tipe ‘desa’ merupakan desa yang berjarak lebih dari 20 km dari batas kota.

Karl Popper menjelaskan perbedaan antara masyarakat tertutup dan masyarakat terbuka. Masyarakat tertutup diartikan dengan masyarakat yang masih kental aka dunia magis, kesukuan dan cenderung bersifat kolektivistis. Masyarakat tertutup pada umumnya masih diatur oleh hal-hal yang bersifat tabu atau moralitas sehingga kehidupan sosialnya masih didominasi oleh tradisi. Sedangkan masyarakat terbuka adalah masyarakat dimana individu memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan pribadi, lebih individualistis dan bertindak secara rasional atau dengan suatu alasan (Jordaan 2017). Individualistis bukan berarti egois atau tidak memikirkan orang lain. Kolektivistis pun bukan berarti tidak egois. Individualistis dan kolektivistis ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan individu untuk ‘berdiri’ sendiri berdasarkan keputusan sendiri tanpa dominasi tradisi dan aturan lainnya.

Ferdinand Tonnies juga mengenalkan konsep *gemeinschaft* dan *gesellschaft* ketika membahas masyarakat. *Gemeinschaft* biasanya ditemui pada masyarakat tipe ‘desa’ yang mata pencaharian utamanya adalah petani dan sistem kekeluargaannya masih erat serta cenderung homogen. *Gesellschaft* biasanya ditemui pada masyarakat *urban* yang mulai berorientasi ke industri serta sistem kekeluargaan yang mulai melemah dan mengutamakan prinsip efisiensi (Nasdian 2014).

Berdasarkan perbedaan tersebut, Desa Purwabakti memiliki ciri-ciri yang mendekati karakteristik masyarakat tipe ‘desa’ (masyarakat tertutup) karena lokasinya yang jauh dari pusat kota dan memiliki tingkat mobilitas yang lebih rendah sehingga lebih sedikit berinteraksi dengan pihak luar desa. Sedangkan, Desa Sukadamai memiliki ciri-ciri yang mendekati masyarakat tipe ‘desa-kota’ karena lokasinya yang mendekati wilayah kota dan perguruan tinggi dan memiliki tingkat mobilitas yang lebih tinggi sehingga masyarakatnya lebih sering berinteraksi dengan pihak luar desa yang cenderung heterogen.

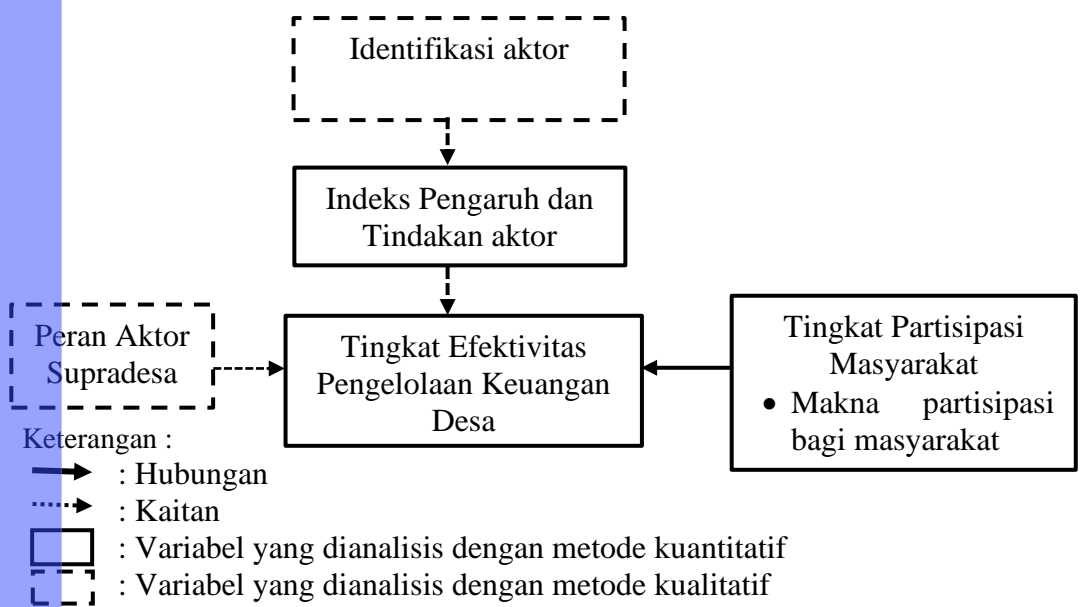
## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan desa-kota dan mempercepat pembangunan desa ternyata masih belum memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya intervensi pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang menyediakan ruang bagi elit lokal (yang selanjutnya disebut aktor) untuk mendominasi sehingga pengelolaan dan penggunaan keuangan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Rompas *et al.* (2017) menyebutkan bahwa meskipun ruang partisipasi bagi masyarakat telah tersedia berupa Musrenbangdes, usulan masyarakat seringkali kalah dengan agenda institusi dan elit lokal yang memiliki



kepentingan sendiri. Hal tersebut berujung pada politisasi anggaran yang dapat terjadi apabila perencanaan anggaran tidak melalui proses yang partisipatif. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa akan menyebabkan rendahnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Tumbel 2017).

Selain persoalan struktur, hasil penelitian Rostuti (2018) menyebutkan bahwa biaya perencanaan yang minim menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena kebutuhan masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik. Dalam menjawab persoalan tersebut, hasil penelitian Kolopaking *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi dengan *corporate social responsibility* (CSR) secara partisipatif dan inklusif dapat menjadi solusi Dana Desa yang kurang dalam melakukan pembangunan desa. Berdasarkan hasil-hasil studi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan antara keberhasilan pengelolaan keuangan desa dengan peran para aktor dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

Pemikiran Pierre Bourdieu mengenai kepemilikan modal dan Max Weber mengenai tindakan sosial dapat digunakan untuk menganalisis peran aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Weber mengartikan tindakan sosial merupakan tindakan individu yang saling berhubungan dengan individu lain dan memiliki makna subyektif yang didorong bukan hanya oleh kepentingan material melainkan juga kepentingan ideal (Coser 1977). Muhlis dan Nurkholis (2016) menggunakan konsep pemikiran tersebut dalam menganalisis tindakan para santri dalam tradisi pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari. Dalam hal ini, peneliti juga mengasumsikan bahwa setiap aktor yang berperan memiliki tindakan-tindakan yang bermakna secara subyektif dan didorong oleh hal-hal tertentu. Oleh karena itu, dalam menganalisis tindakan aktor, peneliti menggunakan pemikiran dari Max Weber. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan, yaitu:

- (1) mengukur dan menganalisis indeks pengaruh aktor dan tindakan para aktor lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

dalam pengelolaan keuangan desa, (2) menganalisis makna partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, (3) menganalisis makna efektivitas dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai keberhasilan program pembangunan desa pada desa tipe ‘desa’ dan desa tipe ‘desa-kota’ dan (4) menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini diawali dengan identifikasi aktor untuk menemukan aktor – aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Setelah itu, para aktor tersebut diukur indeks pengaruhnya berdasarkan kepemilikan modal aktor kaitannya dengan tindakan sosial, makna dan modus dalam tindakan yang dilakukannya dalam pengelolaan keuangan desa. Peneliti juga mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan indikator partisipasi berdasarkan sudut pandang masyarakat di lokasi penelitian. Setelah ketiga analisis tersebut dilakukan di dua desa berbeda, maka selanjutnya peneliti membandingkan pengelolaan keuangan di desa pada desa tipe ‘desa’ dan desa tipe ‘desa-kota’ dan keduanya memperoleh bantuan CSR. Dalam memahami pengelolaan keuangan desa, peneliti juga akan mendalami mengenai proses yang berlangsung serta peran instansi pemerintah lainnya dalam pengelolaan keuangan di desa.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini bukan hanya sebagai dugaan sementara antar variabel melainkan merupakan pedoman kerja penelitian dalam pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Setiap aktor lokal dominan memiliki tipe tindakan sosial dan indeks pengaruh yang berbeda dalam menjalankan perannya
2. Aktor lokal dominan akan bertindak menggunakan modal dominan untuk mempertahankan posisi aktor
3. Tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa



### III PENDEKATAN LAPANGAN

#### 3.1 Paradigma dan Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *Post-Positivisme*. Paradigma ini dipilih sebagai cara pandang dan pemikiran penelitian yang menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Realitas tindakan sosial aktor, partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan keuangan desa tidak dapat sepenuhnya dipahami;
2. Hubungan antara peneliti dan tinjeli tidak dapat dipisahkan, bersifat interaktif namun tetap mengutamakan obyektivitas; dan
3. Menggunakan reliabilitas dan validitas namun membuka ruang bagi tinjeli untuk memberikan kritik (kualitatif).

Pemilihan informan dan penyusunan variabel didasarkan pada dua hal yaitu hasil penggalian data berupa makna konsep yang bersumber dari masyarakat di lokasi penelitian dan dari ilmu pengetahuan yang telah ada yang kemudian diturunkan menjadi variabel.

Tabel 2 Tujuan tahapan aktivitas konsep, metode dan teknik pengumpulan data penelitian

Tujuan	Tahapan Aktivitas	Konsep	Metode	Teknik Pengumpulan Data
Mengukur dan menganalisis indeks pengaruh aktor dan tindakan para aktor lokal dalam pengelolaan keuangan desa	1. Mengidentifikasi aktor lokal dominan	Bourdieu: modal aktor	Kuantitatif dan kualitatif	- Observasi - Diskusi terfokus - Wawancara mendalam
	2. Mengukur indeks pengaruh aktor	Bourdieu: modal aktor		- Wawancara terstruktur
	3. Menganalisis tindakan sosial para aktor lokal	Weber : Tindakan sosial		- Wawancara mendalam
Menganalisis makna partisipasi dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa	1. Mengidentifikasi konsep dan variabel partisipasi masyarakat	Konstruksi masyarakat	Kualitatif	- Diskusi terfokus - Wawancara mendalam
	2. Mengukur dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat	at yang dikuantifikasi	Kuantitatif dan kualitatif	- Wawancara terstruktur - Wawancara mendalam



Tabel 2 Tujuan tahapan aktivitas konsep, metode dan teknik pengumpulan data penelitian (*lanjutan*)

Tujuan	Tahapan Aktivitas	Konsep	Metode	Teknik Pengumpulan Data
Menganalisis makna efektivitas dan mengukur tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa	1. Mengidentifikasi konsep dan variabel efektivitas pengelolaan keuangan desa	Konstruksi masyarakat yang dikuantifikasi	Kuantitatif dan kualitatif	- Wawancara terstruktur - Wawancara mendalam
	2. Mengukur dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa			- Wawancara terstruktur - Wawancara mendalam
Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa	Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa	Konstruksi masyarakat yang dikuantifikasi	Kuantitatif dan kualitatif	- Wawancara terstruktur - Wawancara mendalam

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) baik secara berurutan maupun bersamaan dengan berbagai teknik pengumpulan data (*lihat* Tabel 2). Oleh karena itu, paradigma *Post-Positivisme* digunakan sebagai cara untuk memahami realitas dengan lebih sempurna.

### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga dan Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbanyak, jumlah desa kedua terbanyak dan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar 2019). Kedua desa tersebut dipilih berdasarkan perbedaan karakteristik desa tipe ‘desa-kota’ dan desa tipe ‘desa’ di Kabupaten Bogor. Mengacu pada Lanjouw *et al.* (2001) Desa Sukadamai termasuk ke dalam desa dengan karakteristik *semi urban* atau tipe ‘desa-kota’ karena letaknya berjarak kurang dari 20 km dari batas Kota Bogor dan merupakan Desa yang sering bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3 IPB) dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, Kecamatan Dramaga merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bogor. Sedangkan Desa Purwabakti berjarak sekitar 30 km dari batas

terluar wilayah Kota Bogor sehingga dikategorikan sebagai desa *rural* atau tipe ‘desa’.

Penelitian dilakukan sejak September 2019 hingga Oktober 2020 yang diawali oleh persiapan penelitian terdiri dari penyusunan proposal dan instrumen penelitian serta kolokium. Tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan tesis.

### 3.3 Teknik Penentuan Responden dan Informan

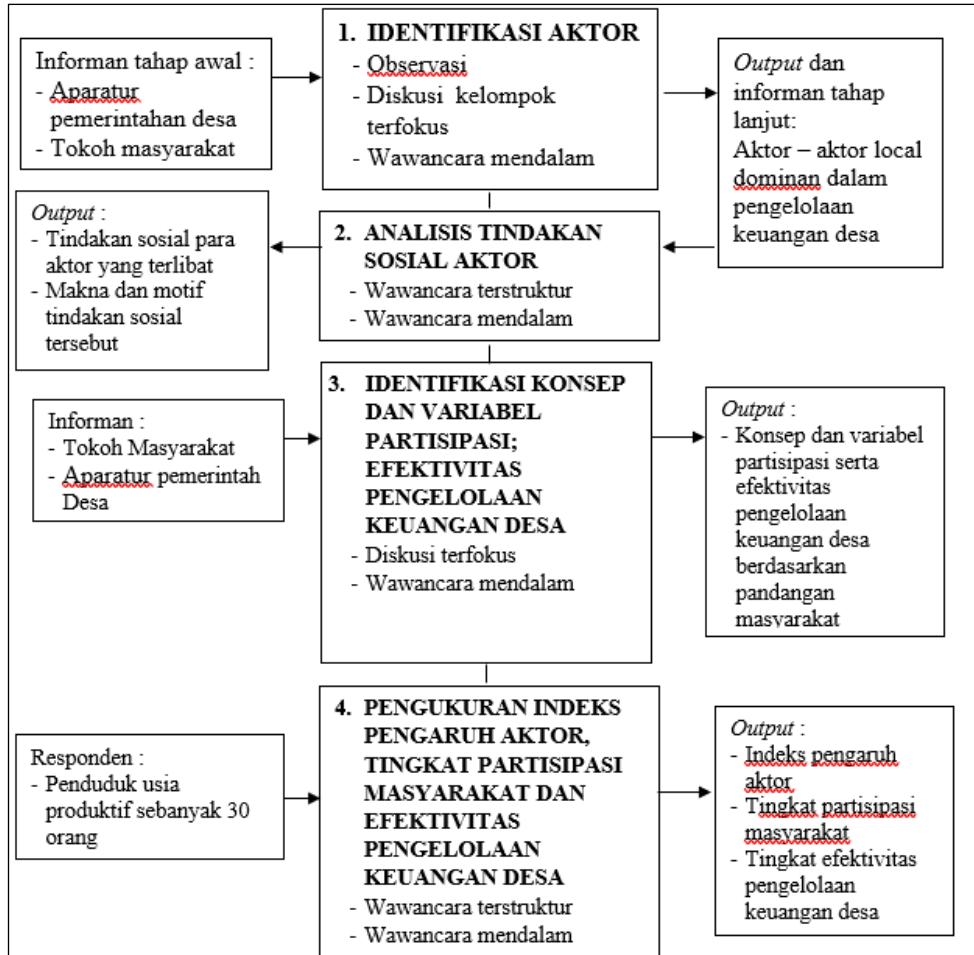
Target populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk desa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Teknik penentuan responden yang digunakan untuk kedua desa berbeda karena faktor ketersediaan kerangka *sampling*. Penentuan responden di Desa Sukadamai menggunakan teknik *simple random sampling* dikarenakan kerangka *sampling* yang tersedia bersifat homogen berdasarkan karakteristik penduduk desa usia produktif (15-64 tahun) dengan asumsi mereka yang sadar bahkan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Penentuan responden di Desa Purwabakti menggunakan teknik *accidental* yaitu menjadikan orang yang ditemui secara tidak sengaja di lokasi penelitian dan dianggap sesuai dijadikan sebagai sumber data (Sugiyono 2019). Kriteria responden yang ditentukan yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun. Teknik ini digunakan karena tidak tersedianya kerangka *sampling* di Desa Purwabakti. Sampel yang diambil sebanyak tiga puluh responden dari masing – masing desa sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak enam puluh orang. Ukuran sampel dibatasi dengan mengikuti teorema limit sentral dan berdasarkan kebutuhan minimal untuk penelitian korelasi dan komparatif (Agung 2006; Gay *et al.* 2012). Sampel ini dibutuhkan untuk mengukur indeks pengaruh aktor, tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu informan tahap awal dan informan tahap lanjut. Informan tahap awal adalah informan yang dipilih untuk memperoleh informasi mengenai aktor-aktor dominan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Informan tahap awal ini juga akan diwawancarai mengenai pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa secara lebih mendalam. Informan tahap awal ini diantaranya: pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan informan tahap lanjut dipilih untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan sosial para aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga informan yang dipilih adalah nama aktor yang muncul dari hasil analisis aktor terhadap informan tahap awal. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji dokumen – dokumen terkait yang bersumber dari desa lokasi penelitian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta instansi – instansi lain yang terkait.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap aktivitas pengumpulan data. Pada tahap pertama yaitu identifikasi aktor, peneliti menggunakan teknik observasi, diskusi terfokus dan wawancara mendalam terhadap informan yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Informan ini yang disebut sebagai informan tahap awal

sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab teknik pengambilan sampel. Informan tahap awal juga akan diwawancarai mengenai pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa secara lebih mendalam. Setelah itu, nama – nama aktor yang dihasilkan pada tahap tersebut menjadi informan tahap lanjut yang akan dianalisis tipe tindakan sosial dan peran aktor dalam pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan biografis dan sosiohistoris berupa teknik wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.



Gambar 2 Alur dan teknik pengumpulan data penelitian

Pada tahap ketiga yaitu identifikasi konsep dan variabel partisipasi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa menurut pandangan masyarakat yang akan dilakukan dengan teknik diskusi terarah dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan desa. Selanjutnya, konsep dan variabel yang diperoleh akan dikategorisasi kemudian disusun menjadi definisi operasional dan kuesioner yang akan menjadi instrumen untuk mengukur tingkat partisipasi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan teknik wawancara terstruktur terhadap responden. Selain itu, responden juga akan menilai kepemilikan modal para aktor untuk kemudian diukur indeks pengaruhnya dalam pengelolaan keuangan desa.

### 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang telah dikumpulkan akan diinput dan diolah dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2016* dan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 25. Kemudian, analisis hubungan menggunakan *rank spearman* untuk melihat hubungan antara variabel tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Pengukuran indeks pengaruh aktor dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Casey 2008).

$$\text{Indeks Pengaruh Aktor (Indeks Casey)} = Mm + Ms + Me + Mi + Msi + Mb + Mr$$

Keterangan :

Mm = Modal Manusia	Ms = Modal Sosial	Me = Modal Ekonomi
Mi = Modal Institusi	Msi = Modal Simbolik	Mb = Modal Budaya
Mr = Modal Moral		

Data kualitatif yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis berdasarkan alur analisis Miles *et al.* (2014) melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Tahap reduksi yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang berasal dari catatan – catatan lapangan, (2) tahap penyajian data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yaitu dengan membuat teks naratif berdasarkan data yang terkumpul serta mencantumkan tabel, grafik dan gambar– gambar yang mendukung sesuai dengan pembahasan, dan (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini dilakukan dengan cara membahas secara ringkas pembahasan serta hasil yang menjawab tujuan penelitian. Kemudian, kesimpulan ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

### 3.6 Definisi Operasional

Berdasarkan konsep dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun definisi operasional sebagai landasan dalam menyusun instrumen penelitian sebagai berikut.

#### 3.6.1 Tipe Tindakan Sosial Aktor

Tipe tindakan sosial aktor merupakan fokus utama penelitian yang sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Terdapat empat tipe tindakan sosial aktor yaitu rasional instrumental, rasional berbasis nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Dari setiap tipe tindakan tersebut, terdapat beberapa indikator yang akan menjadi landasan instrumen yang akan ditanyakan kepada informan. Informan akan menjawab dengan jawab Ya (skor 2) jika merasa dirinya sesuai dengan indikator yang disebutkan dan jawaban TIDAK (skor 1) jika dirinya tidak merasa sesuai dengan indikator yang disebutkan.

Tabel 3 Definisi operasional tipe tindakan sosial aktor

Konsep	Definisi	Variabel/ Indikator
Tindakan rasional instrumental	Tindakan yang sifatnya rasional dalam pencapaian tujuan artinya banyak melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada akal pikiran	Tindakan rasional instrumental dicirikan oleh : 1. Aktor selalu menggunakan pertimbangan dalam untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa 2. Aktor selalu dalam kesadaran yang berhubungan dengan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa 3. Penilaian terhadap alat yang akan dipilih dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pengumpulan informasi mengenai dukungan 4. Penilaian terhadap alat yang akan dipilih dalam pengelolaan keuangan meliputi hambatan yang ada di lingkungan dalam pencapaian tujuannya 5. Aktor selalu memperkirakan konsekuensi dari pilihan yang dipilih 6. Aktor selalu memperkirakan alternatif tindakan lainnya 7. Pertimbangan yang dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi 8. Pertimbangan yang dilakukan didasarkan pada prinsip efektivitas 9. Pertimbangan dilakukan secara logis 10. Pertimbangan dilakukan secara rasional
Tindakan rasional berbasis nilai	Tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan	Tindakan rasional berbasis nilai dicirikan oleh : 1. Didasarkan pada keyakinan nilai dari etika, estetika, agama dan bentuk – bentuk lainnya yang berasal dari nilai 2. Komitmen terhadap tatanan nilai, kebenaran, keindahan, keadilan dan keyakinan terhadap Tuhan 3. Tindakan ini tidak relevan dengan pertimbangan mengenai efisiensi 4. Tindakan bersifat rasional 5. Tindakan memperhitungkan manfaat 6. Tindakan menomorduakan prinsip hemat energi 7. Tindakan menomorduakan prinsip hemat waktu 8. Tindakan Saudara/i menomorduakan prinsip hemat biaya 9. Tindakan terlepas dari prospek keberhasilan 10. Tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh
Tindakan tradisional	Tindakan yang muncul karena sudah menjadi kebiasaan	Tindakan tradisional dicirikan oleh : 1. Tindakan yang selalu dilakukan sehingga menjadi kebiasaan 2. Dilakukan karena keturunan sebelumnya sudah melakukannya 3. Dilakukan tanpa perencanaan cara yang matang 4. Apakah tindakan Saudara/i dilakukan tanpa refleksi intelektual 5. Tindakan menomorduakan prinsip hemat waktu

Konsep	Definisi	Variabel/ Indikator
		6. Tindakan memomorduakan prinsip hemat biaya 7. Tindakan memomorduakan prinsip hemat energi 8. Tindakan berorientasi pada masa lalu 9. Tindakan dilakukan tanpa perencanaan tujuan yang matang 10. Tindakan dilandaskan oleh hukum-hukum normatif
Tindakan afektif	Tindakan sosial yang muncul berdasarkan perasaan atau emosi	Tindakan afektif dicirikan oleh : 1. Didominasi oleh perasaan atau emosi 2. Dilakukan karena orang/ tokoh yang memiliki ikatan emosi juga melakukannya 3. Tindakan bersifat spontan 4. Tindakan merupakan ekspresi dari perasaan 5. Tindakan dilakukan tanpa perencanaan matang 6. Tindakan dilakukan tanpa refleksi intelektual 7. Tindakan memomorduakan pencapaian tujuan 8. Tindakan memomorduakan prinsip hemat waktu 9. Tindakan memomorduakan prinsip hemat biaya 10. Tindakan memomorduakan prinsip hemat energi

### 3.6.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahapan pengelolaan keuangan desa menurut masyarakat dikategorikan menjadi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari setiap tahapan tersebut, terdapat beberapa rincian indikator yang akan menjadi landasan instrumen untuk ditanyakan kepada responden. Responden akan menjawab dengan jawab Ya (skor 2) jika merasa dirinya sesuai dengan indikator yang disebutkan dan jawaban TIDAK (skor 1) jika dirinya tidak merasa sesuai dengan indikator yang disebutkan.

Tabel 4 Definisi operasional tingkat partisipasi masyarakat

Tahap	Definisi/Makna	Variabel/Indikator
Perencanaan	Keikutsertaan masyarakat dalam rangka penganggaran keuangan desa (hingga selesai menyusun APBDes)	1. Memberikan usulan program ke RT/RW/Dusun/Aparat desa 2. Mengikuti muyawarah tingkat RT/RW/Dusun 3. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam muyawarah tingkat RT/RW/Dusun 4. Mengikuti muyawarah desa 6 bulan sekali 5. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam muyawarah desa 6 bulan sekali 6. Mengikuti Musrenbangdesa 7. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam Musrenbangdes

Tahap	Definisi/Makna	Variabel/Indikator
		8. Mengikuti sosialisasi sebelum kegiatan dilaksanakan 9. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam sosialisasi sebelum kegiatan dilaksanakan 10. Memahami hal yang disampaikan dalam musyawarah
Pelaksanaan	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan sejak dana dicairkan hingga dana tersebut digunakan. Bagi masyarakat. ruang partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan/program yang didanai oleh keuangan desa	1. Terlibat dalam pembangunan desa baik dibayar atau tidak (sebagai pekerja bangunan, Pelatih pembinaan, dll) 2. Memberikan sumbangan uang 3. Memberikan sumbangan materi bukan uang. Contoh bahan material 4. Memberikan sumbangan konsumsi (makanan/minuman) bagi pekerja 5. Menjadi anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 6. Melakukan permohonan pencairan ke Bendahara Desa 7. Mengelola uang desa yang dicairkan untuk membeli kebutuhan program 8. Mengetahui/mengenal warga yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di salah satu kegiatan. Siapa? 9. Mendapat informasi dari TPK mengenai proses pembangunan yang berjalan 10. Dapat melihat papan program yang berisi informasi mengenai sumber anggaran, besar anggaran, lama pelaksanaan program.
Pelaporan dan Evaluasi	Pelaporan dan Evaluasi meliputi penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran dan laporan kegiatan serta aksesibilitas masyarakat dalam melihat laporan program/kegiatan yang telah dilaksanakan	1. Ikut serta mengumpulkan nota/kwitansi pengeluaran selama program/kegiatan 2. Ikut serta menyusun laporan kegiatan/keuangan 3. Dapat melihat prasasti kegiatan setelah kegiatan selesai 4. Dapat melihat laporan keuangan tahunan 5. Memahami laporan keuangan tahunan 6. Dapat melihat poster/banner APB Desa 7. Memahami isi banner/poster APB Desa 8. Dapat memberikan saran terhadap laporan keuangan/kegiatan tahunan desa 9. Dapat memberikan kritik terhadap laporan keuangan/kegiatan tahunan desa 10. Mendapat tanggapan yang baik dari aparatur pemerintahan desa

Terdapat dua makna partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat. Sebagian besar informan



tahap awal menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang masuk ke rekening desa. Makna kedua pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan pencairan, penggunaan dan pencatatan penggunaan keuangan desa. Makna kedua ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, definisi operasional yang disusun pada Tabel 4 merupakan hasil elaborasi dari makna satu dan dua.

### 3.6.3 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah ukuran tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh unsur masyarakat desa. Berdasarkan hasil identifikasi konsep dan variabel efektivitas pengelolaan keuangan desa dari sudut pandang masyarakat, dirumuskan aspek-aspek manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Aspek-aspek dari sudut pandang masyarakat tersebut dikombinasikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk menjadi landasan penyusunan kuesioner.

Tabel 5 Definisi operasional efektivitas pengelolaan keuangan desa

Aspek/ Bidang	Definisi/ Makna (Permendagri No.20/2018)	Variabel/Indikator (Berdasarkan Masyarakat)
Pelaksanaan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan;</li> <li>b. Pesehatan;</li> <li>c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. Kawasan permukiman;</li> <li>e. Kehutanan dan lingkungan hidup;</li> <li>f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;</li> <li>g. <i>Energi dan sumber daya mineral; dan</i></li> <li>h. Pariwisata;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pembangunan/perbaikan fasilitas pendidikan selama 5 tahun terakhir</li> <li>2. Masyarakat merasakan peningkatan pada aspek pendidikan selama 5 tahun terakhir (minimal 1) : sekolah gratis, bantuan sekolah, dll</li> <li>3. Terdapat pembangunan/perbaikan fasilitas kesehatan selama 5 tahun terakhir</li> <li>4. Masyarakat merasakan peningkatan pada aspek kesahatan selama 5 tahun terakhir (minimal 1) : kualitas pelayanan kesehatan, bantuan berobat, dll</li> <li>5. Terdapat pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir : jalan, jembatan</li> <li>6. Masyarakat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir (minimal 1) : akses lebih mudah, lebih aman, lebih cepat, dll</li> <li>7. Terdapat program untuk menunjang komunikasi selama 5 tahun terakhir</li> <li>8. Masyarakat merasakan kemudahan dalam berkomunikasi di desa selama 5 tahun terakhir</li> </ol>



Aspek/ Bidang	Definisi/ Makna (Permendagri No.20/2018)	Variabel/Indikator (Berdasarkan Masyarakat)
Pembinaan kemasyarakatan -an desa	a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b) Kebudayaan dan keagamaan; c) Kepemudaan dan olah raga; dan d) Kelembagaan masyarakat	9. Terdapat program untuk mendukung pariwisata desa selama 5 tahun terakhir. sebutkan: 10. Masyarakat merasakan manfaat dengan adanya dukungan terhadap pariwisata (minimal 1) selama 5 tahun terakhir: lowongan pekerjaan, peningkatan pendapatan, tempat rekreasi keluarga, dll 1. Terdapat program/kegiatan untuk ketentraman/ketertiban/keamanan masyarakat selama 5 tahun terakhir : ronda, siskamling, dll 2. Masyarakat memperoleh rasa aman/nyaman/tentram di lingkungannya selama 5 tahun terakhir 3. Terdapat program/kegiatan untuk mendukung budaya setempat selama 5 tahun terakhir: Kegiatan budaya, keolompok budaya, dll 4. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya dukungan terhadap budaya setempat selama 5 tahun terakhir (minimal 1) : penyaluran hobi, melestarikan budaya, dll 5. Terdapat program/kegiatan untuk mendukung keagamaan selama 5 tahun terakhir : kelompok agama/ pengajian, perayaan keagamaan, dll 6. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya dukungan terhadap kegiatan keagamaan selama 5 tahun terakhir :.. 7. Terdapat program/kegiatan untuk mendukung kegiatan pemuda dan olahraga selama 5 tahun terakhir 8. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya dukungan terhadap kegiatan pemuda dan olahraga selama 5 tahun terakhir 9. Terdapat program/kegiatan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat selama 5 tahun terakhir: pembentukan organisasi, bantuan terhadap organisasi yang ada, dll

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Aspek/ Bidang	Definisi/ Makna (Permendagri No.20/2018)	Variabel/Indikator (Berdasarkan Masyarakat)
<p><b>Pemberdaya-an masyarakat desa</b></p>	<p>a. Kelautan dan perikanan; b. Pertanian dan peternakan; c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa; d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. Dukungan penanaman modal; dan g. Perdagangan dan perindustrian.</p>	<p>10. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya dukungan terhadap kelembagaan masyarakat selama 5 tahun terakhir: pembentukan organisasi, bantuan terhadap</p> <p>1. Terdapat pemberdayaan/pelatihan di bidang kelautan/perikanan/pertanian/peternakan/ bidang lainnya selama 5 tahun terakhir</p> <p>2. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan selama 5 tahun terakhir. Sebutkan manfaatnya!</p> <p>3. Terdapat pelatihan bagi perempuan selama 5 tahun terakhir.</p> <p>4. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya pelatihan bagi perempuan. Sebutkan manfaatnya selama 5 tahun terakhir</p> <p>5. Terdapat pemberdayaan dalam hal perlindungan anak/keluarga selama 5 tahun terakhir</p> <p>6. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan dalam hal perlindungan anak/keluarga selama 5 tahun terakhir</p> <p>7. Terdapat program untuk mendukung koperasi/usaha kecil dan menengah selama 5 tahun terakhir</p> <p>8. Pemerintah desa memberikan bantuan modal kepada usaha masyarakat selama 5 tahun terakhir</p> <p>9. Masyarakat merasakan adanya peningkatan pendapatan karena adanya dukungan pemerintah selama 5 tahun terakhir</p> <p>10. Masyarakat merasakan adanya kemudahan lapangan pekerjaan selama 5 tahun terakhir</p>
<p><b>Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa</b></p>	<p>a. Penanggulangan bencana; b. Keadaan darurat; dan c. Keadaan mendesak.</p>	<p>1. Terdapat program penanggulangan bencana selama 5 tahun terakhir. Sebutkan</p> <p>2. Masyarakat merasakan manfaat dari program penanggulangan bencana selama 5 tahun terakhir</p>

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Aspek/ Bidang	Definisi/ Makna (Permendagri No.20/2018)	Variabel/Indikator (Berdasarkan Masyarakat)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terdapat bantuan dari pemerintah desa ketika keadaan darurat selama 5 tahun terakhir. Sebutkan</li> <li>4. Masyarakat merasakan manfaat dari bantuan dari pemerintah desa ketika keadaan darurat selama 5 tahun terakhir. Sebutkan</li> <li>5. Terdapat program/bantuan pemerintah desa ketika keadaan mendesak selama 5 tahun terakhir. Sebutkan</li> <li>6. Masyarakat merasakan manfaat dari program/bantuan pemerintah desa ketika keadaan mendesak selama 5 tahun terakhir. Sebutkan</li> <li>7. Masyarakat merasa pemerintah desa peduli pada kondisi masyarakat</li> <li>8. Masyarakat merasa pemerintah desa membantu saat kondisi sulit</li> <li>9. Masyarakat desa merasa bantuan pemerintah desa secara nyata</li> <li>10. Masyarakat desa merasa bantuan pemerintah desa tepat sasaran</li> </ol>

Responden akan memberikan penilaian dengan rentang 1 hingga 4 dimana 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya setuju dan 4 artinya sangat setuju.

#### 3.6.4 Indeks Pengaruh Aktor

Nilai indeks pengaruh setiap aktor merupakan akumulasi dari nilai ketujuh modal (modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal institusi, modal simbolik, modal budaya dan modal moral). Modal manusia adalah kombinasi antara kemampuan, keterampilan dan pendidikan sesuai bidang atau di luang bidang aktor. Modal institusi adalah dukungan, ideologi dan pengaruh institusi terhadap aktor. Modal sosial adalah grup kolektif, jaringan dan reputasi yang dimiliki aktor. Modal simbolik adalah kepemilikan simbol sosial seperti gelar dan keistimewaan aktor. Modal ekonomi adalah kepemilikan material dan finansial atau kekayaan aktor. Modal budaya adalah kepemilikan aktor atas benda, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan yang khas. Modal moral adalah pendapat publik terhadap aktor mengenai kejelasan tujuan dan kebermanfaatannya aktor (Sjaf 2019b). Setiap indikator modal akan diberi skor oleh responden dalam rentang -2 hingga +2 (Tabel 6). Skor positif dan negatif tersebut dibutuhkan untuk menggambarkan kesalingtergantungan antar modal. Skor modal aktor yang dinilai negatif oleh responden akan mengurangi skor positif aktor. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu bahwa tidak ada bentuk

modal yang murni berdiri sendiri. Setiap modal (kapital) pasti mengandung elemen dari ragam lainnya dan saling berkaitan (Casey 2008).

Tabel 6 Definisi operasional indeks pengaruh aktor (Casey 2008) *dimodifikasi*

<b>A. MODAL MANUSIA</b>	
1. Kemampuan aktor	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Pengalaman aktor di bidangnya	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Pengalaman aktor di luar bidangnya	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Tingkat pendidikan formal	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Pendidikan non formal	5) -2; -1; 0; +1; +2
<b>B. MODAL INSTITUSI</b>	
1. Dukungan materi dari institusi/lembaga	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Dukungan moril dari institusi	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Pengaruh institusi	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Ideologi/ pola pemikiran/paham institusi	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Kedudukan dalam institusi	5) -2; -1; 0; +1; +2
<b>C. MODAL SOSIAL</b>	
1. Dukungan grup secara kolektif	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Jaringan dalam desa yang dimiliki aktor	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Jaringan luar desa	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Intensitas komunikasi (Kedekatan) dengan jaringan yang dimiliki	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Reputasi aktor	5) -2; -1; 0; +1; +2
<b>D. MODAL SIMBOLIK</b>	
1. Keistimewaan yang dimiliki aktor	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Gelar yang disandang aktor	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Aktor adalah turunan dari tokoh berpengaruh	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Penghargaan yang diterima aktor	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Prestasi yang dimiliki aktor	5) -2; -1; 0; +1; +2
<b>E. MODAL EKONOMI</b>	
1. Dukungan pendanaan aktor	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Barang berharga yang dimiliki aktor	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Lahan/ tempat usaha menghasilkan yang dimiliki aktor	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Kekayaan yang lebih	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Pendapatan perbulan	5) -2; -1; 0; +1; +2
<b>F. MODAL BUDAYA</b>	
1. Gaya hidup aktor sesuai adat dan budaya	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Aktor merupakan tokoh adat yang dihormati	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Aktor menerapkan nilai budaya	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Aktor memiliki karya/seni yang dikagumi orang lain	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Aktor dapat mempengaruhi orang lain untuk menerapkan budaya	5) -2; -1; 0; +1; +2
<b>G. MODAL MORAL</b>	
1. Penilaian positif masyarakat terhadap aktor	1) -2; -1; 0; +1; +2
2. Dukungan masyarakat terhadap aktor	2) -2; -1; 0; +1; +2
3. Aktor dinilai memiliki pribadi/sifat yang baik	3) -2; -1; 0; +1; +2
4. Aktor menjadi contoh teladan masyarakat	4) -2; -1; 0; +1; +2
5. Aktor tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat	5) -2; -1; 0; +1; +2

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN RESPONDEN

### 4.1 Kondisi Geografis

Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor terletak pada koordinat  $-6.688.963$  LU/LS dan  $106.646.072$  BB/BT dengan luas wilayah desa sebesar  $1.662$  km<sup>2</sup>. Topografi desa ini termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi. Mengacu pada Lanjouw *et al.* (2001), Desa Purwabakti dikategorikan ke dalam desa tipe 'desa' karena jaraknya ke batas terluar Kota Bogor sebesar 30 km.

Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor terletak di antara  $6^{\circ}36'23$  -  $6^{\circ}38'0$  LS dan  $106^{\circ}43'32$  -  $106^{\circ}44'29$  BT dengan luas wilayah desa sebesar  $2.645$  km<sup>2</sup>. Topografi desa ini termasuk kedalam wilayah rendah berupa perbukitan dengan ketinggian berada pada 250 mdpl-437 mdpl (Arham 2019). Jarak Desa Sukadamai ke batas terluar Kota Bogor sebesar kurang dari 20 km. Mengacu pada Lanjouw *et al.* (2001), Desa Sukadamai dapat dikategorikan ke dalam desa tipe 'desa-kota'. Selain itu, Kecamatan Dramaga juga berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bogor bagian barat. Kelurahan terdekat dengan Desa Sukadamai salah satunya Kelurahan Balungbang Jaya Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

### 4.2 Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Purwabakti bermata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang yaitu sebanyak 41,46 persen dari penduduk usia produktif. Pada umumnya, mereka memiliki usaha skala kecil di rumah masing-masing seperti warung sembako, bengkel dan industri mikro lainnya. Total industri mikro di Desa Purwabakti sebanyak 38 unit. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh tani menempati urutan terbanyak kedua yaitu sebesar 14,02 persen dengan komoditas unggulan pertanian adalah padi. Sejak tahun 2018, hasil pertanian Desa Purwabakti sudah mulai dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Bhakti Kencana.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017, sebagian besar penduduk Desa Sukadamai bermatapencaharian sebagai buruh harian lepas yaitu sebesar 53,21 persen. Mata pencaharian terbanyak kedua yaitu wiraswasta di sektor perdagangan sebesar 29,02 persen. Mata pencaharian lainnya yaitu sebagai karyawan (5,50 persen), supir (2,67 persen), petani (3,96 persen), tukang bangunan (1,13 persen), pegawai negeri sipil (1,00 persen), aparatur pemerintahan desa (0,75 persen) dan sisanya tidak teridentifikasi sebanyak 2,75 persen (Arham 2019). Komoditas unggulan Desa Sukadamai diantaranya ubi jalar dan jagung. Selain itu, Desa Sukadamai juga dikenal sebagai desa penyedia pucuk daun singkong bagi banyak rumah makan padang hingga ke daerah Jawa Tengah.

### 4.3 Kondisi Sosial

Desa Purwabakti terdiri dari 5 dusun, 12 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT). Total penduduk Desa Purwabakti hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 7.337 jiwa dengan penduduk terbanyak usia 15-39 tahun yaitu sebesar

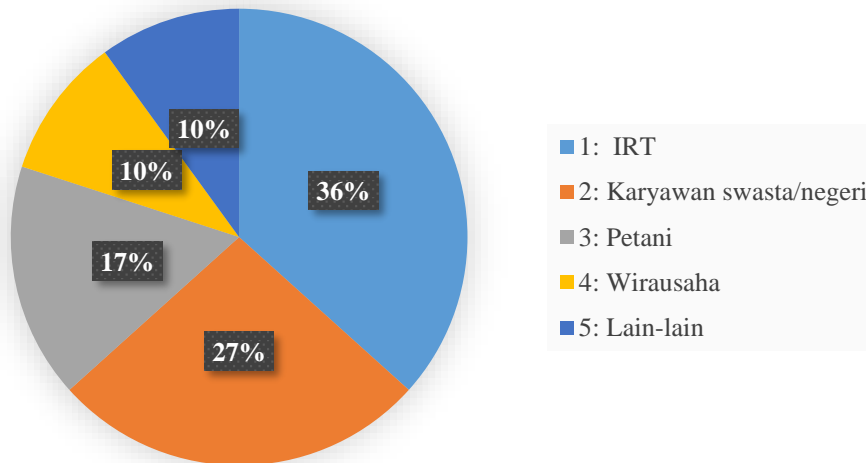
43,42 persen. Artinya, mayoritas penduduk Desa Purwabakti adalah penduduk usia produktif yang membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di desa ini berupa 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit tempat praktek bidan dan 11 unit posyandu yang beroperasi selama 2 bulan terakhir. Fasilitas pendidikan yang terdapat di desa ini yaitu 3 unit Sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) sedangkan fasilitas pendidikan setingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi tidak terdapat di Desa Purwabakti. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk desa adalah tamat SD /sederajat. Artinya, tingkat pendidikan penduduk Desa Purwabakti cenderung rendah.

Desa Sukadamai terdiri dari 3 dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2017, jumlah penduduk di Desa Sukadamai sebanyak 8.035 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok usia 10-19 tahun yaitu sebesar 20,46 persen dan diikuti oleh kelompok usia 0-9 tahun sebesar 17,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Desa Sukadamai masih cenderung tinggi. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa Sukadamai yaitu pada tingkat lulusan sekolah dasar (SD) sebesar 51,00 persen sedangkan lulusan perguruan tinggi sebesar 1,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Sukadamai masih cenderung rendah.

#### 4.4 Gambaran Umum Responden

Responden yang dipilih di Desa Purwabakti terdiri dari 11 orang perempuan dan 19 orang laki-laki dengan kisaran usia 19-65 tahun. Dari 30 responden tersebut, seluruh responden perempuan bermatapencaharian sebagai ibu rumah tangga (IRT). Sedangkan dari 19 responden laki-laki paling banyak bermatapencaharian sebagai karyawan negeri dan swasta yaitu sebesar 27 persen (Gambar 3).

Persentase Mata Pencaharian Responden



Gambar 3 Persentase responden berdasarkan mata pencaharian di Desa

Tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti mayoritas pada tingkat sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 36,67 persen kemudian diikuti oleh responden

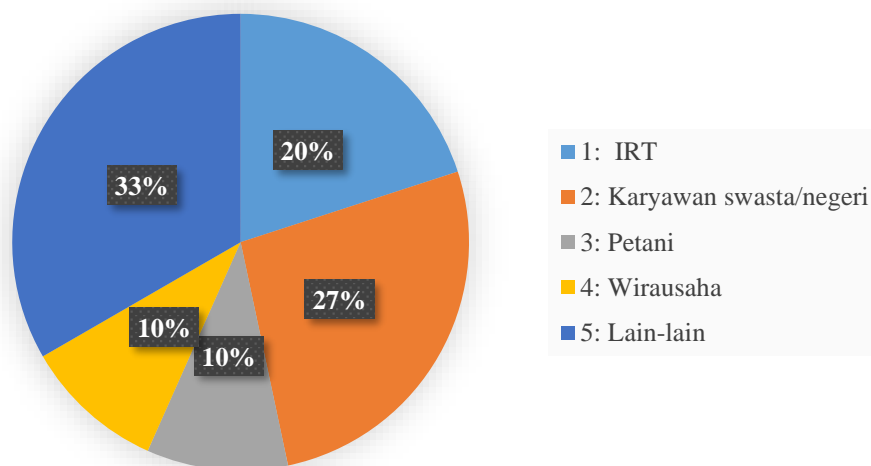
dengan status ‘tidak bersekolah atau tidak tamat SD’ sebesar 26,67 persen (Tabel 7).

Tabel 7 Tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak sekolah/Tidak tamat SD	8	26,67
2	SD	11	36,67
3	SMP	6	20,00
4	SMA	3	10,00
5	Perguruan tinggi	2	6,67
Jumlah		30	100,00

Hal ini sejalan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Purwabakti yang hanya pada tingkat SD sehingga penduduk desa harus keluar desa untuk bersekolah pada tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi.

#### Persentase Mata Pencaharian Responden



Gambar 4 Persentase responden berdasarkan mata pencaharian di Desa

Responden yang dipilih di Desa Sukadamai terdiri dari 9 orang perempuan dan 21 orang laki-laki dengan kisaran usia 28-59 tahun. Dari 30 responden tersebut, sebagian besar digolongkan ke dalam mata pencaharian ‘lain-lain’ yaitu sebesar 33 persen. Pekerjaan yang masuk ke dalam kelompok ‘lain-lain’ ini bekerja sebagai buruh sepatu di industri rumahan Desa Sukadamai. Responden dengan mata pencaharian terbanyak kedua sebagai karyawan baik negeri ataupun swasta yaitu sebesar 27 persen. Sedangkan petani dan wirausaha merupakan mata pencarian responden yang paling sedikit yaitu sebesar 10 persen (Gambar 3). Hal ini sejalan dengan sedikitnya lahan pertanian di Desa Sukadamai khususnya untuk komoditas padi. Sebagian besar penduduk desa lebih banyak bermatapencaharian sebagai buruh sepatu karena sejak tahun 1980-an desa ini sudah dikenal sebagai pusat pengerajin sepatu bayi dan produknya berhasil diekspor ke luar kota bahkan ke luar negeri.

Tabel 8 Tingkat pendidikan responden di Desa Sukadamai tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak sekolah/Tidak tamat SD	6	20,00
2	SD	12	40,00
3	SMP	5	16,67
4	SMA	6	20,00
5	Perguruan tinggi	1	3,33
	Jumlah	30	100,00

Sama halnya dengan tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti, tingkat pendidikan responden di Desa Sukadamai terbanyak terdapat pada tingkat sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 40,00 persen kemudian diikuti oleh responden dengan status 'tidak bersekolah atau tidak tamat SD' dan SMA yaitu sebesar 20,00 persen (Tabel 8).

Tingkat pendidikan responden di Desa Sukadamai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti. Hal ini dapat terjadi karena akses dari pemukiman penduduk di Desa Sukadamai menuju fasilitas pendidikan (khususnya SMA) lebih mudah dan lebih dekat dibandingkan di Desa Purwabakti.



## V PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PURWABAKTI DAN DESA SUKADAMAI

### 5.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan informasi dari sekretaris desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dari penjelasan kedua sekretaris desa tersebut juga dapat ditarik garis besar yang sama tahapan pengelolaan keuangan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evaluasi. Ilustrasi tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Ilustrasi tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai

No	Waktu*	Aktivitas	Pihak yang dilibatkan
1	Januari – Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan usulan program di tingkat RT (pengecekan program yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi). Usulan disampaikan secara tulisan (menggunakan angket) atau secara lisan</li> <li>Usulan tingkat RT disampaikan RW</li> <li>Usulan di tingkat RW disampaikan ke dusun</li> </ol>	Masyarakat lingkup RT → RW → Dusun
2	Juni 2020 dan Januari/ Februari 2021 (6 bulan sekali)	<p>BPD menyelenggarakan <b>Musyawarah Desa</b> membahas usulan mana saja yang memang belum dan akan direalisasikan, mana yang memang kebutuhan atau hanya keinginan dan mana yang akan dimasukkan ke RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa)</p> <p>Menentukan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan. Biasanya bergilir</p>	Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, seluruh ketua RT, seluruh ketua RW
3	Juli–Agustus 2020	<p>Laporan kegiatan setiap 6 bulan Januari-Juni dan Juli-Desember yang direalisasikan oleh kepala desa</p> <p>Pembentukan tim 7 atau tim 11 (7-11 orang) terdiri dari ketua (sekretaris desa), Kaur perencanaan,</p>	Tim 7 atau Tim 11

No	Waktu*	Aktivitas	Pihak yang dilibatkan
		LPM, tokoh masyarakat, wakil perempuan	
		Tim ini akan melakukan verifikasi ke lapangan menghitung detail PxTxL (volume) dan konstruksinya pembangunan fisik	
4	September 2020	Penyusunan RAB dan RKP Desa <b>Musrenbang Desa</b> : Pengesahan RKP Desa dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDes perbidang dan perwilayah	Pemdes, BPD, tokoh masyarakat
		RKP Desa yang telah disahkan menjadi landasan untuk penyusunan APB Desa	➔ <b>Pengelolaan keuangan desa murni dimulai ketika penyusunan APB Desa</b>
5	Agustus/ November/ Desember 2020	Pagu indikatif turun dari kabupaten sebagai gambaran anggaran yang akan turun di tahun depan  Tim 7/11 langsung menyusun APB Desa menyesuaikan pagu indikatif tsb dan berdasarkan pada program di RKP Desa. Selama penyusunan ini, ada pertemuan rutin.	Tim7/11  Sekretaris desa, kaur perencanaan, LPM, tokoh masyarakat, wakil perempuan
6	Paling lambat 31 Desember 2020	Kaur Perencanaan membuat draf APB des kemudian disahkan oleh Kades Pengesahan peraturan desa (Perdes) tentang APB Desa	Kepala desa
7	Februari/Maret 2021	Pagu definitif (pagu yang sebenarnya) turun sehingga ada perubahan APB Desa  APB Desa yang berubah disahkan dengan adanya Perdes tentang perubahan APB Desa. Waktunya kondisional di tahun berjalan. Hanya boleh ada satu perubahan dalam satu tahun	

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

No	Waktu*	Aktivitas	Pihak yang dilibatkan
		Jika ada kejadian khusus yang menyebabkan perubahan anggaran lagi (seperti covid) maka disahkan dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades)	
		Tim 7/11 dibubarkan ketika APB Desa selesai disahkan	

\*) Ilustrasi untuk perencanaan anggaran tahun 2021

Setelah APB Desa disahkan, tahap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK). Setiap kegiatan yang akan direalisasikan, maka akan ada TPK berbeda yang disahkan berdasarkan surat keputusan (SK) kepala desa. TPK terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari aparatur pemerintahan desa dari bidang yang sesuai kegiatan sebagai ketua TPK dan anggota yang berasal dari tokoh masyarakat, ketua RT dan ketua RW. Ketika akan memulai kegiatan pembangunan, TPK akan membuat surat permohonan pencairan (SPP) anggaran dan diajukan ke bendahara desa. Bendahara desa kemudian mengisi data secara *online* di sistem keuangan desa (Siskeudes) kemudian ditandatangani oleh kepala desa. Setelah itu, bendahara desa dengan didampingi kepala desa atau aparatur pemerintahan desa lain, mengambil uang sejumlah yang dibutuhkan dari rekening desa (*via teller* bukan ATM). Jumlah uang yang diambil dalam sekali pengambilan sebanyak 20 juta rupiah dan harus langsung didistribusikan kepada TPK dan kebutuhan lain yang mengajukan pencairan karena terdapat aturan bahwa uang dengan jumlah minimal 10 juta rupiah tidak boleh dipegang lebih dari tiga hari.

Informasi mengenai jumlah anggaran, sumber dana, durasi pelaksanaan pembangunan dan pekerja dalam setiap program pembangunan fisik selalu dapat dilihat pada papan program kegiatan. Khusus kegiatan pembangunan di Desa Sukadamai, pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah pra pelaksanaan sebagai bentuk sosialisasi pada masyarakat di wilayah yang akan dilaksanakan pembangunan. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi terkait besar anggaran, bahan, pajak, penentuan pekerja dari wilayah tersebut sesuai kebutuhan. Para pekerja diutamakan dari keluarga miskin yang ada di Data Kesejahteraan (DPKS).

Tahap pelaporan dan evaluasi ditandai oleh selesainya kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK. TPK kemudian menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari deskripsi kegiatan dan pengumpulan bukti-bukti pengeluaran. Laporan kegiatan tersebut kemudian dikumpulkan dan diverifikasi oleh sekretaris dan kepala desa. Laporan yang sudah diverifikasi kemudian diserahkan ke inspektorat kabupaten untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan selesai maka inspektorat kabupaten akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan laporan tersebut akan dipaparkan oleh kepala desa dalam musyawarah desa selama 6 bulan sekali.

## 5.2 Struktur Keuangan Desa

Rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) selalu dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan desa selama satu tahun mendatang. Dalam RAB tersebut berisi informasi mengenai bidang dan jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran atau manfaat, waktu pelaksanaan, jumlah biaya yang dibutuhkan, sumber pembiayaan, pola pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Sumber dana yang masuk ke rekening desa atau yang terdapat di desa, yaitu: (1) PAD-Pendapatan Asli Desa, (2) ADD-Alokasi Dana Desa, (3) DDS-Dana Desa, (4) PBH-Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi, (5) PBP-Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi, (6) PBK-Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten, (7) SWD-Swadaya dan (8) DLL-Dana Lain-Lain.

RKP Desa yang disusun selalu dilengkapi rencana belanja desa untuk tahun yang akan datang. Jumlah anggaran belanja desa tahun 2020 di Desa Purwabakti sebesar Rp. 2.758.243.295, sedangkan di Desa Sukadamai sebesar Rp. 3.345.393.660. Besaran anggaran ini menyesuaikan pagu indikatif yang turun dari pemerintah Kabupaten Bogor. Besar pagu indikatif berbeda setiap desa menyesuaikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kriteria desa.

Tabel 10 Persentase anggaran belanja Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sesuai bidang tahun 2020

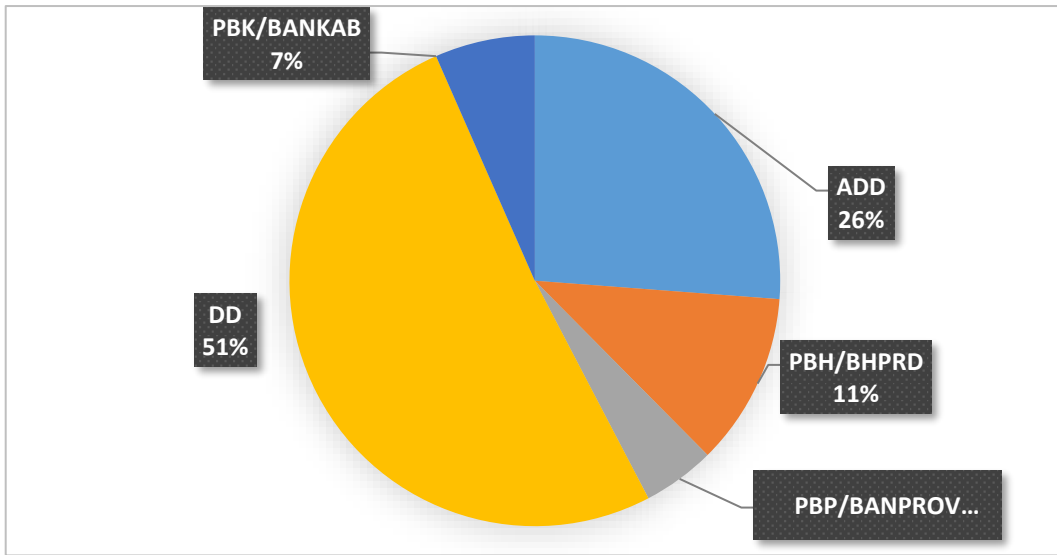
Desa	Jumlah Belanja Desa sesuai Bidang (%)			
	Pemerintahan Desa	Pembangunan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Penanggulangan Bencana
Desa Purwabakti	32,12	60,92	5,88	1,09
Desa Sukadamai	18,28	72,93	6,96	1,83

Sumber: lampiran RKP Desa tahun 2020 (*diolah*)

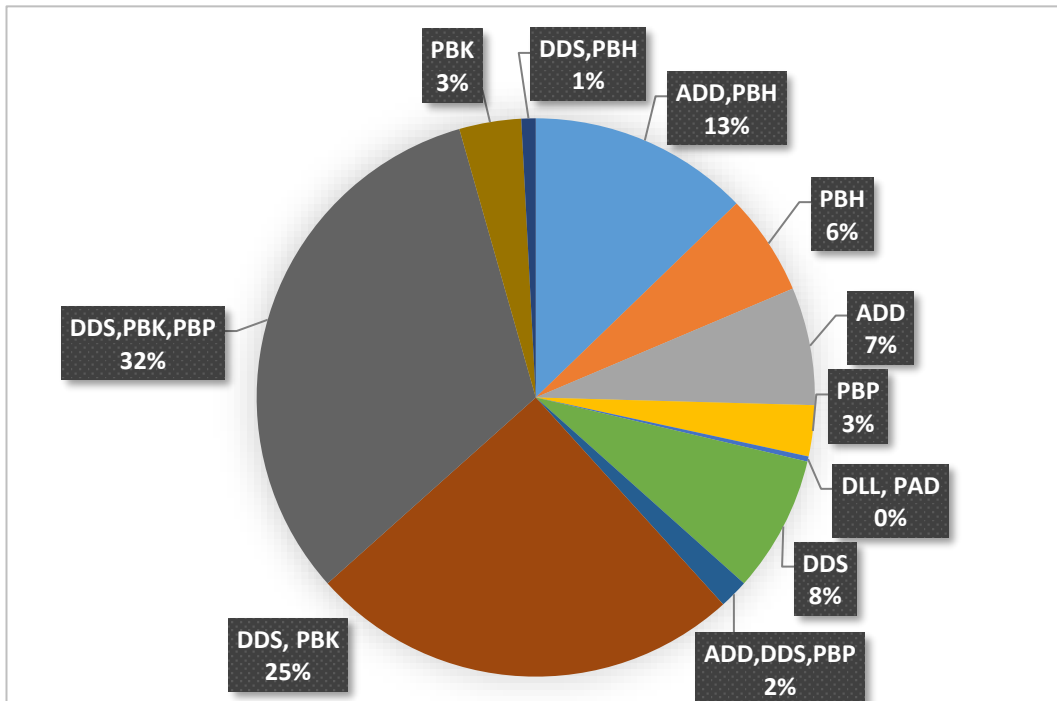
Berdasarkan RKP Desa yang diusulkan oleh kedua desa untuk tahun 2020, terdapat beberapa perbedaan struktur rencana belanja desa. Pertama, Desa Purwabakti tidak memasukkan anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Namun, ketika dikonfirmasi kembali kepada salah satu aktor, anggaran tersebut ada namun tidak dimasukkan ke dalam RKP Desa yang masih belum fix. Desa Sukadamai tidak memasukkan anggaran pemberdayaan masyarakat. Jika dilihat pada item kegiatan setiap bidang, kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Purwabakti berupa peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Sedangkan di Desa Sukadamai, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa masuk ke dalam bidang pembinaan masyarakat. Perbedaan kedua yaitu, Desa Sukadamai memiliki persentase penganggaran yang lebih besar dibandingkan Desa Purwabakti pada bidang pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana, sedangkan Desa Purwabakti memiliki presentase penganggaran yang lebih besar

pada bidang pemerintahan desa dibandingkan Desa Sukadamai. Namun, di kedua desa tersebut, persentase penganggaran tertinggi diperuntukkan bagi bidang pembangunan desa meliputi kegiatan pembangunan/rehabilitasi, pengerasan jalan dan infrastruktur desa lainnya.

Perbedaan pengalokasian anggaran di setiap desa juga memiliki kaitan dengan tindakan para aktor lokal dominan yang terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.



Gambar 5 Persentase sumber pembiayaan kegiatan Desa Purwabakti tahun 2020



Gambar 6 Persentase sumber pembiayaan kegiatan Desa Sukadamai tahun 2020

Jika melihat sumber pembiayaan kegiatan dalam RKP Desa tahun 2020, pembiayaan untuk satu item kegiatan di Desa Purwabakti bersumber dari satu jenis sumber pendapatan desa (Gambar 5). Sedangkan, di Desa Sukadamai pembiayaan untuk satu item kegiatan bersumber dari gabungan beberapa sumber pendapatan desa (Gambar 6). Selain itu, Desa Purwabakti belum memiliki pendapatan asli desa (PAD) karena badan usaha milik desa (Bumdes) baru berdiri pada tahun 2018.

### 5.3 Peran CSR Perusahaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

#### 5.3.1 Peran CSR Perusahaan dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Purwabakti

Desa Purwabakti berada di wilayah ring satu dari dua perusahaan yaitu SE dan IP. Sebelum menjadi SE, perusahaan di Desa Purwabakti sebelumnya adalah Union yang berubah menjadi Unocal dan menjadi Chevron pada tahun 1982. Pada tahun 2016, Chevron kemudian beralih menjadi SE dan semenjak itu barulah tanggung jawab perusahaan (CSR) diberikan ke Desa Purwabakti. SE adalah produsen energi panas bumi yang hasilnya kemudian dialirkan ke PT. IP untuk dialirkan kembali ke masyarakat (konsumen) dalam bentuk listrik. CSR dari SE berupa pembinaan kelompok masyarakat. Namun, CSR tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata dan tidak berkelanjutan. Sedangkan, IP memberikan dua jenis bantuan kepada Desa Purwabakti berupa bonus produksi dan CSR. Bonus Produksi yang merupakan 40 persen dari anggaran perusahaan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk kemudian disalurkan kepada desa-desa di sekitar IP dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan radius desa dengan perusahaan. Desa Purwabakti merupakan satu dari empat desa yang berada di wilayah ring 1 PT. IP. Sedangkan, CSR dari PT. IP diberikan kepada masyarakat desa melalui pihak ketiga. Hal tersebut juga dinilai masyarakat sebagai kegiatan yang tidak merata, tidak berkelanjutan dan sangat bergantung pada kedekatan antara masyarakat dan pihak ketiga yang dipercaya oleh perusahaan. Masyarakat juga merasa belum pernah dilibatkan secara langsung dalam perencanaan kegiatan bersama pihak perusahaan sehingga kebutuhan masyarakat yang sebenarnya belum bisa tersampaikan.

Bonus produksi dari PT. IP mulai dialirkan ke Desa Purwabakti pada tahun 2019 secara bertahap yaitu 50 persen dialirkan sekitar bulan September dan 50 persen sisanya dialirkan pada bulan November. Bonus produksi dari IP yang sebelumnya dialirkan dulu ke pemerintah kabupaten, akan ditransfer ke desa sebagai bantuan keuangan kabupaten atau PBK (Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten). Bonus produksi ini biasanya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik di desa dan akan dievaluasi oleh perusahaan setelah pembangunan tersebut selesai. Jika melihat pada item dalam RKP Desa Purwabakti yang untuk tahun 2020, bantuan keuangan kabupaten tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah tidak layak huni yang terdapat di Desa Purwabakti.

#### 5.3.2 Peran CSR Perusahaan dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Sukadamai

Desa Sukadamai memperoleh dana CSR dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Cabang Cibinong Kabupaten Bogor. Bantuan CSR tersebut berupa bantuan dana sebesar 750.000 rupiah setiap bulan yang ditransfer langsung ke desa untuk membiayai pembangunan desa. Bantuan juga pernah berupa bak penampungan air di lokasi mata air, paket hari raya atau kambing kurban.

Setiap bulannya, pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan bantuan CSR langsung ke PDAM di Cibinong. Musyawarah antara perusahaan dan pemerintah desa dilakukan sesuai kebutuhan sehingga tidak ada jadwal musyawarah rutin yang sudah ditetapkan sebelumnya.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



## VI AKTOR LOKAL DOMINAN, INDEKS PENGARUH, KEPEMILIKAN MODAL DAN TINDAKAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### 6.1 Aktor Lokal Dominan dan Indeks Pengaruh Aktor dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pertama dalam pengumpulan data berupa identifikasi aktor lokal dominan dalam arena pengelolaan keuangan desa memberikan hasil yang berbeda di antara dua lokasi penelitian. Pada kasus di Desa Purwabakti, nama-nama aktor yang disebutkan oleh kesepuluh informan adalah sekretaris desa, bendahara desa, tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa atau kepala urusan (Kaur) perencanaan, TPK lapang kegiatan pembangunan dan ketua perlindungan masyarakat (Linmas), sedangkan aktor lokal dominan yang disepakati dalam kegiatan diskusi kelompok terarah dan merupakan aktor dengan jumlah penyebutan terbanyak adalah sekretaris desa dengan inisial WY, bendahara desa dengan inisial AS dan TPK lapang kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan inisial MF (Tabel 11). Saat ini, kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di Desa Purwabakti sehingga TPK lapang yang memimpin kegiatan pembangunan infrastruktur skala desa seperti balai desa dan jalan desa adalah orang yang sama. Pada kasus di Desa Sukadamai, nama-nama aktor yang disebutkan oleh kesepuluh informan adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan kepala urusan (Kaur) perencanaan, sedangkan aktor lokal dominan yang disepakati dalam kegiatan diskusi kelompok terarah dan merupakan aktor dengan jumlah penyebutan terbanyak adalah sekretaris desa dengan inisial DK, bendahara desa dengan inisial SJ dan ketua LPM dengan inisial MS (Tabel 11). Nama ketua LPM seringkali disebut karena masyarakat merasa bahwa setiap saran program desa sering disampaikan kepada ketua LPM sehingga beliau dianggap selalu ikut serta juga dalam berbagai pengelolaan keuangan desa.

Secara garis besar, sekretaris desa dan bendahara desa selalu disebutkan oleh informan di kedua desa dikarenakan kedua aktor tersebut merupakan aparatur pemerintahan desa yang memang disebutkan dalam aturan pemerintah pusat, salah satunya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangkaian pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sehingga kedua aktor tersebut memang dianggap pasti terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, aktor ketiga seringkali disebutkan oleh informan karena tingginya intensitas keterlibatan aktor tersebut dalam program desa dan pengelolaan keuangan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau setidaknya kegiatan yang diketahui oleh masyarakat. Kepala desa tidak muncul dalam penyebutan informan di Desa Purwabakti karena informan menganggap Kepala Desa Purwabakti tidak terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa melainkan hanya memberi arahan dan mengetahui saja. Sedangkan di Desa Sukadamai, seorang informan merasa Kepala Desa Sukadamai ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dengan ikut serta mengecek langsung pengelolaan keuangan di desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Keterlibatan Kepala Desa Sukadamai dalam pengelolaan kepala desa dianggap bentuk pendampingan seorang ayah untuk



membimbing putra kandungnya (sekretaris desa) untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 11 Jumlah penyebutan aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020

No	Aktor lokal yang disebutkan	Jumlah penyebutan aktor (kali)	
		Desa Purwabakti	Desa Sukadamai
1	Kepala Desa	-	1
2	Sekretaris Desa	10	10
3	Bendahara Desa	10	10
4	TPK Desa atau Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan	2	3
5	TPK Lapang kegiatan pembangunan	7	-
6	Ketua Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	-
7	Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	6

Terpilihnya lima di antara enam orang aktor yang merupakan aparatur pemerintahan desa dan disahkan oleh kepala desa berdasarkan peraturan formal dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat menunjukkan bahwa berbagai peraturan yang datang dari pemerintah pusat memberikan ruang yang sempit bagi masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Jika melihat kuadran *power* dan *interest* dari Kolopaking *et al.* (2019), pemerintah desa menempati kuadran *high power* dan *high interest*. Hal ini memperkuat posisi kelima orang aktor dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam memilih staff di bawahnya pun memiliki kecenderungan untuk memilih orang-orang yang telah dikenal baik dan memiliki kedekatan dengan dirinya supaya kinerja staff tersebut dapat sesuai harapan. Seperti Bendahara Desa Purwabakti dan Sekretaris Desa Sukadamai yang merupakan putra dari kepala desa yang sedang menjabat. Jika dilihat berdasarkan lokasi tempat tinggal, rumah bendahara desa dan Ketua LPM Desa Sukadamai juga berdekatan dengan tempat tinggal kepala desa yang saat ini menjabat sehingga memiliki kemungkinan yang besar untuk sering berinteraksi. Dengan adanya kondisi seperti ini, masyarakat hanya bisa berpartisipasi secara tidak langsung dalam pengelolaan keuangan desa melalui aktor-aktor tersebut.

Aktor dan modal tidak dapat terpisahkan dalam sebuah arena pertarungan. Posisi aktor ditentukan oleh modal yang dimilikinya (Bourdieu 1993; Bourdieu 2005; Bourdieu 2008a). Neveu (2018) mendefinisikan modal sebagai kumpulan barang, keterampilan, pengetahuan dan pengakuan yang dimiliki individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengaruh dan mendapatkan kekuasaan. Berdasarkan pengukuran indeks pengaruh aktor yang dilakukan di kedua desa, nilai indeks pengaruh aktor dari 30 responden di setiap desa kemudian dihitung nilai rata-ratanya sehingga menghasilkan nilai rata-rata indeks pengaruh aktor (Tabel 12). Status aktor paling berpengaruh di Desa Purwabakti dimiliki oleh TPK lapang (MF) sedangkan aktor paling berpengaruh di Desa Sukadamai adalah sekretaris desa (DK) (Tabel 12). Responden Desa

Purwabakti menilai bahwa TPK lapang yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat karena memang MF merupakan aktor yang diusulkan oleh masyarakat untuk menjadi TPK lapang di bidang pembangunan infrastruktur. Begitupun dengan responden di Desa Sukadamai yang menilai bahwa sekretaris desa adalah aktor yang paling berpengaruh di Desa Sukadamai karena DK merupakan penduduk asli desa dan memiliki kinerja serta kepribadian yang baik sehingga dihormati dan dipatuhi oleh warganya.

Tabel 12 Rata-rata indeks pengaruh aktor di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020

Aktor	Rata-Rata Indeks Pengaruh Aktor	
	Desa Purwabakti	Desa Sukadamai
Sekretaris Desa	2,93	28,20
Bendahara Desa	1,53	20,13
TPK Lapang/ Ketua LPM*	7,47	23,73

\*): TPK Lapang di Desa Purwabakti dan Ketua LPM di Desa Sukadamai

Penilaian dari responden di kedua desa menunjukkan bahwa pengaruh aktor sangat dipengaruhi oleh kedekatan antara aktor dengan masyarakat. Semakin baik dan semakin dekat relasi sosial antara aktor dengan masyarakat maka pengaruh aktor tersebut juga akan semakin besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bourdieu bahwa modal aktor dapat berupa hubungan sosial yaitu energi yang hanya ada dan hanya berdampak pada arena di mana modal tersebut diproduksi dan direproduksi. Modal tersebut juga dapat digunakan untuk memetakan pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat (Bourdieu 2008b; Bourdieu 2018). Dalam penelitian ini hubungan kekuasaan yang digambarkan adalah kekuasaan antara aktor lokal dominan dengan masyarakat dalam arena pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, rata-rata indeks aktor di Desa Sukadamai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks aktor di Desa Purwabakti (Tabel 12). Perbedaan yang signifikan antara rata-rata indeks di Desa Purwabakti dengan Desa Sukadamai disebabkan karena responden di Desa Purwabakti lebih banyak menilai aktor dengan skor “0” yang artinya rata-rata atau sedang. Banyak juga responden yang memberi skor “0” karena tidak tahu atau tidak mengenal aktor yang ditanyakan pada responden tersebut. Ketidaktahuan responden terhadap aktor yang merupakan aparatur pemerintahan desa ini dikarenakan tempat tinggalnya yang berjarak jauh dengan balai desa dan tempat tinggal aktor. Selain itu, responden merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga intensitas komunikasi dengan aktor pun sangat kecil. Berbeda halnya dengan kondisi responden di Desa Sukadamai yang hampir seluruhnya mengetahui ketiga aktor yang sedang dinilai. Selain karena jarak antar wilayah RW yang berdekatan, responden di Desa Sukadamai juga merasa selalu dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan desa sehingga mereka sering berkomunikasi atau setidaknya mengenal ketiga aktor yang sedang dinilai. Selain kondisi geografis, tingkat pendidikan responden juga memengaruhi tingkat pemahaman responden terhadap pengelolaan keuangan desa dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Tingkat pendidikan responden di Desa Sukadamai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti. Hal ini menyebabkan

responden di Desa Sukadamai lebih memiliki kesadaran dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan di desanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan hasil analisis pengaruh yang dilakukan oleh Ollie *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Perbedaan karakteristik antara Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai juga memengaruhi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin sulit akses antar wilayah di desa, maka masyarakat pun akan semakin jarang berinteraksi dengan pihak desa dan semakin jarang memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan di desa. Widhiastini *et al.* (2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Ruang partisipasi masyarakat yang sempit menyebabkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa sangat bergantung pada integritas dari para aktor yang secara langsung terlibat. Jika para aktor tersebut bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pelayan masyarakat, maka mereka akan melakukan tugasnya demi memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan, jika para aktor tersebut hanya memanfaatkan akses yang dimilikinya dalam pengelolaan keuangan desa hanya untuk kepentingan pribadi, maka tujuan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa berupa kesejahteraan masyarakat secara merata tidak akan pernah tercapai.

## 6.2 Modal Aktor di Desa Purwabakti

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di Desa Purwabakti, diperoleh skor dari ketujuh modal yang dimiliki oleh tiga aktor desa yaitu sekretaris desa (WY), bendahara desa (AS) dan TPK Lapang kegiatan infrastruktur (MF) yang dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13 Skor modal aktor di Desa Purwabakti tahun 2020

Aktor	Skor modal aktor						
	Mm <sup>a</sup>	Mi <sup>b</sup>	Ms <sup>c</sup>	Ms <sub>i</sub> <sup>d</sup>	Me <sup>e</sup>	Mb <sup>f</sup>	Mr <sup>g</sup>
Sekretaris Desa (WY)	-0,63	2,90	-0,20	-0,43	-0,53	-0,13	1,53
Bendahara Desa (AS)	-1,57	2,53	-1,37	1,50	0,97	-0,60	0,73
TPK Lapang Infrastruktur (MF)	1,37	1,27	1,20	-0,87	1,60	0,17	1,40

Keterangan: <sup>a</sup>Mm=Modal Manusia; <sup>b</sup>Mi=Modal Institusi; <sup>c</sup>Ms=Modal Sosial; <sup>d</sup>Ms<sub>i</sub>=Modal Simbolik; <sup>e</sup>Me=Modal Ekonomi; <sup>f</sup>Mb=Modal Budaya; <sup>g</sup>Mr=Modal Moral

Penjelasan mengenai modal-modal yang dimiliki setiap aktor akan dipaparkan dalam subbab berikut.

### 6.2.1 Sekretaris Desa Purwabakti (WY)

Sekretaris Desa Purwabakti (WY) lahir di Kabupaten Bogor pada tanggal 10 April 1982. Sejak lahir hingga duduk di bangku SMA, WY berada di Desa Purwabakti. Saat ini, WY dan keluarganya tinggal di Kampung Cipamubutan RT.04 RW.04 Desa Purwabakti. Sebelum bekerja sebagai aparatur pemerintahan desa, WY bermatapencaharian sebagai pedagang. Sejak tahun 2008, WY mulai bekerja di Kantor Desa Purwabakti sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan

sedangkan pada periode pemerintahan desa tahun 2013 hingga saat ini, WY dipercaya sebagai sekretaris desa. Sebagai sekretaris desa, tugas dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai koordinator tim verifikator yang akan menentukan program prioritas untuk direalisasikan terlebih dahulu dalam satu tahun. Sebagai tim verifikator, langkah kerjanya, yaitu : (1) survai langsung ke lokasi diusulkannya program, (2) melakukan pengukuran untuk dimasukkan ke dalam RKPDes, (3) bermusyawarah untuk menentukan usulan program tersebut masuk ke dalam kategori penting mendesak sehingga harus direalisasikan tahun depan atau bisa ditunda tahun berikutnya.

Berdasarkan penilaian responden, skor modal tertinggi dibandingkan keenam modal lainnya yang dimiliki oleh WY terdapat pada modal institusi (Mi) yaitu sebesar 2,90 (Tabel 13). Hal ini dapat terjadi karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa dan tim verifikator dalam pengelolaan keuangan desa, WY sangat dipengaruhi oleh instruksi dan arahan pemerintah desa, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga di desa. Seluruh pengaruh ini bersifat legal formal karena dilandasi oleh aturan yang ada.

Dalam melaksanakan perannya sebagai sekretaris desa, WY pernah membantu masyarakat mencari solusi atas terkendalanya pembangunan drainase dan gorong-gorong di Dusun 3 Kampung Hegarmanah pada tahun 2019. Berdasarkan hasil musyawarah desa, pembangunan drainase tersebut tidak bisa dimasukkan dalam daftar kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2020 karena kurangnya anggaran desa. Namun, penduduk di Kampung Hegarmanah merasa pembangunan drainase dan gorong-gorong tersebut penting untuk segera direalisasikan. Sebagai sekretaris desa, WY tidak bisa semata-mata mengubah hasil musyawarah desa mengenai kegiatan yang akan direalisasikan di tahun 2020. WY juga tidak bisa mengubah batasan alokasi anggaran yang telah tertuang dalam pagu indikatif dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, WY memberikan solusi berupa pengajuan proposal ke PT. Indonesia Power yang merupakan perusahaan di wilayah Desa Purwabakti sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan drainase dan gorong-gorong di dusun 3. WY merasa, solusi tersebut sudah sesuai dengan kapasitas WY sebagai sekretaris desa agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan peran sekretaris desa tanpa mengubah pagu indikatif dari pemerintah kabupaten dan hasil musyawarah di desa. Tindakan yang dilakukan WY tersebut sangat dinilai positif oleh masyarakat sehingga responden menilai modal moral dengan skor 1,53 (Tabel 13). Selain modal institusi dan modal moral, kelima modal lainnya yang dimiliki oleh WY bernilai negatif yang artinya kelima modal negatif yang dimiliki WY tersebut justru mengurangi indeks pengaruh WY (Tabel 13).

Kepemilikan modal sosial, modal simbolik dan modal budaya bernilai minus yaitu berturut-turut sebesar -0,20; -0,43 dan -0,13 (*lihat* Tabel 13) karena responden menilai WY tidak memiliki jaringan dengan pihak di luar desa selain jaringan yang terkait dengan pekerjaannya sebagai sekretaris desa dan tidak memiliki gelar dan keistimewaan khusus. Hal ini juga diakui oleh WY ketika dikonfirmasi mengenai kepemilikan modal tersebut. Selain itu, WY juga belum pernah menerima penghargaan dan prestasi. Namun, beberapa keturunan sebelum WY juga merupakan sekretaris desa sehingga WY dipercaya sebagai sekretaris desa. Dalam hal budaya, WY juga bukan seorang tokoh budaya dan mampu mempengaruhi orang lain dalam hal budaya. Namun, WY selalu mengikuti aturan

dan budaya yang ada. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lokal (sunda) sehingga masyarakat dengan mudah memahami maksud dan tujuan WY. Pembawaan dan tata krama WY juga diterima oleh masyarakat.

### 6.2.2 Bendahara Desa Purwabakti (AS)

Bendahara Desa Purwabakti (AS) lahir di Bogor, tanggal 2 Mei tahun 1988. Saat ini, AS tinggal di Desa Purwabakti RT.02 RW.04 Kampung Campedak. Sebelum menjadi bendahara desa, AS bekerja di Jakarta sebagai karyawan di perusahaan alat-alat teknik, pembuatan kunci mobil serta pernah juga menjadi tukang cat bagi mitra-mitra salah satu perusahaan rokok di Indonesia. Bendahara desa juga berperan sebagai kaur keuangan desa. Beberapa tugas AS dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: (1) mengambil uang desa dari rekening desa ke bank didampingi oleh kepala desa dengan nominal sesuai dengan permohonan pencairan dari TPK Lapangan yang sedang melaksanakan pembangunan serta kebutuhan desa lainnya, dan (2) mendistribusikan uang yang diambil sesuai dengan kebutuhan tidak lebih dari 3 hari. Sama seperti sekretaris desa, modal institusi yang dimiliki AS merupakan modal dengan skor tertinggi dibandingkan keenam modal lainnya yaitu sebesar 2,53 karena kedudukan AS sebagai bendahara desa yang disahkan secara formal sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa serta seluruh tindakan AS dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tabel 13). Hal ini disampaikan langsung oleh AS bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa, AS mengacu pada peraturan menteri desa dan PDPT, menteri dalam negeri, peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Lin (2001) mengartikan modal institusional sebagai modal yang memiliki kaitan dengan ideologi dan kekuasaan yang berlaku serta dikaitkan dengan sumber daya yang dibawa oleh lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa modal WY dan AS sebagai aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh ideologi dan aturan pemerintahan desa, bukan dari modal yang bersumber dari individu kedua aktor tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sjaf (2019a) mengenai besarnya pengaruh pemerintah pusat ke desa melalui peraturan yang ketat menyebabkan otonomi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa sangat terbatas dan memberikan ruang partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai asas rekognisi dan asas subsidiaritas desa belum sepenuhnya terlaksana.<sup>7</sup>

AS mulai menjadi bendahara desa ketika periode pemerintahan desa tahun 2018 hingga saat ini dimana ayah tirinya yang menjabat sebagai kepala desa. Kakek kandung AS dulu bekerja sebagai penarik pajak bumi dan bangunan (PBB) dan menjadi sekretaris desa saat kepala desa pertama menjabat di Desa Purwabakti. Berdasarkan keturunan sebelumnya yang juga merupakan sekretaris desa dan ayah

<sup>7</sup> Eko et al. (2014) menyebutkan bahwa subsidiaritas memiliki tiga makna, salah satunya adalah pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan lokal desa melainkan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kewenangan dan pemerintahan desa. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah pusat adalah dengan pendekatan pemberdayaan desa yang sesuai dengan amanat UU Desa Nomor 6 tahun 2014 (Ra'is 2017).

tiri sebagai kepala desa, AS dinilai oleh responden memiliki modal simbolik yang bernilai positif yaitu dengan indeks 1,50 (Tabel 13). Selain modal institusi dan modal simbolik, modal ekonomi dan modal moral yang dimiliki AS juga bernilai positif yaitu sebesar 0,97 dan 0,73 (Tabel 13). Artinya, modal ekonomi dan modal moral yang dimiliki AS dinilai memiliki pengaruh meskipun dalam kekuatan yang rendah. AS sering ikut serta dalam pembangunan sukarela setiap seminggu sekali sehingga responden menganggap hal ini merupakan alasan memberikan penilaian positif terhadap modal moral yang dimiliki AS. Sedangkan mengenai modal ekonomi, AS menjelaskan sebagai berikut.

*“Kalau sebagai bendahara, ada pendapatan setiap tiga bulan sekali. Kalau rumah, saya ada 2 rumah, 1 untuk ditempati dan 1 untuk dikontrakan. Kalau mobil ada 1 mobil keluaran 2016 warisan dari mertua. Lahan juga warisan dari mertua dan orang tua sekitar 2000 meter tapi digarap sama orang lain, bagi hasil aja, Neng. Kolam ikan juga ada tapi lagi ngga dipakai”.* (AS-32 th)

Modal manusia, modal sosial dan modal budaya yang dimiliki AS bernilai minus secara berurutan sebesar -1,57; -1,37 dan -0,60 yang artinya ketiga modal tersebut mengurangi indeks pengaruh yang dimiliki AS (Tabel 13). Hal ini juga diakui oleh AS bahwa dirinya tidak memiliki jaringan sosial di luar desa selain persoalan pemerintahan desa. AS juga tidak tergabung dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat Desa Purwabakti. Modal budaya AS bernilai negatif karena AS bukan merupakan tokoh adat yang kental akan budaya lokal, tidak memiliki karya seni budaya dan tidak memengaruhi orang lain dalam aspek budaya. Namun, AS menggunakan bahasa lokal (bahasa sunda) dan informal dalam berkomunikasi dengan orang lain, memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat.

### 6.2.3 TPK Lapang Infrastruktur Desa Purwabakti (MF)

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Lapang khusus dalam program pembangunan infrastruktur (MF) lahir di Bogor pada tanggal 12 Maret 1982. Sejak lahir hingga saat ini, MF tinggal di Desa Purwabakti tepatnya Kampung Taneuh Beureum RT.04 RW.03. MF bersekolah hingga kelas 3 (tiga) SD di Desa Purwabakti. Selama pembangunan infrastruktur di desa, MF selalu ditunjuk menjadi TPK Lapang karena pengalamannya di bidang pembangunan fisik dan konstruksi yang cukup lama. Sebelum aktif di desa, MF juga memiliki riwayat pekerjaan di beberapa tempat seperti PT. Timah Bangka Belitung dan perusahaan pemasangan alat-alat berat di Jakarta. Berdasarkan pengalaman dan kemampuan MF di bidang konstruksi tersebut, responden menilai modal manusia yang dimiliki MF cukup berpengaruh dengan skor 1,37 (Tabel 13).

Kepemilikan modal MF yang bernilai positif selain modal manusia adalah modal institusi, modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal moral. Meskipun MF bukan bagian formal dari institusi pemerintahan desa, MF melaksanakan tugas sesuai dengan arahan kepala desa dan aparat pemerintah desa terkait sehingga modal institusi yang dimiliki MF masih bernilai positif sebesar 1,27 (Tabel 13). Modal sosial MF dinilai positif dengan skor sebesar 1,20

(lihat Tabel 13) dipengaruhi salah satunya oleh pekerjaan utama MF yaitu sebagai peternak yang juga menjual hasil ternaknya sehingga MF memiliki jaringan para penjual ternak di desa-desa lainnya. MF juga menjalin hubungan dengan banyak toko penyedia bahan bangunan terkait tugasnya sebagai TPK lapang bagian infrastruktur. Hal ini memberikan dampak positif berupa harga bahan bangunan yang lebih murah dibandingkan toko-toko lainnya.

Modal ekonomi menjadi modal dengan skor tertinggi diantara keenam modal lainnya yaitu sebesar 1,60 (Tabel 13). Hal ini sejalan dengan jawaban MF ketika ditanyakan terkait aset atau barang berharga yang dimiliki. MF menyebutkan diantaranya 1 buah mobil hasil gadai, 1 unit rumah yang dibangun sendiri, lahan seluas ½ hektar yang ditanami pohon pisang dan merupakan warisan, kambing sekitar 40 ekor yang ada di kandang dengan pekerja peternakan 5 orang, pekerja kebun 1 orang, serta membuka warung di rumahnya yang dijaga oleh istrinya. Hal ini juga yang menjadi landasan responden menilai bahwa MF memiliki modal ekonomi yang cukup berpengaruh. MF dinilai memiliki potensi yang bersumber dari dirinya sendiri dalam hal finansial dan material untuk berkontribusi dalam arena (Casey 2008). Dalam konteks ini berarti arena pengelolaan keuangan desa. Kekuatan modal ekonomi MF ditunjukkan dalam bentuk tindakan MF ketika memberikan dana talangan bahkan menambahkan dana secara sukarela dari dana pribadinya ketika kegiatan pembangunan jalan lingkungan yang berada di bawah kewenangannya mengalami kekurangan biaya.

Modal budaya yang dimiliki MF juga bernilai positif namun dengan skor yang rendah yaitu sebesar 0,17 (lihat Tabel 13) karena MF bukan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam hal budaya. Namun, MF menggunakan bahasa lokal (sunda) dalam kesehariannya sehingga mudah menjalin kedekatan dengan masyarakat lainnya. Modal moral juga dinilai positif karena sebagian besar responden menilai MF memiliki pribadi dan sifat yang baik serta tidak pernah melakukan hal negatif yang mengganggu masyarakat.

Modal simbolik yang dimiliki MF menjadi satu-satunya modal yang bernilai negatif yaitu sebesar -0,87 karena responden menilai MF tidak memiliki keistimewaan, tidak memiliki gelar, prestasi dan penghargaan serta MF bukan merupakan turunan dari tokoh yang berpengaruh di desa (Tabel 13).

### 6.3 Modal Aktor di Desa Sukadamai

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden di Desa Sukadamai, diperoleh skor dari ketujuh modal yang dimiliki oleh tiga aktor desa yaitu sekretaris desa (DK), bendahara desa (SJ) dan ketua LPM (MS) yang dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14 Skor modal aktor di Desa Sukadamai tahun 2020

Aktor	Skor modal aktor						
	Mm <sup>a</sup>	Mi <sup>b</sup>	Ms <sup>c</sup>	Ms <sub>i</sub> <sup>d</sup>	Me <sup>e</sup>	Mb <sup>f</sup>	Mr <sup>g</sup>
Sekretaris Desa (DK)	4,27	4,77	4,77	3,07	2,60	2,93	5,80
Bendahara Desa (SJ)	3,07	3,37	3,60	1,00	1,37	2,17	5,57
Ketua LPM (MS)	2,77	3,70	4,47	2,23	1,50	2,90	6,17

Keterangan: <sup>a</sup>Mm=Modal Manusia; <sup>b</sup>Mi=Modal Institusi; <sup>c</sup>Ms=Modal Sosial; <sup>d</sup>Ms<sub>i</sub>=Modal Simbolik; <sup>e</sup>Me=Modal Ekonomi; <sup>f</sup>Mb=Modal Budaya; <sup>g</sup>Mr=Modal Moral

Penjelasan mengenai modal-modal yang dimiliki setiap aktor akan dipaparkan dalam subbab berikut.

### 6.3.1 Sekretaris Desa Sukadamai (DK)

Sekretaris Desa Sukadamai (DK) lahir di Bogor, 3 Maret 1988. Sejak lahir hingga saat ini, DK menetap di Desa Sukadamai tepatnya Kampung Cilubang RT.03/RW.04. DK adalah putra kandung dari kepala desa yang saat ini sedang menjabat. Sebelum menjadi sekretaris desa, DK membantu ayahnya mengelola usaha sepatu bayi. Ayah DK yang juga kepala desa saat ini adalah pengusaha sepatu bayi semenjak tahun 1980 dan produknya berhasil diekspor sampai ke India dan Pakistan. Responden menilai, walaupun DK adalah putra kandung dari kepala desa, DK melakukan tugasnya dengan baik, memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang baik di bidangnya. DK juga sempat mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta namun tidak sempat menyelesaikannya sehingga ijazah terakhir yang dimilikinya ada ijazah SMA/SLTA. Namun, pengalaman di perguruan tinggi juga diaplikasikan selama menjabat jadi kepala desa sehingga masyarakat merasakan kinerja DK yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian responden terhadap kepemilikan DK atas modal manusia, modal sosial dan modal moral dengan skor berturut-turut sebesar 4,27; 4,77 dan 5,08 (Tabel 14). Modal moral yang dimiliki oleh DK merupakan modal dengan skor tertinggi dibandingkan skor keenam modal lainnya. Artinya modal moral yang dimiliki DK memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap indeks pengaruh yang dimiliki oleh DK.

Modal institusi DK juga memiliki skor yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,77 (lihat Tabel 14) karena tindakan, ideologi yang dimiliki DK banyak dipengaruhi oleh institusi. Kedudukan sebagai sekretaris desa juga mempengaruhi sikap dan perilaku DK dalam kesehariannya. Kepala desa yang juga ayah kandung DK memberikan dukungan moril yang besar terhadap DK.

Modal ekonomi dan modal budaya memiliki skor yang paling rendah diantara modal lainnya yaitu berturut-turut sebesar 2,60 dan 2,93 (Tabel 14). Penilaian responden tersebut diberikan kepada DK karena responden menilai DK memiliki pribadi yang sederhana. DK juga bukan merupakan tokoh yang kental nilai budaya dan adatnya.

*“Nu beunghar mah bapana, Neng. Putrana mah meunang pamere bapana” (yang kaya itu Bapaknya, Dek. Kalau anaknya (DK) dapat pemberian (aset/lahan) dari bapaknya)(HI-35th).*

Pernyataan sebagian besar responden hampir sama dengan pernyataan HI ketika ditanyakan terkait modal ekonomi yang dimiliki oleh DK.

### 6.3.2 Bendahara Desa Sukadamai (SJ)

Bendahara Desa Sukadamai (SJ) lahir di Bogor tanggal 19 Desember 1985. Sejak lahir hingga saat ini, SJ tinggal di Desa Sukadamai tepatnya Kampung Cilubang RT.02/RW.02. Sebelum menjadi bendahara, SJ bekerja sebagai *call center* di salah satu bank di Kota Bogor. Oleh karena itu, SJ sudah memiliki



pengalaman yang baik dalam hal pengelolaan keuangan. SJ juga merupakan lulusan sarjana jurusan ekonomi salah satu universitas swasta di Bogor. Berdasarkan hal tersebut, responden menilai modal manusia dengan skor 3,07 yang artinya modal manusia yang dimiliki SJ cukup memberikan kontribusi terhadap indeks pengaruh SJ (Tabel 14).

Responden menilai modal institusi yang dimiliki SJ dengan skor sebesar 3,37 (Tabel 14). Skor ini diperoleh karena sebagian besar responden melihat kedudukan SJ sebagai bendahara yang semua tindakannya juga pasti sesuai dengan aturan dan instruksi dari pemimpin di institusi (pemerintahan desa). SJ juga menyatakan bahwa dirinya tergabung dengan paguyuban bendahara desa di Kabupaten Bogor untuk saling berkomunikasi terkait pekerjaannya sebagai bendahara. Hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja SJ sebagai bendahara desa. Jaringan dan intensitas komunikasi dengan jaringan yang dimiliki SJ dinilai sebagai modal sosial yang baik bagi SJ sehingga responden juga memberikan skor sebesar 3,60 yang artinya cukup memberikan kontribusi terhadap indeks pengaruh SJ (Tabel 14).

Penilaian responden terhadap tiga modal lainnya yaitu modal simbolik, modal ekonomi dan modal budaya cenderung rendah berturut-turut sebesar 1,00; 1,37; 2,17 (Tabel 14). Hal ini dikarenakan responden menilai bahwa SJ tidak memiliki keistimewaan, gelar, prestasi dan penghargaan. SJ juga hidup sederhana dengan suami sebagai penjahit pakaian *taekwondo* dan tinggal bersama orang tua. SJ juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki lahan dan aset lainnya serta tidak ada sumber penghasilan lain selain penghasilan utama SJ dan suami. SJ juga bukan merupakan tokoh budaya yang masih memegang teguh budayanya dan mengajak orang lain untuk menerapkan budaya. Satu hal yang masih SJ terapkan adalah menggunakan bahasa lokal (sunda) dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya secara informal.

Modal tertinggi di antara keenam modal yang dimiliki SJ yaitu modal moral dengan skor sebesar 5,57 (Tabel 14). Menurut sebagian responden, SJ memiliki kepribadian yang baik, ramah dan selalu bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. SJ juga selalu transparan soal keuangan desa. Hal ini yang menjadikan SJ selalu mendapat dukungan dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa.

### 6.3.3 Ketua LPM Desa Sukadamai (MS)

Ketua LPM Desa Sukadamai (MS) lahir di Bogor, 24 Juli 1969. Sejak lahir hingga saat ini, MS tinggal di Desa Sukadamai tepatnya di Kampung Cilubang RT.02 RW 03. MS menjadi ketua LPM di Desa Sukadamai setelah pensiun dari salah satu perusahaan otomotif di Bogor pada tahun 2015. Sebagai ketua LPM, MS menempatkan diri sebagai mitra kepala desa dalam hal pemberdayaan dan pembangunan desa. MS juga menjadi orang yang paling sering dihubungi oleh masyarakat ketika memiliki usulan atau keluhan terkait program pembangunan di desa. Berdasarkan kedekatan tersebut, sebagian besar responden menilai modal moral yang dimiliki MS dengan skor tertinggi yaitu sebesar 6,17 (Tabel 14). Modal sosial merupakan modal dengan skor tertinggi kedua setelah modal moral yang dimiliki MS dengan skor sebesar 4,47 (Tabel 14). Hal ini sesuai dengan pernyataan MS sendiri bahwa dirinya aktif dalam kerjasama antar desa dalam hal pembangunan dan kerjasama tersebut sering berlanjut dalam berbagai hal. Kerja sama tersebut memudahkan MS dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua LPM dengan cara

saling berbagi informasi dan studi banding untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Sukadamai. Modal institusi yang dimiliki oleh MS juga masih dalam kategori cukup tinggi dengan skor sebesar 3,70 (Tabel 14). Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai tindakan MS sangat dipengaruhi oleh institusi pemerintahan desa dan peraturan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban MS sebagai ketua LPM.

Modal manusia, modal simbolik, modal budaya memiliki skor yang berdekatan yaitu berturut-turut sebesar 2,77; 2,23; 2,90 (Tabel 14). Skor tersebut menunjukkan bahwa ketiga modal tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap indeks pengaruh yang dimiliki MS. Responden yang menilai bahwa MS memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidangnya serta selalu menerapkan nilai budaya dan mempengaruhi orang lain dalam hal budaya masih lebih banyak dibandingkan responden yang menilai sebaliknya. Menurut salah satu responden, MS juga pernah menjadi kepala sekolah di tempat responden tersebut bersekolah sehingga MS dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di desa.

Modal ekonomi MS memiliki skor paling rendah di antara enam modal lainnya yaitu sebesar 1,50 (Tabel 14). MS dinilai memiliki kondisi ekonomi yang sederhana meskipun berdasarkan pernyataan MS sendiri, MS memiliki lahan seluas 500 m<sup>2</sup> yang dipekerjakan orang lain dan menjadi sumber pendapatan bagi MS selain sebagai ketua LPM. Perbedaan antara penilaian responden dengan kondisi sebenarnya bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan responden terhadap kepemilikan ekonomi MS yang sebenarnya.

Dalam mengartikan modal moral, Kane (2001) menyebutkan bahwa modal moral merupakan modal yang berkaitan dengan orang lain untuk mencapai tujuan akhir. Terdapat perhatian juga terhadap prinsip, nilai dan aspek kehidupan lainnya. Pencapaian tujuan akan berhasil jika aktor dapat memadukan modal moral dengan kemampuan politik yang baik dan dianggap berharga oleh orang lain. Ketiga aktor lokal dominan di Desa Sukadamai dinilai memiliki modal moral yang tinggi (*lihat* Tabel 14) artinya mereka memperoleh penilaian positif, dukungan dari masyarakat serta dianggap mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. DK juga menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa merupakan pelayan masyarakat yang harus dapat memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Penilaian positif dari masyarakat tentu akan berdampak pada keberlanjutan para aktor tersebut untuk tetap menduduki posisi atau jabatan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa para aktor di Desa Sukadamai sudah dapat memadukan modal moral dan kemampuan politik dalam menjalankan perannya sebagai aparatur pemerintahan desa sehingga responden merasakan kepuasan dan manfaat dari kinerja ketiga aktor tersebut khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

#### 6.4 Tindakan Sosial Aktor dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Weber mengartikan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang saling berhubungan dengan individu lain dan memiliki makna subyektif yang didorong bukan hanya oleh kepentingan material melainkan juga kepentingan ideal (Cosser 1977). Berdasarkan pengukuran tindakan sosial dominan yang dimiliki aktor, terlihat bahwa dalam menjalankan perannya di arena pengelolaan keuangan desa, keenam aktor memiliki tindakan sosial yang bersifat rasional instrumental (Tabel

15). Artinya, semua aktor bertindak dengan berbagai pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa. Penjelasan mengenai tindakan sosial keenam aktor terdapat pada subbab berikut.

Tabel 15 Skor tindakan sosial aktor di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020

Aktor Desa Purwabakti	Skor setiap tindakan			
	Rasional Instrumental	Rasional Berbasis Nilai	Tradisional	Afektif
Sekretaris Desa (WY)	20	15	10	10
Bendahara Desa (AS)	20	16	10	10
TPK lapangan (MF)	20	16	10	10
Aktor Desa Sukadamai	Rasional Instrumental	Rasional Berbasis Nilai	Tradisional	Afektif
Sekretaris Desa (DK)	20	15	10	10
Bendahara Desa (SJ)	20	14	10	10
Ketua LPM (MS)	20	15	10	10

#### 6.4.1 Sekretaris Desa Purwabakti (WY)

Berdasarkan pengukuran tindakan sosial, WY memiliki skor tertinggi pada tindakan rasional instrumental (Tabel 15). WY menyatakan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Motivasi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah WY ingin melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan dari pemerintah. Terdapat Standar Harga Tertinggi (SHT) dalam memilih bahan-bahan yang akan dibeli dalam pembangunan sehingga dalam bertindak, aturan ini yang selalu jadi pedoman. Aturan yang ada dirasa tidak bertentangan dalam nilai dalam diri. Adapun terkait keinginan masyarakat yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran, WY juga membantu mencari alternatif lain seperti mengajukan proposal ke PT. Star Energy atau PT. Indonesia Power. Dalam melaksanakan tugas dan perannya, tindakan WY dipengaruhi oleh peraturan kepala desa, peraturan dari pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) serta pemerintah pusat. Selain itu, WY juga dipengaruhi lembaga-lembaga yang ada di desa. Seluruh pengaruh ini bersifat legal formal karena dilandasai aturan yang ada.

#### 6.4.2 Bendahara Desa Purwabakti (AS)

Berdasarkan pengukuran tindakan sosial, AS memiliki skor tertinggi pada tindakan rasional instrumental (Tabel 15). AS menyatakan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Jika terdapat persoalan yang terjadi di masyarakat misalnya ada kampung yang belum tersentuh pembangunan dan memberikan kritik terhadap pemerintah desa, AS melakukan pendekatan dengan memberikan penjelasan soal keterbatasan anggaran sehingga harus menentukan prioritas

berdasarkan asas urgensi atau kegawatdaruratan. Pembangunan yang belum direalisasikan tersebut akan dibawa lagi ke dalam musyawarah desa untuk diajukan di tahun selanjutnya.

AS baru menjabat sebagai bendahara desa saat ayah tirinya menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2018. Motivasi AS untuk ikut terlibat menjadi aparatur pemerintahan desa adalah karena rasa penasaran AS untuk mencari alasan tidak pernah adanya pembangunan yang berarti sejak Desa Purwabakti berpisah dari Desa Ciasmara pada tahun 1982. Berdasarkan rasa penasaran tersebut, AS memutuskan untuk menjadi aparatur pemerintahan desa. Selama menjabat bendahara desa, AS merasa tidak nyaman dan tidak sebebaskan dulu dalam hal kepemilikan materi. Oleh karena itu, AS berencana tidak akan melanjutkan jabatannya lagi di pemerintahan desa pada periode pemerintahan selanjutnya.

Dalam menjalankan perannya sebagai bendahara desa dan sebagai salah satu aktor dalam pengelolaan keuangan desa, tindakan AS dipengaruhi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui aturan-aturan yang diterbitkannya.

#### 6.4.3 TPK Lapang Desa Purwabakti (MF)

Berdasarkan pengukuran tindakan sosial, MF memiliki skor tertinggi pada tindakan rasional instrumental (Tabel 15). MF menyatakan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai TPK Lapang, terdapat beberapa pihak yang memengaruhi tindakannya yaitu: TPK Desa dan Kaur perencanaan sebagai aparatur desa yang membuat desain pembangunan fisik untuk direalisasikan oleh MF dan kepala desa yang menjadi penanggung jawab dan menjadi tempat MF berkonsultasi mengenai desain pembangunan fisik yang akan dilaksanakan. Aturan dari pemerintah pusat juga memengaruhi tindakan MF karena terdapat standar harga yang ditetapkan sehingga dalam memilih bahan bangunan MF selalu mencari harga yang sesuai standar dengan kualitas dan spesifikasi yang baik. Dalam membeli bahan bangunan, MF selalu mengutamakan toko material yang dimiliki oleh masyarakat Desa Puwarabkti terlebih dahulu meskipun ada perbedaan harga dengan toko material di luar desa. Hal ini MF lakukan karena melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal. Jika perbedaan harga antara toko lokal dan toko di luar desa terlalu jauh, MF baru mencari bahan material dari luar desa yang harga lebih murah dan sudah memiliki hubungan dengan MF.

#### 6.4.4 Sekretaris Desa Sukadamai (DK)

Berdasarkan pengukuran tindakan sosial, DK memiliki skor tertinggi pada tindakan rasional instrumental (Tabel 15). DK menyatakan bahwa semua tindakan yang ia lakukan sebagai sekretaris desa dan sebagai ketua tim 7 dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Pada awalnya, motivasi DK menjadi sekretaris desa adalah membantu ayah kandungnya ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saat itu, calon wakil kepala desa yang sudah disiapkan ternyata mengundurkan diri sehingga pilihan terakhir jatuh pada DK. Dalam menjalankan perannya, seringkali DK menghadapi

situsasi ketika keinginan ayah DK (Kepala Desa Sukadamai) tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga DK selalu berusaha mengingatkan kembali agar tindakan dan keputusan yang diambil kepala desa sesuai dengan peraturan pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang sudah ditetapkan. DK juga merasa aturan yang ada tidak bertentangan dengan nilai dalam diri DK sehingga DK merasa harus mengikuti aturan yang ada untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dimaknai oleh DK sebagai proses merencanakan pembiayaan hingga disahkannya APB Desa dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan serta berhasil dilaporkan kepada pemerintah kabupaten tanpa kekurangan. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa, DK harus memperhatikan dua sisi yaitu dari sisi kebijakan dan dari sisi masyarakat. Dari sisi kebijakan, DK harus mengikuti semua aturan yang ada dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan dari sisi masyarakat, DK harus dapat mewujudkan bentuk pembangunan yang memuaskan bagi masyarakat karena masyarakat menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa dari hasil fisik pembangunan saja. Oleh karena itu, tindakan yang DK pilih berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada. Hal ini tentu akan berdampak pada keberlanjutan DK dalam menempati kedudukan saat ini sebagai aparatur pemerintahan desa.

#### 6.4.5 Bendahara Desa Sukadamai (SJ)

Tindakan sosial dominan yang dimiliki SJ dalam menjalankan perannya yaitu tindakan rasional instrumental (Tabel 15). Sama seperti para aktor lokal dominan lainnya, tindakan rasional instrumental ini menunjukkan bahwa tindakan SJ dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. SJ menyatakan bahwa dirinya selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan selama melaksanakan tugasnya sebagai bendahara dan aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Bagi SJ, pengelolaan keuangan desa adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan jujur agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Motivasi awal SJ ingin menjadi bendahara desa adalah karena merasa tawaran dari kepala desa untuk menjadi bendahara desa akan membuat SJ lebih mudah dalam bekerja karena lokasi yang dekat rumah sehingga akan memakan waktu lebih sedikit untuk berangkat dan pulang kerja. Hal ini membuat SJ memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus anak dan suami di rumah. Meskipun, penghasilan sebagai bendahara desa tidak sebesar penghasilan SJ ketika menjadi *call center* di salah satu bank di Kota Bogor. Motivasi ini yang membuat SJ menikmati pekerjaannya sebagai bendahara desa.

#### 6.4.6 Ketua LPM Desa Sukadamai (MS)

Tindakan sosial dominan yang dimiliki MS dalam menjalankan perannya yaitu tindakan rasional instrumental (Tabel 15). Sama seperti para aktor lokal

dominan lainnya, tindakan rasional instrumental ini menunjukkan bahwa tindakan MS dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, MS juga selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada seperti keluhan masyarakat tentang pembangunan yang tidak merata, MS merespon dengan memberikan penjelasan terkait sistem prioritas dan ketersediaan anggaran untuk membiayai pembangunan.

Motivasi MS menjadi ketua LPM adalah karena MS ingin ikut serta berpartisipasi dalam program pembangunan di Desa Sukadamai. Selain itu, MS juga sudah memasuki masa pensiun dari sebuah perusahaan otomotif di Bogor sehingga memiliki waktu yang lebih luang untuk bekerja di pemerintahan desa. MS juga menyampaikan memiliki kedekatan dengan kepala desa sebagai teman berdiskusi sehingga MS dengan senang hati menjadi ketua LPM sebagai *partner* diskusi kepala desa mengenai pembangunan desa.

### 6.5 Kaitan Kepemilikan Modal dan Latar Belakang Aktor dengan Tindakan Sosial Para Aktor Lokal

Bourdieu menyebutkan bahwa seorang aktor memiliki kecenderungan yang menyebabkan aktor tersebut melakukan praktik atau tindakan sosial dalam arena. Kecenderungan ini Bourdieu sebut sebagai habitus yang dapat dimaknai salah satunya sebagai *modus operandi* yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman aktor. Latar belakang aktor ini dapat berupa latar belakang pendidikan, keluarga, motivasi menjadi aktor dalam arena serta pengalaman semasa hidup aktor yang berkaitan dengan kontestasi dalam arena. Dari keenam aktor lokal dominan di kedua desa, terdapat perbedaan latar belakang Pendidikan yang cukup mencolok yaitu, tingkat pendidikan tertinggi aktor Desa Purwabakti sampai pada jenjang SLTA/SMA. Sedangkan, aktor di Desa Sukadamai memiliki tingkat pendidikan terakhir yang paling rendah adalah SMA. Tingkat pendidikan terakhir sekretaris dan bendahara Desa Purwabakti (WY dan AS) sampai pada jenjang SMA, sedangkan TPK Lapang Desa Purwabakti (MF) sampai kelas 3 SD. Tingkat pendidikan terakhir sekretaris dan ketua LPM Desa Sukadamai (DK dan MS) yaitu sampai jenjang SMA. Meskipun begitu, DK sudah mengenyam bangku perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri meskipun tidak sampai menyelesaikan tugas akhirnya. Sedangkan, bendahara Desa Sukadamai (SJ) memiliki tingkat pendidikan terakhir sampai jenjang sarjana ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Selain latar belakang pendidikan, pengalaman yang dimiliki para aktor di kedua desa tentu berbeda terutama dipengaruhi oleh jarak desa ke pusat kota. Desa Sukadamai sebagai desa yang memiliki jarak lebih dekat dengan Kota Bogor dan beberapa perguruan tinggi di Bogor memiliki pengalaman bekerja sama dan berinteraksi yang lebih banyak dibandingkan para aktor di Desa Purwabakti yang berjarak jauh dari pusat Kota Bogor. Hal ini diakui para aktor di Desa Purwabakti dan tercermin dari skor modal sosial yang lebih

rendah dibandingkan skor modal sosial aktor di Desa Sukadamai (*lihat* Tabel 13 dan 14).

Latar belakang dan pengalaman aktor tersebut kemudian mendorong aktor menggunakan modal-modal yang dimilikinya dalam menjalankan perannya di arena pengelolaan keuangan desa. Modal aktor juga menjadi hal penting untuk digunakan aktor ketika berkontestasi dalam sebuah arena untuk memperoleh kedudukan. Kepemilikan modal tersebut digunakan oleh aktor dalam mengambil kebijakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan tindakan para aktor dalam menyalurkan pembiayaan pembangunan infrastruktur desa yang nilainya melebihi alokasi yang telah ditetapkan baik dalam musyawarah desa bersama para tokoh masyarakat atau pemerintah pusat.

Sekitar bulan Agustus-Desember di tahun berjalan penyelenggaraan pemerintahan desa, biasanya pagu indikatif diturunkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa sebagai gambaran besaran anggaran yang akan turun di tahun depan. Pada tahap ini, desa membentuk tim khusus yang berjumlah 7 atau 11 orang yang diketuai oleh sekretaris desa untuk menyusun APB desa. Penyusunan APB Desa didasarkan pada rencana kegiatan pembangunan desa yang telah disepakati dan ditentukan prioritasnya oleh masyarakat mulai dari tingkat RT hingga tingkat desa. Dalam penentuan prioritas kegiatan pembangunan tersebut dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang dimiliki desa. Oleh karena itu, ada kalanya kegiatan yang diusulkan masyarakat tidak dapat direalisasikan di tahun yang sama. Para aktor lokal dominan di setiap desa memiliki strategi masing-masing untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran tersebut.

Pada kasus di Desa Purwabakti, tindakan WY dan AS ditunjukkan dengan kekuatan modal institusi yang dimiliki dalam mengatasi terkendalanya pembangunan drainase dan gorong-gorong di Dusun 3 Kampung Hegarmanah pada tahun 2019. Berdasarkan hasil musyawarah desa, pembangunan drainase tersebut tidak bisa dimasukkan dalam daftar kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2020 karena kurangnya anggaran desa. Namun, penduduk di Kampung Hegarmanah merasa pembangunan drainase dan gorong-gorong tersebut penting untuk segera direalisasikan. Sebagai sekretaris desa, WY tidak bisa semata-mata mengubah hasil musyawarah desa mengenai kegiatan yang akan direalisasikan di tahun 2020. WY juga tidak bisa mengubah batasan alokasi anggaran yang telah tertuang dalam pagu indikatif dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, WY memberikan solusi berupa pengajuan proposal ke PT. Indonesia Power yang merupakan perusahaan di wilayah Desa Purwabakti sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan drainase dan gorong-gorong di dusun 3. WY merasa, solusi tersebut sudah sesuai dengan kapasitas WY sebagai sekretaris desa agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan peran sekretaris desa tanpa mengubah pagu indikatif dari pemerintah kabupaten dan hasil musyawarah di desa. Sedangkan, AS mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menerima keputusan prioritas pembangunan dan pembangunan yang belum terlaksana akan direncanakan lagi tahun depan. Adapun MF dengan modal ekonomi yang dimiliki seringkali mengeluarkan uang pribadi jika pengeluaran kebutuhan kegiatan yang dibawahinya melebihi anggaran yang ada.

Hal ini dibuktikan oleh tindakan pemerintah desa termasuk ketiga aktor tersebut ketika kebutuhan desa atas pembangunan infrastruktur khususnya jalan



desa melebihi pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bupati Bogor yaitu persentase pembangunan fisik dalam anggaran desa tidak boleh melebihi 70 persen. Namun, karena kondisi Desa Sukadamai memang sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, para aktor lokal tidak semata-mata membatasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 70 persen melainkan mengakomodasi kebutuhan desa yang melebihi persentase tersebut dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bupati Bogor. Langkah-langkah yang dilalui para aktor tersebut adalah membahas persoalan perencanaan penganggaran bersama para perwakilan masyarakat dalam musyawarah desa, melampirkan berita acara musyawarah yang menunjukkan kesepakatan partisipan atas perencanaan penganggaran dan melampirkan daftar tanda tangan seluruh peserta musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aktor di Desa Sukadamai tidak semata-mata tunduk pada peraturan yang berasal dari pemerintah di atasnya, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Berdasarkan perbedaan latar belakang dan pengalaman para aktor, terlihat bahwa aktor yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan sering berinteraksi dengan pihak luar desa terutama instansi perguruan tinggi seperti para aktor lokal di Desa Sukadamai (DK, SJ, MS) akan mengutamakan modal moral demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan perubahan tersebut. Sedangkan aktor yang memiliki interaksi lebih sedikit dengan pihak luar seperti para aktor di Desa Purwabakti (WY, AS, MF) akan memberikan solusi atas permasalahan anggaran di desa secara praktis tanpa melakukan modifikasi pelaksanaan peraturan dari pemerintah di atasnya.

## 6.6. Ikhtisar

Berdasarkan identifikasi aktor dan pengukuran pengaruh aktor yang telah dilakukan di kedua desa, terdapat enam aktor lokal dominan dalam pengelolaan keuangan desa. Pada kasus di Desa Purwabakti, aktor lokal dominan tersebut yaitu sekretaris desa (WY), bendahara desa (AS) dan TPK lapang kegiatan pembangunan (MF). Pada kasus di Desa Sukadamai, aktor lokal dominan tersebut yaitu sekretaris desa (DK), bendahara desa (SJ) dan ketua LPM (MS). Rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Purwabakti dimiliki oleh MF sebagai TPK lapang bidang pembangunan dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal ekonomi. Sedangkan rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Sukadamai adalah DK sebagai sekretaris desa dengan kontribusi tertinggi berasal dari modal moral. Seluruh aktor tersebut memiliki tindakan yang berbeda ketika mengatasi persoalan dalam pengelolaan keuangan desa meskipun memiliki sifat tindakan yang sama yaitu tindakan rasional instrumental. Perbedaan tindakan tersebut dipengaruhi oleh habitus aktor berupa pengalaman dan latar belakang aktor. Aktor lokal dominan yang berada di Desa Sukadamai dengan tipe ‘desa-kota’, memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan memiliki pengalaman berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Hal ini mendorong para aktor tersebut untuk bertindak dengan mengutamakan prinsip transparansi dan partisipatif agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan, aktor lokal dominan yang berada di Desa Purwabakti dengan tipe ‘desa’, memiliki latar belakang Pendidikan yang lebih rendah dan pengalaman bekerja sama dengan berbagai pihak luar desa



yang lebih sedikit. Hal tersebut menyebabkan para aktor tersebut sangat ketat mengikuti peraturan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kendala berupa kekurangan dana untuk pembangunan desa dilakukan secara normatif dan birokratis.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## VII PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MAKNA PARTISIPASI DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### 7.1 Makna Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Pandangan Masyarakat

Informan di kedua desa memaknai partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan pengertian yang hampir senada. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dibagi menjadi tiga tahapan besar yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pelaporan dan evaluasi. Bentuk keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa keterlibatan langsung sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa, peserta musyawarah aktif/pasif dan kepemilikan akses terhadap informasi pengelolaan keuangan desa.

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai kegiatan penyusunan rancangan APB Desa dan rencana kegiatan pembangunan desa. Ruang partisipasi yang tersedia bagi masyarakat dalam tahap ini berupa musyawarah tingkat RT hingga tingkat desa seperti musyawarah desa (musdes) dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai kegiatan pengelolaan keuangan desa secara administratif maupun kegiatan pembangunan desa yang menggunakan pendapatan desa. Sedangkan, tahap pelaporan dan evaluasi diartikan sebagai kegiatan pengumpulan bukti pengeluaran dan publikasi laporan penggunaan keuangan desa serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk melihat dan mengevaluasi laporan keuangan tersebut.

Terdapat beberapa bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan tingkat keaktifan dan aksesibilitas terhadap informasi, yaitu: (1) tidak terlibat langsung dan tidak memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan desa, (2) tidak terlibat langsung namun memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan desa tapi tidak memahami informasi, (3) tidak terlibat langsung namun memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan memahami informasi, (4) terlibat secara pasif dan (5) terlibat secara aktif dengan kontribusi ide atau materi (Tabel 16).

Tabel 16 Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020

Tahap	Bentuk Keterlibatan Masyarakat
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan usulan program ke RT/RW/ Dusun/Aparat desa</li> <li>2. Mengikuti muyawarah tingkat RT/RW/Dusun</li> <li>3. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam muyawarah tingkat RT/RW/Dusun</li> <li>4. Mengikuti muyawarah desa 6 bulan sekali</li> <li>5. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam muyawarah desa 6 bulan sekali</li> <li>6. Mengikuti Musrenbangdesa</li> <li>7. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam Musrenbangdes</li> </ol>

Tahap	Bentuk Keterlibatan Masyarakat
	8. Mengikuti sosialisasi sebelum kegiatan dilaksanakan 9. Aktif memberi masukan/sanggahan dalam sosialisasi sebelum kegiatan dilaksanakan 10. Memahami hal yang disampaikan dalam musyawarah
Pelaksanaan	1. Terlibat dalam pembangunan desa baik dibayar atau tidak (sebagai pekerja bangunan, Pelatih pembinaan, dll) 2. Memberikan sumbangan uang 3. Memberikan sumbangan materi bukan uang. Contoh bahan material 4. Memberikan sumbangan konsumsi (makanan/minuman) bagi pekerja 5. Menjadi anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 6. Melakukan permohonan pencairan ke Bendahara Desa 7. Mengelola uang desa yang dicairkan untuk membeli kebutuhan program 8. Mengetahui/mengenal warga yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di salah satu kegiatan. Siapa? 9. Mendapat informasi dari TPK mengenai proses pembangunan yang berjalan 10. Dapat melihat papan program yang berisi informasi mengenai sumber anggaran, besar anggaran, lama pelaksanaan program.
Pelaporan dan Evaluasi	1. Ikut serta mengumpulkan nota/kwitansi pengeluaran selama program/kegiatan 2. Ikut serta menyusun laporan kegiatan/keuangan 3. Dapat melihat prasasti kegiatan setelah kegiatan selesai 4. Dapat melihat laporan keuangan tahunan 5. Memahami laporan keuangan tahunan 6. Dapat melihat poster/banner APBDesa 7. Memahami isi banner/poster APB Desa 8. Dapat memberikan saran terhadap laporan keuangan/kegiatan tahunan desa 9. Dapat memberikan kritik terhadap laporan keuangan/kegiatan tahunan desa 10. Mendapat tanggapan yang baik dari aparat pemerintah desa

Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengoperasionalkan bentuk-bentuk partisipasi tersebut menjadi indikator partisipasi masyarakat yang diberi bobot.

## 7.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai (*lihat* Tabel 17) terlihat bahwa tingkat partisipasi di kedua desa tersebut memiliki kecenderungan yang sama yaitu cenderung pada tingkat rendah. Pada kasus di Desa Purwabakti, tingkat partisipasi dengan persentase paling rendah yaitu pada tahap pelaporan dan evaluasi. Sebesar 76,67 persen responden menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan desa (Tabel 17). Beberapa



responden menyebutkan meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa, masyarakat masih bisa melihat prasasti setelah kegiatan selesai yang berisi informasi mengenai jenis kegiatan, volume, lokasi, anggaran, sumber dana dan pelaksana kegiatan. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat laporan penggunaan anggaran desa dalam setahun dalam bentuk *banner* yang disimpan di kantor desa. Namun, hanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor desa saja yang dapat mengakses *banner* tersebut dengan mudah. Sedangkan, masyarakat yang bertempat tinggal di dusun 4 dan 5, berjarak jauh dari kantor desa sehingga hanya beberapa orang saja yang memiliki keperluan penting ke kantor desa dan dapat mengakses *banner* laporan keuangan desa. Orang yang dapat mengakses *banner* laporan keuangan tersebut juga tidak semuanya memahami isi dari laporan tersebut.

Tabel 17 Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai tahun 2020

Kategori	Tahapan (%)					
	Perencanaan		Pelaksanaan		Pelaporan dan Evaluasi	
	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>
<b>Rendah (1)</b>	73,33	76,67	73,33	63,33	76,67	86,67
<b>Tinggi (2)</b>	26,67	23,33	26,67	36,67	23,33	13,33

Keterangan: <sup>a</sup>=Desa Purwabakti; <sup>b</sup>= Desa Sukadamai

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti memiliki persentase yang sama pada kategori rendah sebesar 73,33 persen (Tabel 17). Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, responden yang tidak ikut serta dalam tahap perencanaan pada umumnya adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dusun 4 dan 5 yaitu dusun yang akses ke balai desa cukup jauh dan sulit sehingga jarang diikutsertakan dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk memberikan usulan kegiatan kepada ketua RT atau RW setempat. Adapun responden yang menilai tingkat partisipasinya dalam tahap perencanaan berada pada kategori tinggi adalah responden yang selalu aktif memberikan usulan kegiatan kepada ketua RT, RW atau dusun setempat dan ikut hadir dalam musyawarah di tingkat dusun ataupun desa serta aktif memberikan saran. Responden ini pada umumnya memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang cukup tinggi sehingga memiliki pemahaman dan kesadaran atas kegiatan desa yang cukup baik.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, memberikan sumbangan dalam bentuk uang, bahan bangunan, konsumsi ataupun lahan pekarangan untuk dijadikan jalan lingkungan. Dari seluruh responden yang ada, tidak ada yang pernah menjadi TPK lapang kegiatan. Mereka menyatakan bahwa mengetahui kegiatan pembangunan dari RT setempat. Adapun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selalu

membuat papan program yang berisi informasi mengenai sumber anggaran, besar anggaran, lama pelaksanaan program. Namun, Sebagian besar responden merasa tidak pernah membaca informasi yang terdapat pada papan tersebut secara mendetail. Hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa. Sejalan dengan pernyataan dari salah seorang informan yang berasal dari aparat pemerintah desa menyatakan bahwa, hal yang penting bagi masyarakat adalah kebutuhan pembangunan di wilayah tempat tinggalnya berjalan dengan baik dan memiliki kualitas yang baik. Pada umumnya, masyarakat juga tidak memahami hal-hal yang sudah disampaikan dan didiskusikan dalam musyawarah jika tidak berkenaan dengan kebutuhan dirinya atau tempat tinggalnya.

Tingkat partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sukadamai memiliki nilai yang hampir sama dengan tingkat partisipasi di Desa Purwabakti. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa memiliki persentase yang tinggi pada kategori rendah (Tabel 17). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan dirinya hanya sedikit terlibat atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan, beberapa responden menyatakan menghadiri musyawarah desa dan aktif memberikan pendapat. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dirinya mengikuti musyawarah namun tidak aktif memberikan saran dan sanggahan. Adapun beberapa responden yang berjenis kelamin perempuan merasa tidak pernah diundang untuk menghadiri musyawarah di desa karena biasanya musyawarah desa hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan perwakilan perempuan. Sebagian responden perempuan juga memiliki persepsi bahwa musyawarah di tingkat RT hingga desa biasanya hanya diikuti oleh para laki-laki saja sehingga responden perempuan tidak ikut serta musyawarah dan tidak mengetahui hasil musyawarah tersebut. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada aparat pemerintah desa, informan yang berasal dari aparat pemerintah desa menyatakan bahwa peserta musyawarah yang biasa diundang dari perempuan adalah kader posyandu dan perwakilan perempuan. Perwakilan ini yang biasanya bergantian setiap tahunnya. Oleh karena itu, informan tersebut mengakui bahwa pasti banyak pihak perempuan yang tidak ikut serta dalam musyawarah karena jumlahnya yang dibatasi agar musyawarah dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Adapun hasil musyawarah seharusnya disampaikan lagi oleh para ketua RT dan ketua RW atau para peserta musyawarah kepada masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah. Selain itu, program Sapa Warga yang diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 juga dapat menjadi media untuk menyebarkan hasil musyawarah di tingkat desa kepada masyarakat dalam lingkup RW ataupun sebaliknya menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke tingkat desa. Program Sapa Warga di Desa Sukadamai sudah berjalan dengan efektif karena RW didampingi oleh koordinator yang dapat mengoperasikan gawai yang tersedia. Di Desa Purwabakti, salah satu informan menyatakan bahwa program Sapa Warga belum dapat berjalan dengan maksimal karena RW yang tidak bisa menggunakan gawai tersebut.



Pada tahap pelaksanaan pengelolaan desa, sebagian besar responden tidak mengetahui proses administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa karena seluruh responden tidak ada yang menjadi TPK lapang. Namun, mereka banyak mengetahui pelaksanaan pembangunan dari ketua RT dan RW setempat. Selain itu, sama seperti responden di Desa Purwabakti, partisipasi masyarakat di Desa Sukadamai juga sebagian besar berupa sumbangan uang, materi atau konsumsi untuk pekerja program pembangunan. Tingkat partisipasi di Desa Sukadamai pada tahap pelaksanaan lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi di Desa Purwabakti dikarenakan pemerintah Desa Sukadamai membuka ruang partisipasi baru berupa sosialisasi sebelum kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat di wilayah RT yang akan dilaksanakan pembangunan. Ruang partisipasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengetahui dan memahami pembanguann yang akan dilaksanakan meliputi biaya, waktu pelaksanaan dan pekerja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dari kasus ini terlihat bahwa tindakan pemerintah desa terutama para aktor lokal dominan sangat menentukan keterlibatan masyarakat lokal di dalamnya.

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaporan evaluasi termasuk pada kategori rendah yaitu dengan persentase sebesar 86,67 persen (Tabel 17). Persentase ini juga lebih besar dibandingkan persentase tingkat partisipasi masyarakat di Desa Purwabakti pada tahap pelaporan dan evaluasi. Hal ini terjadi karena tidak ada responden yang menjadi TPK lapang sehingga tidak mengetahui proses pelaporan secara adminisitratif. Responden juga menyatakan bahwa mereka dapat melihat *banner* laporan penggunaan keuangan desa selama satu tahun namun tidak memahami dan tidak menyimaknya karena hanya sesekali datang ke kantor desa untuk keperluan yang lain. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa dapat terlaksana dengan baik secara fisik sehingga mereka tidak banyak memperhatikan laporan keuangan tahunan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan yang berasal dari aparatur pemerintahan desa bahwa masyarakat desa pada umumnya merasa cukup dengan hasil pembangunan fisik yang baik dan tidak mudah rusak. Jika hasil tersebut dinilai baik, maka masyarakat tidak akan mempermasalahkan soal keuangan. Namun, jika ada hasil pembangunan yang dinilai jelek, maka masyarakat akan mempermasalahkan soal keuangan desa. Sejauh ini, masyarakat menilai positif pembangunan yang telah dilaksanakan. Bahkan mereka menilai kantor desa saat ini adalah kondisi termewah dibandingkan dengan kondisi kantor desa yang dipimpin oleh kepala desa periode-periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat partisipasi di kedua desa, terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa yang sudah memiliki peraturan ketat dari pemerintah pusat akan memiliki ruang partisipasi masyarakat yang lebih sedikit dan terbatas. Namun, para aktor lokal yang dominan juga dapat membuka ruang partisipasi baru bagi masyarakat seperti sosialisasi pra-kegiatan yang dilakukan di Desa Sukadamai dan pengutamaan pekerja lokal dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai.

### 7.3 Ikhtisar

Masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai memaknai partisipasi sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut berada pada kategori rendah karena ruang partisipasi masyarakat hanya berada di dalam musyawarah. Sedangkan, TPK dan tim khusus hanya terdiri dari beberapa perwakilan masyarakat saja. Adapun hasil musyawarah maupun laporan keuangan tahunan hanya dapat disadari dan dipahami oleh sebagian masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap keuangan dan program pembangunan di desa. Ruang partisipasi yang disediakan bagi masyarakat juga sangat bergantung pada tindakan aktor. Aktor di Desa Sukadamai yang merupakan desa tipe 'desa-kota' memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendorong mereka untuk membuka ruang partisipasi yang lebih banyak untuk masyarakat. Meskipun begitu, Sebagian besar responden terutama yang berjenis kelamin perempuan merasa belum pernah diundang atau diikuti dalam kegiatan musyawarah.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



## VIII PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MAKNA EFEKTIVITAS DAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### 8.1 Makna Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Masyarakat

Terdapat perbedaan makna efektivitas pengelolaan keuangan desa antara masyarakat dengan aparaturnya pemerintahan desa. Menurut masyarakat, efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah ukuran tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh unsur masyarakat desa di berbagai bidang pembangunan desa. Artinya, semakin efektif pengelolaan keuangan desa, maka kegiatan pembangunan di desa semakin berhasil direalisasikan dan makin terasa manfaatnya bagi masyarakat. Bagi aparaturnya pemerintahan desa khususnya aktor yang melakukan pengelolaan keuangan desa secara langsung, pengelolaan keuangan desa yang efektif adalah kondisi ketika seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa berhasil dilakukan dengan baik disertai surat pertanggungjawaban yang lengkap dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari inspektorat tingkat kabupaten menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa tersebut selesai dan tidak bermasalah. Perbedaan makna antara masyarakat dan pemerintah dikarenakan terbatasnya pengelola keuangan desa sehingga masyarakat umum hanya dapat menilai pengelolaan keuangan desa dari laporan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Berdasarkan makna efektivitas dari aparaturnya pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa di kedua desa sudah dinilai efektif karena seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan surat pertanggungjawaban yang lengkap sehingga LHP yang keluar juga bernilai baik. Bahkan, pada tahun 2019, Desa Purwabakti pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai desa dengan administrasi pelaporan dan perencanaan terbaik di Jawa Barat.

Untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan desa, pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan makna pengelolaan keuangan desa dari masyarakat di setiap bidang pembiayaan keuangan desa. Bidang pembiayaan keuangan desa merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Ruang lingkup program dalam bidang pembangunan desa meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata. Bidang pembinaan masyarakat meliputi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan kegamaan, kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparaturnya desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, serta perdagangan dan perindustrian. Terakhir, meliputi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan



keadaan mendesak. Penilaian efektivitas meliputi ketersediaan dan kebermanfaatan kegiatan dalam setiap bidang tersebut.

## 8.2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan di Desa Purwabakti, sebagian besar responden menilai tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa pada kategori rendah untuk keempat bidang pembiayaan. Terutama bidang pemberdayaan masyarakat, seluruh responden (100 persen) menilai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa pada kategori rendah (Tabel 18). Responden menilai bahwa pemerintah desa tidak pernah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, dukungan modal bagi usaha kecil dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau pun ada, seluruh responden menyatakan tidak pernah mengikuti dan tidak merasakan manfaatnya.

Tabel 18 Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sesuai bidang kegiatan pada tahun 2020

Kategori	Bidang							
	Pembangunan Desa (%)		Pembinaan Masyarakat (%)		Pemberdayaan Masyarakat (%)		Penanggulangan Bencana (%)	
	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>	A <sup>a</sup>	B <sup>b</sup>
<b>Rendah (1)</b>	76,67	56,67	66,67	40,00	100,00	83,33	83,33	20,00
<b>Tinggi (2)</b>	23,33	43,33	33,33	60,00	0,00	16,67	16,67	80,00

Keterangan: <sup>a</sup>=Desa Purwabakti; <sup>b</sup>= Desa Sukadamai

Pada bidang pembangunan, sebanyak 23,33 persen menilai bahwa pada saat pemerintahan kepala desa saat ini, pembangunan fisik lebih terlihat seperti pembangunan jalan dan perbaikan kantor kepala desa. Sedangkan sebelumnya, Desa Purwabakti tidak memiliki kantor desa yang tetap melainkan berpindah setiap periode kepemimpinan sesuai dengan rumah kepala desa yang menjabat. Hal ini menyebabkan berbagai arsip dan dokumen dalam satu periode pemerintahan kepala desa tidak pernah dapat diserahkan ke periode setelahnya. Manfaat pembangunan tersebut ternyata hanya dirasakan oleh sebagian kecil responden yang bertempat tinggal di sekitar kantor Desa Purwabakti. Sebesar 76,67 persen responden Desa Purwabakti menilai belum merasakan manfaat dari adanya pembangunan desa karena faktor luas wilayah desa dan akses yang sulit sehingga di beberapa lokasi seperti dusun 4 dan 5 masih sedikit pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. Hal ini yang menyebabkan efektivitas pengelolaan keuangan desa pada bidang pembangunan desa masih tergolong rendah (Tabel 18).

Pada bidang pembinaan masyarakat, sebesar 66,67 persen responden menilai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa pada kategori rendah (Tabel 18). Hal ini terjadi karena responden menilai pemerintah desa tidak melakukan kegiatan berkenaan dengan pembinaan masyarakat. Adapun kegiatan ronda atau siskamling adalah kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat. Selain itu, dalam hal budaya seperti adanya kampung wisata di Kampung Cisalada merupakan wisata yang diinisiasi oleh masyarakat lokal. Sebesar 33,33 persen menilai efektivitas

pengelolaan keuangan desa pada kategori tinggi adalah karena pemerintah desa pernah melakukan kegiatan keagamaan islam dan memberikan dukungan terhadap pembentukan kelembagaan yaitu badan usaha milik desa (Bumdes). Salah seorang informan yang juga pengurus Bumdes menyatakan bahwa Bumdes baru bisa didirikan pada tahun 2018 dan berhasil mendapatkan bantuan mesin kopi dari Gubernur Jawa Barat karena konsistensi dalam menjalankan budidaya tanaman kopi hingga ke tahap pengolahan.

Pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa sebagian besar responden juga menilai efektivitas pengelolaan keuangan desa pada kategori rendah. Sebesar 83,33 persen (*lihat* Tabel 18) responden menilai bahwa bantuan yang diberikan pihak desa tidak tepat sasaran dan sedikit dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan persentase belanja desa pada bidang penanggulangan bencana, mendesak dan darurat sebesar 1,09 persen (Tabel 10) atau sebesar 30 juta rupiah yang merupakan persentase paling kecil dibandingkan ketiga bidang lainnya. Anggaran yang terbatas ini menyebabkan program pada bidang penanggulangan bencana tidak dapat dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat.

Berbeda dengan kasus di Desa Purwabakti, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sukadamai cenderung lebih tinggi dibandingkan Desa Purwabakti. Hal ini dibuktikan oleh persentase kategori tinggi pada keempat bidang di Desa Sukadamai selalu lebih tinggi dibandingkan Desa Purwabakti. Selain itu, efektivitas pengelolaan keuangan desa pada bidang pembinaan masyarakat dan penanggulangan bencana di Desa Sukadamai dinilai oleh sebagian besar responden pada kategori tinggi (Tabel 18).

Penilaian responden tertinggi ditunjukkan oleh persentase sebesar 80,00 persen pada kategori tinggi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (Tabel 18). Pemerintah desa dinilai sudah bersikap cepat tanggap dalam menanggulangi bencana dan keadaan darurat desa. Mobil siap siaga desa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor juga selalu bisa digunakan oleh warga ketika membutuhkan tumpangan yang bersifat darurat seperti ke rumah sakit. Selain itu, bantuan berupa uang tunai ataupun sembako selalu diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana longsor, angin badai atau banjir di wilayah Desa Sukadamai. Dalam masa pandemi covid-19 juga, pemerintah desa dengan sigap membagikan bantuan uang tunai dari pusat kepada masyarakat yang terdampak. Masyarakat juga merasa tindakan pemerintah desa dilakukan secara bergiliran sehingga manfaat dapat dirasakan secara merata.

Selain pada bidang penanggulangan bencana, responden juga menilai efektivitas pengelolaan keuangan desa pada kategori tinggi yaitu pada bidang pembinaan masyarakat sebesar 60,00 persen (Tabel 18). Sebagian besar responden merasakan manfaat dari pelaksanaan pelatihan hansip, siskamling. Pemerintah desa juga mendukung kegiatan kebudayaan seperti perlombaan menghias tumpeng, pencak silat dan kegiatan perayaan keagamaan. Pemerintah desa juga selalu mengadakan kegiatan senam umum dan senam ibu hamil sebelum adanya pandemi covid-19. Sebesar 40,00 persen responden yang menilai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa pada bidang pembinaan masyarakat pada kategori

rendah (*lihat* Tabel 18) beralasan bahwa pemerintah desa belum berhasil memperkuat kelembagaan karang taruna yang ada di desa. Meskipun di kantor desa sudah disediakan sekretariat karang taruna, namun program karang taruna belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, responden yang berasal dari kalangan pemuda juga menilai bahwa kebutuhan akan lapangan sepak bola masih belum terwujud meskipun sudah berkali-kali memberikan usulan kepada pemerintah desa.

Pada bidang pembangunan, persentase antara kategori rendah dan tinggi tidak memiliki selisih yang jauh (Tabel 18). Hal ini terjadi karena sebagian besar responden menilai bahwa pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Sukadamai sudah baik terutama pembangunan kantor desa yang dinilai sangat baik dibandingkan sebelumnya. Namun, responden belum merasakan adanya manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan dan pariwisata. Selain itu, salah seorang responden juga menyatakan kecewa atas dilaksanakannya pembangunan perumahan di atas lahan pertanian yang dirasa belum mendapatkan izin dari seluruh masyarakat yang terdampak dari adanya pembanguna tersebut.

Sebesar 83,33 persen responden menilai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa bidang pemberdayaan masyarakat pada kategori rendah (Tabel 18). Hal ini terjadi karena responden merasa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat desa. Selain itu, pelatihan yang ada juga seringkali tidak berkelanjutan sehingga manfaat yang dirasakan tidak mencapai peningkatan taraf ekonomi keluarga. Responden juga tidak merasakan adanya kemudahan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat banyak yang mencari kerja di luar desa bahkan luar kota. Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah desa juga hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha sebelumnya sehingga masyarakat yang belum punya usaha, belum bisa menerima bantuan modal tersebut.

Jika melihat penilaian masyarakat mengenai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa (Tabel 18), terdapat keselarasan dengan persentase belanja desa sesuai bidang yang dicantumkan dalam RKP Desa (Tabel 10). Persentase anggaran yang kecil akan berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan desa pada bidang tersebut karena manfaat pembangunan tidak dirasakan secara merata atau tidak signifikan. Oleh karena itu, tambahan pendapatan desa dari pihak lain seperti CSR dapat membantu kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini sejalan dengan hasil studi Kolopaking *et al.* (2019) mengenai sinergi dengan pihak swasta untuk mengatasi permasalahan kekurangan anggaran untuk kegiatan pembangunan di desa. Alokasi penganggaran sesuai bidang tersebut bergantung pada tindakan para aktor dan tim lain dalam menyusun RKP Desa. Kecenderungan aktor untuk memperbesar alokasi anggaran pada salah satu bidang akan menyebabkan anggaran untuk bidang yang lain berkurang dan semakin sedikit masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya program desa.



### 8.3 Ikhtisar

Terdapat perbedaan makna efektivitas pengelolaan keuangan desa menurut pandangan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa. Untuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat, maka pengukuran tingkat efektivitas dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan makna menurut pandangan masyarakat. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dimaknai oleh masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang dinilai dari ketersediaan program pembangunan dan kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Purwabakti cenderung rendah pada keempat bidang. Sedangkan, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Sukadamai cenderung tinggi terutama pada bidang pembinaan masyarakat dan penganggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan besar alokasi anggaran yang direncanakan dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan hasil tindakan dari para aktor lokal dominan desa. Selain itu, keterlibatan pihak luar desa dalam tahap perencanaan seperti kerja sama yang dilakukan antara Desa Sukadamai dengan Institut Pertanian Bogor menyebabkan proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan lebih partisipatif sehingga kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## IX HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Hasil uji korelasi *rank spearman* terhadap variabel tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar  $-0,304$  (Tabel 19). Artinya, tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa memiliki hubungan yang lemah dan tidak searah. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat secara langsung hanya dibatasi pada beberapa ruang partisipasi saja. Aktor dominan lokal yang memegang penuh pengelolaan keuangan desa sehingga tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa bergantung pada integritas dan kinerja para aktor lokal dominan tersebut. Selain itu integritas dan kinerja para aktor, besaran anggaran untuk membiayai program desa juga memiliki kaitan dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 19 Hasil uji korelasi *rank spearman* tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Purwabakti tahun 2020

			Tingkat Partisipasi	Tingkat Efektivitas
Spearman's rho	Tingkat Partisipasi	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	-.304
		Sig. (2-tailed)	.	.103
		N	30	30
Tingkat Efektivitas	Tingkat Partisipasi	<i>Correlation Coefficient</i>	-.304	1.000
		Sig. (2-tailed)	.103	.
		N	30	30

Tabel 20 Hasil uji korelasi *rank spearman* tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sukadamai tahun 2020

			Tingkat Partisipasi	Tingkat Efektivitas
Spearman's rho	Tingkat Partisipasi	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	.596**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	30	30
Tingkat Efektivitas	Tingkat Partisipasi	<i>Correlation Coefficient</i>	.596**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berbeda dengan Desa Purwabakti, hasil uji korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Sukadamai justru memiliki nilai positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,596 (Tabel 20). Artinya, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukadamai cukup memiliki hubungan yang searah dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat terjadi karena para aktor lokal dominan di Desa Sukadamai membuka ruang partisipasi yang lebih banyak dibandingkan ruang partisipasi di Desa Purwabakti. Salah satunya adalah ruang partisipasi berupa sosialisasi pra-kegiatan di setiap wilayah yang akan dilaksanakan pembangunan. Selain itu, Desa Sukadamai juga sering melakukan kerja sama dengan pihak luar desa salah satunya perguruan tinggi di Bogor salah satunya perencanaan kegiatan pembangunan desa secara partisipatif. Pada ruang ini, masyarakat berkesempatan untuk terlibat langsung memberikan aspirasi terhadap pembangunan desa sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya.

Terlepas dari ruang-ruang yang disediakan para aktor bagi masyarakat untuk berpartisipasi, pada kenyataannya, masyarakat lebih menilai efektivitas dari keberhasilan dan manfaat yang dirasakan dari adanya kegiatan pembangunan di desa. Meskipun masyarakat sedikit dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa, jika manfaat yang dirasakan oleh masyarakat cukup besar, masyarakat akan menilai program tersebut telah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang memiliki hubungan lebih kuat dengan tingkat efektivitas pengelolaan desa selain partisipasi, salah satunya adalah besaran anggaran bagi program pembangunan tersebut.

## 9.1 Ikhtisar

Pada kasus di Desa Purwabakti, hubungan antara tingkat partisipasi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa memiliki koefisien korelasi sebesar -0,304. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa memiliki hubungan yang lemah dan tidak searah. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat secara langsung hanya dibatasi pada beberapa ruang partisipasi saja. Sedangkan, koefisien korelasi antara tingkat partisipasi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Sukdamai sebesar 0,596. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sukadamai cukup memiliki hubungan yang searah dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat terjadi karena para aktor lokal dominan di Desa Sukadamai membuka ruang partisipasi yang lebih banyak dibandingkan ruang partisipasi di Desa Purwabakti. Salah satunya adalah ruang partisipasi berupa sosialisasi pra-kegiatan di setiap wilayah yang akan dilaksanakan pembangunan dan perencanaan pembangunan yang disusun bersama masyarakat dengan adanya fasilitasi dari salah satu pusat studi di Institut Pertanian Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## X SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan identifikasi aktor, pengukuran pengaruh aktor dan tindakan sosial aktor yang telah dilakukan di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai, dapat disimpulkan bahwa seluruh aktor dominan dalam pengelolaan keuangan desa menjalankan perannya berlandaskan pada peraturan dan kebijakan yang ada sehingga seluruh tindakan para aktor termasuk kategori tindakan rasional instrumental. Latar belakang dan pengalaman aktor memengaruhi tindakan para aktor dan modal dominan yang digunakan untuk memperoleh kepuasan dari masyarakat dalam rangka mempertahankan jabatan saat ini. Aktor dengan rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Purwabakti (desa tipe ‘desa’) dimiliki oleh MF sebagai TPK lapang bidang pembangunan dengan modal dominan yaitu modal ekonomi. Sedangkan rata-rata indeks pengaruh tertinggi di Desa Sukadamai (desa tipe ‘desa-kota’) adalah DK sebagai sekretaris desa dengan modal dominan yang digunakan adalah modal moral.

Masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai memaknai partisipasi sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat di kedua desa tersebut berada pada kategori rendah karena ruang partisipasi masyarakat berada pada satu bentuk partisipasi yaitu musyawarah. Tindakan para aktor lokal dominan menentukan terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat. Aktor yang memiliki pengalaman lebih luas akan dapat membuat ruang partisipasi baru bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam tahapan pengelolaan keuangan desa.

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dimaknai oleh masyarakat di Desa Purwabakti dan Desa Sukadamai sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang dinilai dari ketersediaan program pembangunan dan kebermanfaatan program tersebut bagi masyarakat. Aktor yang dapat mengarahkan program pembangunan dengan tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat akan memberikan manfaat yang lebih besar dan luas bagi masyarakat sehingga tingkat efektivitasnya cenderung tinggi.

Berdasarkan hasil uji korelasi *rank spearman*, tingkat partisipasi masyarakat tidak memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas di Desa Purwabakti (desa tipe ‘desa’) karena ruang partisipasi yang tersedia hanya pada bentuk musyawarah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sedangkan di Desa Sukadamai (desa tipe ‘desa-kota’), para aktor membuka ruang partisipasi baru terutama pada tahap perencanaan dengan fasilitasi pihak luar (akademisi) sehingga tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Desa Sukadamai. Dengan demikian, karakteristik desa dan latar belakang aktor yang berbeda akan memberikan pengalaman yang berbeda pada aktor dan memengaruhi keputusan aktor dalam bertindak. Tindakan para aktor lokal dominan tersebut akan berdampak pada ketersediaan ruang partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat yang pada akhirnya menentukan hubungan dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini belum mengukur secara statistik variabel-variabel selain tingkat partisipasi yang memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi variabel-variabel apa saja yang berhubungan dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini tidak membandingkan pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan

makna efektivitas dari aparatur desa dan makna dari masyarakat. Selanjutnya, perlu dibahas secara mendalam mengenai perbedaan makna efektivitas pengelolaan keuangan desa dan pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dari sudut pandang masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

78



IPB University  
Bogor Indonesia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung IGN. 2006. *Statistika Penerapan Model Rerata-sel multivariat dan Model Ekonometri dengan SPSS*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Anto RP. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di Kota Kendari. JKPPP [Internet]. [Diunduh 2019 Jul 3]; 3 (3) : 93 – 105. Tersedia di : <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/962/1023>
- Barlan ZA, Hakim L, Sjaf S. 2019. *Instrumen Memahami Desa*. Bogor: IPB Press.
- Bourdieu P. 1993. *The Field of Cultural Production*. Johnson R, editor. United States: Columbia University Press.
- Bourdieu P. 2005. *The Social Structures of The Economy*. Cambridge UK: Polity Press.
- Bourdieu P. 2008a. *Key Concepts*. Grenfell M, editor. Stocksfield, England: Acumen.
- Bourdieu P. 2008b. The Forms of Capital. Di dalam: *Readings in Economic Sociology*. New York: Routledge.
- Bourdieu P. 2013. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Bourdieu P. 2018. The forms of capital. Di dalam: *The Sociology of Economic Life, Third Edition*.
- BPS Jabar. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019. Bandung, Jawa Barat.
- Bumulo S, Adiwibowo S, Sjaf S. 2018. The Dynamics of Land Tenure in Multi-ethnic Society. *Sodality J Sociol Pedesaan*. 5(3). doi:10.22500/sodality.v5i3.19395.
- Casey KL. 2008. Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory. *Crit A Worldw Student J Polit*.(January 2005):1–25.
- Coser LA. 1977. *Master of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. Second Edition. New York: Harcourt Brace Jovanovic. Inc.
- Denzin NK dan Lincoln YS. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djohani R. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. [Internet]. [Diunduh 2019 Jul 5]. Tersedia di : <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2015/02/Panduan-Penyelenggaraan-Musrenbang-Desa-FPPM.pdf>
- Eko S, Khasanah TI, Widuri D, Suci, Handayani, Handayani N, Qomariyah P, Akxa S, Hastowiyono, Suharyanto, *et al*. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fadli M. *et.al*. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Cetakan kedua. Malang : Universitas Brawijaya Press.

- Fletcher R. 2017. Environmentalism unbound: Multiple governmentalities in environmental Politics. *Jurnal Geoforum*. 85 (2017): 311–315.
- Gani FS. 2015. Tahapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP) di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. JAP [Internet]. [Diunduh 2019 Jul 5] 5(1). Tersedia pada : <http://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/1060/294>
- Gay LR, Mills GE, Airasian P. 2012. *Educational Research: Competencies for Analysis and Applications*. United States: Pearson Education.
- Ife J dan Tesoriero F. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irwansyah, Sunito S, Sjaf S. 2016. Modal jaro dalam arena politik lokal : Studi kasus di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. JSR. 11(1) : 81-108.
- Jordaan DW. 2017. Aantekeninge / Notes The open society : What does it really mean ? *Jure.*:396–405. doi:<http://dx.doi.org/10.17159/2225-7160/2017/v50n2a11>.
- Kamahi U. 2017. Teori kekuasaan Michel Foucault: tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Al-Khitabah*. 3(1): 117 – 133.
- Kambey E. 2017. Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif* [Internet]. [Diunduh 2019 Jul 5]. 1(1). Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16756>
- Kane J. 2001. *The Politics of Moral Capital*. United Kingdom: University Press, Cambridge.
- [KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- [KEMENDAGRI RI] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta (ID) : KEMENDAGRI RI.
- [KEMENDAGRI RI] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta (ID) : KEMENDAGRI RI.
- [KEMENDES PDPTT RI] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Jakarta (ID) : KEMENDES PDPTT RI.

[KEMENDES PD TT RI] Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta (ID) : KEMENDES PD TT RI.

[KEMENKEU RI] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta (ID) : KEMENKEU RI

Kolopaking LM, Septianto M, Ambarita E. 2019. The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities. *Sodality J Sosiol Pedesaan*. 7(2):102–109. doi:<https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.26164>.

Lanjouw P, Quizon J, Sparrow R. 2001. Non-agricultural earnings in peri-urban areas of Tanzania: Evidence from household survey data. *Food Policy*. 26(4):385–403. doi:10.1016/S0306-9192(01)00010-0.

Lin N. 2001. *Social Capital: Structural Analysis in the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University.

Maliki Z. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Meutia I dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa. *JAM*. (8) 2 : 227 – 429.

Miles MB, Huberman M, Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed ke-3. USA: SAGE Publication.

Muhlis A dan Norkholis. 2016. Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Buhkori. *Jurnal Living Hadis*. 1 (2).

Mustanir A dan Abadi P. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik* [Internet]. [Diunduh 2019 Jul 7]. 5(2). Tersedia pada: [journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/4347/3986](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/download/4347/3986)

Nasdian FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Neveu E. 2018. Bourdieu's capital (s): Sociologizing an economic concept. Di dalam: Sallaz TM and JJ, editor. *The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 347–371.

Nikolaus O. 2014. Hubungan antara kepemimpinan tipe demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. *JAPB* [Internet]. [diunduh 2019 Jul 31]; 1(1). Tersedia pada: <http://repository.ut.ac.id/672/1/41546.pdf>

Olii RR, Mahpudz A, Imran. 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan

Palu Selatan pada Pilkada Kota Palu Tahun 2015. *Edu Civ Media Publ Prodi PPKN*. 6(1):42–52.

Patilima H. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.

Ra'is DU. 2017. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*. 7(1):29–46.

Ritzer G dan Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Ed ke-6 Santoso TWB, editor. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ritzer G dan Goodman DJ. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rompas JS, Pati AB, Lengkong JP. 2017. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*. 1(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16654>

Rostuti EE. 2018. Pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Jurusan Ilmu Administrasi Publik* [Internet]. diunduh 2019 Jul 31]; Tersedia pada :  
[ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/download/6/3010](https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/download/6/3010)

Sjaf S. 2014. *Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sjaf S. 2017. Kanalisasi politik etnik di makassar. *Sodality J Sociol Pedesaan*.:92–97.

Sjaf S. 2019a. *Involusi Republik Merdesa*. Ed ke-1 Al-Mustofa O, editor. Bogor: IPB Press.

Sjaf S. 2019b. Mengukur Pengaruh Aktor dengan Indeks Casey. (c):1–5.

Soegiharto S dan Ariyanto N. 2019. *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)* [Internet]. Jakarta : Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dapat diunduh di : <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Buku-5-Teknik-Penyusunan-RKP-Desa.pdf>

Soekanto S. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar (cetakan 36)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Ed ke-2. Bandung, Jawa Barat: CV Alfabeta.

Triani NNA, Handayani S. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *J Akunt Multiparadigma*. 9(1):136–155. doi:10.18202/jamal.2018.04.9009.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif* [Internet]. 1(1): 51-64.

Tumbel SM. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa

Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *J Polit.* 6(1):1–21.

Widhiastini NW, Subawa NS, Sedana N, Permatasari NPI. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Adm.* 8(1):1–11. doi:10.31314/pjia.8.1.1-11.2019.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Kegiatan	Bulan ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Proposal	■	■	■	■														
Kolokium					■													
Revisi Proposal						■												
Pengumpulan Data Lapangan						■	■											
Pengolahan dan Analisis Data								■	■									
Penyusunan Draft Tesis								■	■									
Publikasi Ilmiah										■	■	■	■	■	■			
Seminar Hasil											■	■						
Penulisan Tesis											■	■	■	■	■	■		
Sidang Tesis																	■	
Perbaikan Tesis																		■
Penerbitan SKL																		■

Hak cipta milik IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## Lampiran 2 Kajian terdahulu

Tema Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Temuan Penelitian
<b>Pengelolaan Keuangan Desa</b>	Edwien Kambey	Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara	Jurnal eksekutif Vol 1, No 1 (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja</li> <li>- Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Mantehage 1 Karegesan tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan</li> <li>- Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang</li> <li>- Musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif</li> </ul>
	Eti Elin Rostuti	Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan	Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Haluoleo, 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah desa yang aktif dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan akan membuat masyarakat memiliki inisiatif yang tinggi untuk ikut terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa</li> <li>- Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kualitas pembangunan yang dihasilkan juga akan semakin tinggi</li> <li>- Biaya perencanaan pembangunan yang minim menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena kebutuhan masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik</li> </ul>
	Inten Meutia, Liliana	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 336-352	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Ketimpangan pelaksanaan pembangunan terjadi karena desa tidak mengikuti aturan 70:30 sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM</li> </ul>
	Ni Nyoman Alit Triani dan Susi Handayani	Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 1, April 2018, Hlm 136-155	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa-desa lokasi penelitian sudah sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>- Aspek transparansi sudah dipenuhi yang dibuktikan dengan adanya baliho yang berisi mengenai informasi APBDesa, prasasti dan papan informasi mengenai pembangunan</li> <li>- Pendamping desa yang ada tidak menguasai keahlian terkait pengelolaan keuangan desa sehingga malah menjadi beban desa</li> </ul>

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Jufri Frani Rompas; Agustinus B. Pati; Johnny P. Lengkong	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa	Jurnal Eksekutif Vol 1, No 1 (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Dana yang besar kepada Desa berdampak positif bagi perkembangan desa khususnya selama pembangunan fisik desa, namun dalam pengelolaan keuangan desa, belum diikuti dengan kualitas aparat pelaksana, kebijakan baru dan aturan pendukung yang baru</li> <li>- sumber munculnya konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan karena adanya kepentingan untuk memperoleh material lebih besar</li> <li>- Politisasi anggaran terjadi dimana ada mata anggaran yang tidak melalui proses perencanaan partisipasi masyarakat</li> <li>- Setiap desa memiliki aktor dominan</li> <li>- Ruang publik bagi masyarakat yang tersedia dalam pengelolaan keuangan desa berupa Musrenbangdes. Namun usulan masyarakat tersebut kalah bertarung dengan agenda institusi (Pekab, Pemdes dan BPD serta elit lokal) yang mempunyai kepentingan tersendiri</li> </ul>
Thomas	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	e-journal Pemerintah an Integratif, 2013,1(1): 51-64	Hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang diantaranya karena rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD
Lala M. Kolopakin g, Marzuqo Septianto, Ervan Ambarita	Sinergi pengelolaan desa membangun dengan kegiatan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus PT. Indonesia Power, Gunung Salak)	Jurnal Sodality siap terbit 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi dengan CSR dapat menjadi solusi masalah minimnya dana desa yang tersedia bagi pembangunan</li> <li>- Perbaiki mekanisme <i>corporate social responsibility</i> berdasarkan aspirasi masyarakat yang bekerjasama dengan multipihak dari tahap perencanaan hingga evaluasi di tingkat desa hingga kabupaten menyebabkan bantuan dapat terekam dan terukur manfaatnya</li> </ul>
Nurul Syaspri Akhdiyanti	Strategi penguatan partisipasi dan kapasitas desa dalam pengelolaan alokasi dana desa	Tesis Institut Pertanian Bogor 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan partisipasi dan kapasitas desa yang timpang juga akan menghasilkan tata kelola yang timpang sehingga manfaat dana desa hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu</li> <li>- Harus dianalisis terlebih dahulu yang selama ini mendominasi, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang tidak merasakan manfaat</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi inti untuk memperkuat partisipasi dan kapasitas desa dalam pengelolaan ADD meliputi: (a) meningkatkan ADD berdasarkan amanat 82 undang-undang; (b) mewujudkan program unggulan desa berdasarkan hasil MUSRENBANG; (c) meningkatkan kapasitas desa melalui program ADD dan kemitraan dengan CSR PT NNT; dan (d) memaksimalkan peran <i>stakeholder</i> (terutama Anggota DPRD) dalam melakukan advokasi kebijakan dan anggaran.</li> </ul>
	Ahmad Mustanir, Partisan Abadi	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang	<p>Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat berada dalam kategori kurang berpartisipasi pada kegiatan musrenbang disebabkan karena Komunitas Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari Komunitas Towani Tolotang</li> <li>- Faktor sosial budaya seperti norma-norma, nilai kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, usia, jenis kelamin, dan simbol-simbol yang ada dalam masyarakat berada dalam kategori berpengaruh dan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam musrenbang</li> </ul>
	Satria Mentari Tumbel	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	<p>Tesis Unsrat 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang rendah menyebabkan rendahnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</li> <li>- Faktor yang mempengaruhi partisipasi : kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa dan tingkat pendidikan masyarakat</li> </ul>
	Lukmanul Hakim	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang	<p>Jurnal Politikom Indonesian a, Vol. 2 No. 2 November 2017</p> <p>Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat merasa puas</p>
<b>Tindakan Aktor</b>	Alis Muhlis dan Norkholis	Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab	<p>Jurnal Living Hadis, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasar tipe tindakan tradisional, pelaku tradisi (Ponpes At-taqwa) ingin melestarikan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh Ponpes Sunni Salafiyah Pasuruan Jawa Timur</li> <li>- Tindakan Afektif, menunjukkan bahwa pelaku memiliki ikatan emosional terhadap tokoh</li> </ul>

	Mukhtashar Al-Bukhari		(salafu as-shalih) dan waktu pelaksanaan (Bulan Rajab). - Rasionalitas instrumental, Ponpes At-Taqwa secara sadar mampu melakukan tradisi tersebut karena memiliki kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun aspek finansial. - Rasionalitas nilai, mereka ingin mendapatkan barokah dengan cara meniru dan melestarikan tradisi dari para ulama salafus as-shalih.
Yunas Kristiyanto	Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam terhadap Komunitas Punk	Jurnal Sosial Politik, Universitas Airlangga	- Terdapat beberapa tipe tindakan sosial yang dilakukan pemuka agama dalam menghadapi komunitas anak punk - Tindakan rasionalitas nilai ditunjukkan dengan mengajari anak punk mengaji dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di masjid - Tindakan afektif yang didasari pada rasa prihatin terhadap anak punk ditunjukkan dengan menampung anak punk di sebuah sanggar dan menjadikan mereka karyawan di rumah makan - Tindakan rasionalitas instrumental ditunjukkan dengan memberikan anak punk modal untuk membuka usaha - Tindakan tradisional ditunjukkan dengan menjadikan anak punk sebagai pemain rebana sebagaimana yang dilakukan oleh para orang tuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## Lampiran 3 Format catatan harian lapang

**CATATAN HARIAN KE-  
ANALISIS TINDAKAN SOSIAL AKTOR LOKAL DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Topik	:	
Metode	:	
Informan/Partisipan	:	
Hari & Tanggal	:	
Waktu & Durasi	:	
Tempat	:	
Kondisi & Situasi	:	

**DESKRIPSI**

**INTERPRETASI**

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal tiga bulan Juli tahun 1995 sebagai anak kesatu dari pasangan Bapak Bambang Gunadi dan Ibu Ely Muflihah. Pendidikan sekolah menengah atas (SMA) ditempuh di SMA Islam Terpadu (IT) Assyifa Boarding School Subang dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa program sarjana (S-1) di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) Fakultas Ekologi Manusia di IPB dan lulus tahun 2016. Penulis menerima beasiswa Tanoto Foundation semenjak berada di tingkat tiga. Semenjak lulus S1, penulis menjadi asisten dosen Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat (SPPM), Departemen SKPM dan menjadi asisten peneliti di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB. Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswa pascasarjana IPB Program Studi Pedesaan pada tahun 2018. Penulis juga menerima beasiswa penelitian yang berasal dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek-BRIN) melalui skema Penelitian Tesis Magister (PTM) tahun anggaran 2020.